



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**STRATEGI PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR
UNTUK MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(DENGAN STUDI DI PULAU NIPA)**

TESIS

**SRI UTOMO
NIM. 1 2013 01 05 016**

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
MARET 2015**



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**STRATEGI PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR
UNTUK MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(DENGAN STUDI DI PULAU NIPA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang ilmu Pertahanan

**SRI UTOMO
NIM. 1 2013 01 05 016**

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
MARET 2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sri Utomo

NPM : 1 2013 01 05 016

Program Studi : Keamanan Maritim

Judul Tesis : Strategi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Studi di Pulau Nipa)

Tesis dengan judul dan atas nama mahasiswa tersebut di atas telah disetujui oleh dosen Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diujikan dalam Ujian Proposal Tesis, sebagai bagian dari persyaratan penulisan Tesis pada Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Dosen Pembimbing I



Mayjen TNI Mar Dr. Syaiful Anwar, M.Bus.MA

Dosen Pembimbing II



Dr. Rajab Ritonga, M.Si

Bogor, Maret 2015

Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan



Dr. Ir. Arsegianto, M.Sc

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sri Utomo
NPM : 1 2013 01 05 016
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Strategi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Untuk
Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Dengan Studi di Pulau Nipa)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Pertahanan dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mayjen TNI Mar Dr. Syaiful Anwar,
M.Bus.MA



Pembimbing : Dr. Rajab Ritonga, M.Si



Penguji I : Kol. Laut (KH) Dr. Ir. Abdul Rivai Ras,
M.M., M.S., M.Si.



Penguji II : Bayu A. Yulianto, M.Si



Penguji III : Marsma TNI Sri Widodo, M.Si (Han)



Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Maret 2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Maret, 2015



Sri Utomo

NPM. 1 2013 01 05 016

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Utomo
NPM : 1 2013 01 05 016
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Manajemen Pertahanan
Jenis karya : Tesis

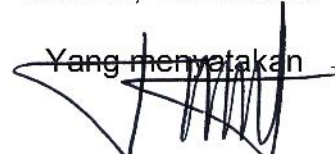
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

STRATEGI PENGAMANAN PULAU – PULAU TERLUAR UNTUK
MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA (DENGAN STUDI DI PULAU NIPA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Maret 2015

Yang menyatakan

Sri Utomo

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Selanjutnya, saya mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Secara khusus ucapan terima kasih ini saya haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsinya berupa bimbingan, pencerahan, saran dan masukan, serta bantuan lainnya yang tak ternilai harganya.

Penulisan tesis ini, dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Pertahanan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Laksamana Madya TNI Dr. D.A Mamahit, M.Sc., Rektor Universitas Pertahanan Indonesia yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Ir. Arsegianto, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan yang telah memberikan semangat, arahan, bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis ini.

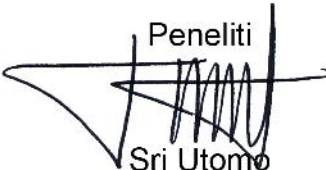
3. Mayor Jenderal TNI (Marinir) Dr. Syaiful Anwar, M.BUS, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan persetujuan dan rekomendasi, serta banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran guna membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan dan menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Rajab Ritonga, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan persetujuan dan rekomendasi, serta banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran guna membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan dan menyelesaikan tesis ini.
5. Kolonel Laut (KH) Dr. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si selaku Kaprodi Prodi Keamanan Maritim yang telah memberikan semangat, arahan, bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis ini.
6. Pejabat terkait di Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas Pertahanan, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau yang telah membantu peneliti memperoleh data-data yang peneliti perlukan untuk penelitian ini.
7. Amanda Octovina Manuputty, Istri tercinta, yang tulus dan terus memberikan dukungan doa, semangat, dan kasih sayangnya selama kuliah dan seterusnya.

8. Marsma TNI Sri Widodo, M.Si (Han), Laksma TNI Drs. Ir. Harjo Susmoro, SH. MH., Kolonel Laut (KH) Haris Djoko Nugroho, M.Si, Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si, Ir. Chris Triwinasis, M.Si, Bayu A. Yulianto, M.Si, Letkol Laut (KH) Dantes, Mayor Laut (P) Henry Munjoko, Lettu Laut (T) Darmanto, Letda Laut (T) Asep Suryanda, Kepada pihak yang telah menjadi narasumber bagi penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Seluruh Mentor, Senior dan Rekan Cohort I Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia yang telah memberikan semangat, saran, dan masukan yang sangat luar biasa dan tidak terlupakan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan karunia-Nya untuk dapat mengabdikan kepada Bangsa dan Negara.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian, saya berharap apa yang telah diupayakan dalam penulisan tesis ini semoga dapat memberikan manfaat terhadap kebijakan dan penyelenggaraan strategi pengamanan pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Maret 2015

Peneliti

Sri Utomo

NPM. 1 2013 01 05 016

ABSTRAK

Nama : Sri Utomo
NPM : 1 2013 01 05 016
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Manajemen Pertahanan
Judul Tesis : Strategi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Studi di Pulau Nipa)

Masalah pengamanan dan pengembangan pulau terluar menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia saat ini. Dari 12 pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, saat ini baru Pulau Nipa yang mendapat perhatian pemerintah baik dari segi pengamanan maupun blueprint rencana pengembangan. Pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura ini, dinilai memiliki beragam potensi strategis baik ditinjau dari sektor pertahanan dan keamanan maupun dari sektor ekonomi. Penelitian ini bertujuan melihat dan memahami bagaimana dinamika pelaksanaan strategi pengamanan di Pulau Nipa pasca dilakukannya reklamasi terhadap pulau ini, sekaligus untuk menganalisis sejauhmana strategi yang ada dapat dijadikan model pengembangan pulau-pulau terluar lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur dan penelusuran dokumen-dokumen terkait karakteristik Pulau Nipa dan konsep pengembangan sektor pertahanan dan ekonomi Pulau Nipa. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif, serta disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berupaya mempertahankan eksistensi Pulau Nipa dengan melakukan reklamasi dan penempatan personel TNI AL. Langkah selanjutnya, pemerintah akan mewujudkan blueprint rencana awal pengembangan kawasan pertahanan mendukung ekonomi. Dengan demikian, Pulau Nipa dapat menjadi basis pemantauan keamanan di wilayah perbatasan sekaligus sumber devisa negara. Strategi yang diterapkan di Pulau Nipa juga dapat diterapkan di pulau-pulau kecil terluar lainnya, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing pulau.

Kata kunci: Pulau Nipa, pengamanan, pulau-pulau kecil terluar, Strategi Maritim.

ABSTRACT

Name : Sri Utomo
NPM : 1 2013 01 05 016
Study Program : Maritime Security
Faculty : Manajemen Pertahanan
Thesis Title : Strategi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Untuk
Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Dengan Studi di Pulau Nipa)

Indonesia government put a serious concern on security and development issues of the outer islands. From a total 12 outer islands in Indonesia, currently only Nipa island that gets government attention, both in terms of security issues and development plan blueprints. Nipa island, which directly adjacent to Singapore is considered to have a various strategic potential, in terms of defense and security sector as well as from the economic sector. The objectives of the study are to see and understanding how the dynamics of the implementation of the security strategy in Nipa island after the reclamation, as well as to analyze the extent of existing strategies can be used as a model for the development of other outer islands.

Qualitative research is implemented in the study by conducting interviews, performing literature study and document research related to the focus of the study. Overall data obtained processed and analyzed qualitatively with inductive mindset, then presented descriptively.

This study concludes that the government of Indonesia attempt to maintain the existence of Nipa island through reclamation and the placement of Navy personnel. For the next step, the government of Indonesia will realize the blueprint to create supporting regional economic defense. Therefore, Nipa island will be the basis of a security monitoring in border region, as well as a source of foreign exchange. The strategy adopted on Nipa island can also be applied on other outer islands, by constantly adapting to each islands characteristics.

Keywords: Nipa island, security, litle outer islands, Maritime strategy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR BAGAN.....	XV
DAFTAR TABEL	XIV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka.....	14
2.1.1 Teori Strategi.....	14
2.1.2 Teori Strategi Maritim	17
2.1.3 Teori Geopolitik dan Wawasan Nusantara	22
2.1.4 Konsep Pengamanan Pulau-Pulau Terluar dengan Pendekatan Keamanan.....	27
2.1.5 Teori Pengembangan Wilayah.....	31

2.1.6 Penelitian Terdahulu.....	32
2.2 Kerangka Pemikiran	36
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan, Jenis dan Paradigma Penelitian.....	38
3.2 Informan Penelitian.....	39
3.3 Situs dan Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian.....	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	43
4.1 Gambaran Sebaran Data Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Pulau – Pulau Kecil Terluar	43
4.1.2 Gambaran Umum Pulau Nipa.....	49
4.1.3 Data Pertanahan Pulau Nipa.....	55
4.1.4 Potensi Pengembangan Pulau Nipa.....	57
4.1.4.1 Potensi Pengembangan Pulau Nipa Berdasarkan Kondisi Fisik.....	57
4.1.4.2 Potensi Pengembangan Pulau Nipa Berdasarkan Kondisi Wilayah Perairan Sekitar Pulau Nipa.....	59
4.2 Analisis dan Pembahasan Data Penelitian	60
4.2.1 Analisis Dinamika Pengamanan Pulau Nipa pasca dilakukannya Reklamasi.....	61
4.2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pengamanan di Pulau Nipa.....	62
4.2.1.2 Peran Kelembagaan dalam Pengamanan Pulau Nipa.....	74
4.2.1.3 Dinamika Pengamanan di Pulau Nipa.....	80
4.2.1.4 Pembangunan Infrastruktur di Pulau Nipa.....	86

4.2.2 Analisis Sejauhmana Strategi Pengamanan Pulau Nipa dapat dijadikan sebagai Model Pengembangan Pulau-Pulau Terluar Lainnya.....	91
4.2.2.1 Kebijakan dan Arah Strategi Pengamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.....	91
4.2.2.2 Pengembangan Kawasan Pertahanan di Pulau Nipa.....	96
4.2.2.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Ekonomi.....	100
4.2.2.4 Kelayakan Strategi Pengamanan Pulau Nipa dijadikan Model Pengembangan Pulau-pulau Terluar Lainnya.....	106
BAB 5 Kesimpulan dan Saran.....	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.1.1 Strategi Pengamanan Pulau Nipa Untuk Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	109
5.1.2 Strategi Pengamanan Pulau Nipa sebagai Model Pengembangan Pulau-pulau Terluar Lainnya.....	112
5.2 Saran.....	114
DAFTAR REFERENSI.....	115
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	5
Gambar 1.2	Pulau Nipa sebelum direklamasi.....	7
Gambar 1.3	Pulau Nipa setelah direklamasi.....	7
Gambar 1.4	Posisi Strategis Pulau Nipa.....	9
Gambar 4.1	Peta Lokasi Pulau Nipa.....	45
Gambar 4.2	Grafik Pemilikan Tanah di Pulau Nipa.....	50
Gambar 4.3	Grafik Penggunaan Tanah di Pulau Nipa..	51
Gambar 4.4	Infrastruktur di Pulau Nipa.....	75
Gambar 4.5	Infrastruktur di Pulau Nipa.....	76
Gambar 4.6	<i>Blue Print</i> Rencana Pengembangan Pulau Nipa.....	83
Gambar 4.7	Peta Nipa Transit Anchorage Area (NTAA).....	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Bagan Kerangka Berpikir.....	29
-----------	------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Jadwal Penyusunan Tesis.....	37
Tabel 4.1	Tabel Matriks Kebijakan Pengamanan dan Pengelolaan di Pulau Nipa.....	61
Tabel 4.2	Tabel Lalu Lintas Kapal di Selat Malaka...	96
Tabel 4.3	Tabel Lalu Lintas Kapal di Pelabuhan Singapura.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. B/1727/M/XI/2010 tentang <i>Blueprint</i> Zona Pertahanan Pulau Nipa |
| Lampiran 2 | Master plan Pangkalan TNI AL di Pulau Nipah seluas 15 HA |
| Lampiran 3 | Daftar Material Pos TNI AL Pulau Nipa |
| Lampiran 4 | Daftar Kapal Perang yang Terdeteksi di <i>Main Strait</i> Bulan Mei 2013 |
| Lampiran 5 | Daftar Deteksi Pesawat Tempur Bulan Mei 2013 |
| Lampiran 6 | Surat Lelang Pulau Nipa |
| Lampiran 7 | Transkrip Wawancara |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lingkungan strategis di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbud Hankam) merupakan indikator perlunya penyesuaian sikap dan perilaku untuk menjawab tantangan lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian diperlukan konsepsi bersifat strategis dan kooperatif di segala bidang. Dalam era globalisasi seperti yang terjadi saat ini, mewujudkan suatu kondisi memerlukan suatu strategi yang didukung oleh tekad yang kuat serta kapabilitas yang memadai. Strategi beserta *roadmap* merupakan wahana pengarah serta pengendali kegiatan ke depan, mengarahkan serta mengawal kegiatan sesuai arah yang benar menuju sasaran yang diharapkan (*Ends*). Strategi yang tepat harus mampu menjawab tiga pertanyaan yang mendasar, yaitu apa yang ingin diwujudkan (*Ends*), dengan apa mewujudkan (*Means*) serta bagaimana mewujudkannya (*Ways*).¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hakikat pertahanan negara adalah “*segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada hak kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, serta pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.*” Dasar filosofi dan yuridis ini diterjemahkan ke bidang teknis kemiliteran secara konsisten, sistematis dan terukur, sehingga diperoleh bentuk strategi dasar (*basic strategy*) guna mempertahankan suatu ruang wilayah. Dengan demikian TNI berkewajiban menyelenggarakan upaya-upaya pertahanan negara dari semua bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar ditinjau dari segi maritim.

¹Departemen Pertahanan RI, *Strategi Pertahanan Negara*, Jakarta, 2007 hal. 2

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau² dan panjang garis pantai kurang lebih lebih dari 81.000 km serta luas laut yang mencapai 3,1 juta km² . Dalam amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, pasal 25 A tercantum "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*"³ *United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS)* 1982 mengatur bahwa negara kepulauan merupakan negara yang terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau, dimana diantaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan. Pulau oleh *UNCLOS* didefinisikan sebagai "*daratan yang dibentuk alami dan dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas muka air pasang tinggi.*" *UNCLOS* juga mengatur rezim-rezim hukum laut, termasuk hukum negara kepulauan secara menyeluruh. Dengan konsep negara kepulauan ini, Indonesia memiliki hak penuh atas perairan di sisi-sisi pulau tersebut, serta berhak atas semua yang ada di dasar laut dan di ruang angkasa wilayahnya. Sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi sentral dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Hal ini merupakan modal bangsa yang dapat digunakan untuk mencapai kejayaan.

Secara geografis Indonesia, terletak di posisi silang jalur pelayaran antara sumber pasokan energi dari kawasan Teluk ke negara Industri di bagian Utara (utamanya Tiongkok, Jepang, Korea dan Taiwan), dan sebaliknya merupakan jalur *supply* atas komoditas industri dari negara

²Data resmi Bakosurtanal menyebutkan, jumlah pulau di Indonesia 17.508 (17.506 pulau setelah dikurangi Sipadan dan Ligitan). Jumlah pulau itu termasuk yang berada di muara dan tengah sungai, serta delta. Jumlah itu diperoleh Bakosurtanal bekerja sama dengan Dishidros TNI AL lewat survei dan pengumpulan data selama lebih dari satu tahun. Pengecekan di lapangan dilakukan berdasarkan peta dengan skala bervariasi dari 1:500.000 hingga 1:50.000. Selain itu bekerja sama dengan UI, Bakosurtanal memverifikasi pulau-pulau yang belum punya nama. Diketahui, ada 11.013 pulau tanpa nama. Lihat di : <http://nationalgeographic.co.id/forum/topic-1200.html>

³Lihat artikel *Pulau-Pulau Terluar dan Batas NKRI* dalam <http://geomatika.its.ac.id/archives/pulau-pulau-terluar-dan-batas-nkri/> , published 18 Januari 2006, diunduh 20 Agustus 2014.

maju tersebut. Demikian juga dari sisi Selatan – Utara, Indonesia juga di persilangan antara Australia di Selatan dan Jepang serta wilayah cakupan armada ketujuh Amerika Serikat di Asia Pasifik bagian Utara. Posisi geografis Indonesia merupakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dalam segi geoekonomi, geopolitik maupun geostrategis.⁴ Meski demikian, kekayaan sumber daya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, atau dari ujung ke ujung perbatasan wilayah teritorial Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Terdapat 92 pulau terluar yang tersebar di wilayah NKRI dengan luas pulau rata-rata antara 0,02 km² hingga 200 km². Namun masih banyak di antara pulau-pulau itu yang belum terurus, bahkan belum diberi nama. Selain itu, hanya 50 persen dari pulau terluar tersebut yang berpenghuni. Padahal 67 dari 92 pulau terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.⁵

Dengan posisi strategis yang disebutkan di atas, sebenarnya pulau terluar justru menjadi titik masuk *atau entry point* terpenting untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Posisi strategis yang ada, dengan terletak di antara dua benua dan dua samudera, membuat Indonesia menjadi jalur lintas kepentingan dunia. Suatu keuntungan yang bisa memberikan dampak positif tetapi juga kerawanan. Sebab, apabila tidak diwaspadai, maka akan menimbulkan berbagai ancaman terhadap aspek kehidupan bangsa, termasuk diantaranya pertahanan negara.

Pulau terluar adalah beranda terdepan Republik Indonesia.⁶ Perbatasan langsung antara pulau-pulau terluar Indonesia dengan negara-negara tetangga seringkali mengakibatkan terjadinya *overlapping claim*. *Overlapping Claim* wilayah maritim biasanya terjadi di wilayah laut suatu negara yang berdampingan, dimana penyelesaian dari hal tersebut

⁴Marsetio, *Sea Power Indonesia*, Jakarta: Universitas Pertahanan, 2014, Hal 54.

⁵Bambang Susanto, *Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia*, *Indonesian Journal of International Law*.

⁶<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/perbatasan-negara-perlu-ditangani-secara-intensif-dan-terpadu>

dapat dilakukan dengan negosiasi atau diplomasi.⁷ *Overlapping Claim* tentu saja membuat keamanan nasional serta kedaulatan suatu negara terancam. Hal ini akan berujung pada terjadinya sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Negara-negara yang berbatasan langsung dengannya. Sengketa merupakan pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁸ Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus mampu menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayahnya. Disinilah pulau terluar memiliki peran penting bagi sebuah negara, karena dengan terjaganya pulau-pulau terluar maka mencerminkan kedaulatan serta menjadi jaminan keutuhan wilayah.

Selain itu pulau-pulau terluar juga mempunyai berbagai persoalan yang harus segera ditangani. Pulau-pulau perbatasan mempunyai beberapa macam permasalahan, diantaranya adalah:⁹

1. Daerahnya merupakan daerah tertinggal, dimana penduduknya relatif terisolasi.
2. Penduduknya sedikit bahkan ada yang tidak berpenduduk dan umumnya aksesibilitas sulit/sulit dijangkau karena keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Berpotensi dijadikan tempat singgah bagi pelaku kejahatan seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan berbagai tindak kriminal lainnya.
4. Dapat diklaim sebagai milik negara lain.
5. Pengawasan dan pengamanannya sulit.
6. Mahalnya pemberdayaan sarana dan prasarana.¹⁰

⁷Hikmahanto Juwana, *Mencermati Hubungan Indonesia-Malaysia*, Jakarta: Suara Pembaharuan, 2009.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹Kamaludin, L. M, *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*, Malang: UMM, 2005 hal: 82.

¹⁰Etty Agoes R, *Kebijakan Dan Strategi Pemberdayaan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara dalam Hukum dan Pemberdayaan* Edisi Khusus Dies Natalis UI Ke 53, Jakarta: FHUI, 2003

Pulau Nipa merupakan salah satu pulau terluar dari 12 pulau terluar yang perlu mendapat perhatian khusus karena letaknya cukup dekat dengan Singapura. Pada awal tahun 2000 pulau ini menjadi perhatian utama akibat penambangan pasir yang di ekspor untuk reklamasi daratan Singapura, menyebabkan luas pulau berkurang dan nyaris tenggelam.¹¹ Kebanyakan wacana yang berkembang adalah kekhawatiran tentang ancaman tenggelamnya Pulau Nipa dan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura. Kedua hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan Indonesia kehilangan wilayah laut yang cukup signifikan karena berubahnya titik dasar pengukuran batas wilayah ke dua negara. Pulau Nipa yang berada di antara Selat Philip dan selat utama (*main strait*) secara administratif termasuk kedalam wilayah Desa Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini secara geografis terletak di koordinat $103^{\circ}39'04.68''$ - $103^{\circ}39'39.384''$ BT dan $18^{\circ}26.88''$ - $01^{\circ}9'12.204''$ LU yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Riau yang berada di bagian terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura di sebelah utara. Di pulau ini terdapat dua titik dasar (*basepoint*) yaitu titik TD 190 dan TR 190 A. Pulau ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dari dan menuju Pelabuhan Jurong Singapura. Kapal yang menuju pelabuhan Singapura dari arah barat berlayar di alur pelayaran sebelah Selatan Pulau Nipa, sebaliknya kapal dari pelabuhan Jurong Singapura menuju ke arah barat berlayar di alur sebelah Utara dengan frekuensi pelayaran 100 kapal/hari.

Pulau Nipa pernah diindikasikan hampir tenggelam pada saat pasang tertinggi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir di daerah sekitar Pulau Nipa yang menyebabkan terjadinya abrasi secara terus menerus di pantai Pulau Nipa. Pada saat permukaan air laut surut terendah, luas Pulau Nipa yang tampak $\pm 60,00$ ha, sedangkan pada saat air laut pasang, luas Pulau Nipa yang tampak hanya $\pm 0,62$ ha. Pada

¹¹http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456

gambar 1.2 di bawah ini terlihat pantauan udara kondisi Pulau Nipa sebelum dilakukan proses reklamasi:

Gambar 1.2 Pulau Nipa sebelum direklamasi



Sumber : Lanal Batam, Oktober 2014

Berbeda dengan pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil lainnya, saat ini sejumlah pembangunan sudah dilakukan di Pulau Nipa. Diantaranya sudah mulai dilakukan reklamasi, dibangun sarana dan prasarana fisik termasuk pos TNI AL dan menara pengawas serta sarana navigasi. Saat ini, pemerintah juga sedang membangun Nipa Transit Areas Anchorage (NTAA), seperti yang terlihat dalam gambar 1.3:

Gambar 1.3 Pulau Nipa setelah direklamasi



Sumber : Lanal Batam, Oktober 2014

Ada beberapa posisi strategis yang dimiliki Pulau Nipa yaitu: selain keberadaannya sebagai titik pangkal penentuan batas wilayah Indonesia.

Posisi strategis pertama adalah kemungkinan wilayah ini mengandung endapan mineral ekonomis, seperti timah, emas dan bauksit. Indikasi itu dapat dilihat dari sejarah geologi Selat Malaka yang sebelum zaman es mencair berupa daratan, bagian dari Paparan Sunda. Apabila bisa dibuktikan pada dasar Selat Malaka terdapat jejak sungai purba, tidak tertutup kemungkinan mineral ekonomis tersebut diendapkan di sana sehingga maraknya isu penambangan pasir di wilayah ini sebenarnya adalah pencari mineral yang setelah diekstraksi di atas kapal membuang lumpur dan lempungnya ke laut. Hal itulah yang menembah kekeruhan laut di sekitar Pulau Nipa sangat tinggi sesuai dengan laporan Ekspedisi PotRets (*Potential Resources Investigation Surrounding*).¹²

Posisi strategis kedua menjadikan Pulau Nipa sebagai pusat monitoring polusi lingkungan laut sekitar Selat Malaka dan Selat Philip. Kedua selat itu merupakan urat nadi lalu lintas perdagangan terpadat di dunia, yang menghubungkan Asia Barat dan Timur dengan kepadatan kapal dagang sekitar 50.000 yang berlalu lalang setiap tahunnya. Sebagian besar kapal tersebut adalah tanker yang memuat ribuan galon minyak tanah, solar dan sebagainya, yang sangat riskan terjadi bencana pencemaran tumpahan minyak ataupun masuknya material polutan lainnya ke wilayah Indonesia.

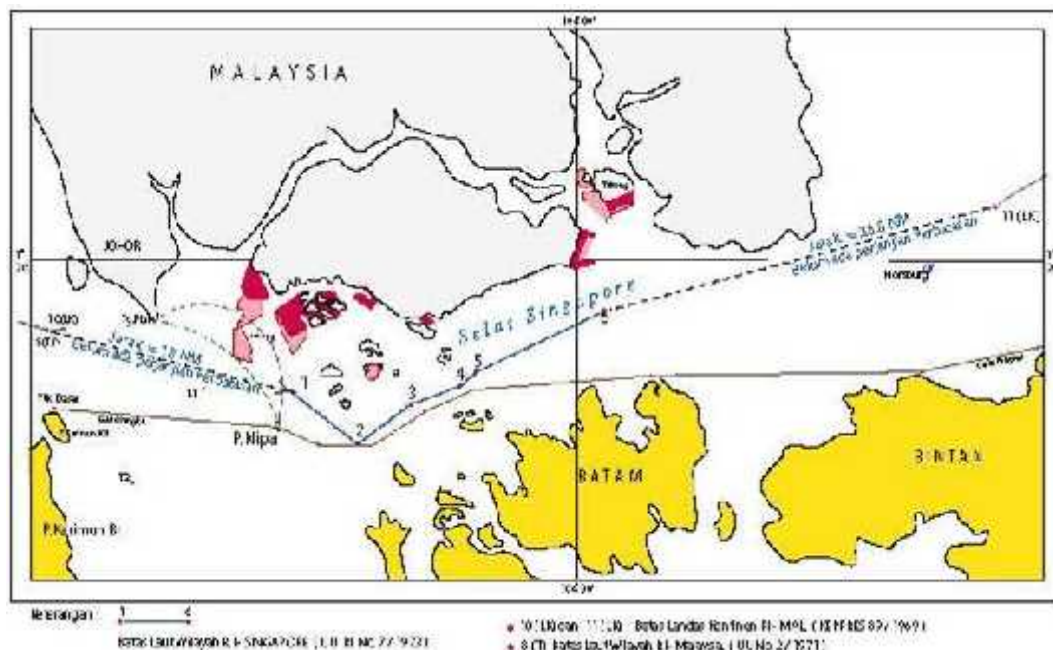
Posisi strategis yang ketiga menjadikan Pulau Nipa sebagai salah satu pulau untuk monitoring bajak laut di sekitar Selat Malaka dan Selat Philip. Sebagai jalur lalu lintas perdagangan yang sangat ramai, aksi perompakan marak terjadi di kedua selat ini. Bahkan, banyaknya kasus perompakan yang terjadi membuat wilayah ini mendapat perhatian khusus dunia internasional.

Pulau Nipa juga merupakan salah satu pulau yang berada dalam kawasan *Special Economic Zone* (SEZ) Batam, Pulau Nipa secara regional berada dalam peta kerjasama kawasan IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapura *Growth Triangle*) serta mempunyai kedekatan dengan kawasan ASEAN lainnya. Konsekuensi dari posisi regional ini, kawasan

¹²Ekspedisi PotRets adalah tim peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang melakukan survei geologi di Pulau Nipa.

Pulau Nipa dapat menempati posisi strategis dalam aliran barang dan jasa antarnegara, terutama dengan negara ASEAN lainnya. Gambaran posisi strategis Pulau Nipa dapat terlihat dalam gambar 1.4 berikut ini:

Gambar 1.4 Posisi Strategis Pulau Nipa



Sumber : Lanal Batam, Oktober 2014

Pengembangan kegiatan pengamanan dan kegiatan pengelolaan di Pulau Nipa cukup penting dalam rangka untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi dan prospek ekonomi dan Pulau Nipa sangat besar kalau di manfaatkan sesuai dengan potensinya. Hanya saja memang ini memerlukan ide dan konsep yang tidak biasa, artinya disatu sisi mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk pelayanan kebutuhan pelayaran internasional dan untuk meningkatkan ketahanan nasional.¹³ Pemerintah akan menjadikan Pulau Nipa menjadi model bagi pengembangan pulau-pulau terluar. Pulau Nipa memiliki potensi tidak hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan tetapi

¹³<http://www.wilayahperbatasan.com/pulau-pulau-perbatasan-ri-singapura-kian-hilang-belajar-dari-reklamasi-pulau-nipah/>

juga kepentingan ekonomi.¹⁴ Bertolak dari keadaan tersebut tentunya sangat dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam pengamanan dan pengelolaan Pulau Nipa dan pulau-pulau terluar lainnya secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan dalam satu arah kebijakan.

Menimbang berbagai persoalan tersebut diperlukan berbagai strategi antisipasi terhadap pengamanan pulau-pulau terluar sebagai daerah perbatasan. Strategi pengamanan pulau-pulau terluar haruslah mampu mewujudkan pengamanan sumber daya alam dari ancaman berbagai penyelundupan dan menghindari terjadinya *Overlapping Claim*. Selain itu pengamanan yang dilakukan haruslah tetap menjamin tetap tegak dan utuhnya wilayah NKRI dan haruslah diprioritaskan untuk memacu pemerataan pemberdayaan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok daerah perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat di wilayah perbatasan serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu sesuai semangat otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Sehingga pada gilirannya, pulau terluar juga dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian mengenai Strategi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar untuk Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Studi Kasus Pulau Nipa dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah perlu menjadi prioritas dalam menangani masalah pulau-pulau terluar yang berada di perbatasan, apalagi keberadaan pulau-pulau terluar tersebut sangat strategis. Pulau Nipa, sebagai salah satu pulau terluar

¹⁴Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, saat berkunjung ke Pulau Nipa bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/06/m3lanh-pulau-nipah-jadi-model-pengembangan-pulau-terluar>

yang berbatasan langsung dengan Singapura, memiliki beragam potensi strategis baik ditinjau dari prospek ekonomis maupun pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebanyak lebih kurang 100 kapal per hari melintas di alur perairan sekitar Pulau Nipa. Hal ini menunjukkan bahwa alur di wilayah itu ramai dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Hal itu juga perlu diantisipasi, karena dapat menimbulkan potensi bahaya bagi pertahanan dan keamanan negara. Mengingat pengembangan Pulau Nipa sebagai bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan *defence supporting economy* (pertahanan mendukung ekonomi). Dimana pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa pengembangan Pulau Nipa menjadi model untuk pengembangan pulau-pulau terluar lainnya yang memiliki potensi tidak hanya untuk kepentingan keutuhan wilayah, pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukkan kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana dinamika pengamanan Pulau Nipa *pasca* dilakukannya reklamasi?

1.2.2 Sejauhmana strategi pengamanan Pulau Nipa dapat dijadikan sebagai model pengembangan pulau-pulau terluar lainnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui tesis ini tujuan yang akan dicapai adalah:

1.3.1 Menganalisis dinamika pengamanan Pulau Nipa *pasca* dilakukannya reklamasi.

1.3.2 Menganalisis sejauhmana strategi pengamanan Pulau Nipa dapat dijadikan sebagai model pengembangan pulau-pulau terluar lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang strategi dalam pengamanan pulau-pulau terluar yang akan berpengaruh terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam mendukung Sistem Pertahanan Negara. Secara lebih spesifik manfaat penelitian ini terdiri dari aspek teoretis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan khususnya di bidang pertahanan negara.

1.4.2 Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu strategi, khususnya sebagai referensi perumusan strategi bagi pemerintah dalam pengamanan pulau-pulau terluar.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini mengambil topik tentang strategi pengamanan pulau-pulau terluar untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Studi di Pulau Nipa. Agar penelitian lebih fokus, maka perlu adanya ruang lingkup sesuai dengan topik penelitian. Selain itu, untuk menjelaskan alur penelitian perlu dituangkan pada gambaran desain penelitian.

1.5.1 Ruang Lingkup. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada strategi dalam pengamanan di Pulau Nipa, dengan obyek penelitian, Pulau Nipa. Pulau Nipa dipilih dari 12 pulau terluar lainnya, karena Pulau Nipa memiliki sejumlah kelebihan yaitu lokasinya yang strategis dan sudah memiliki strategi pengamanan pulau terluar.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti mendesain penelitian menjadi 5 bab yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Bab 1: Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Kedua, Bab 2: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka meliputi landasan teori dan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

Ketiga, Bab 3: Metodologi Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan, jenis dan paradigma penelitian; informan penelitian; situs dan lokasi penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data penelitian.

Keempat, Bab 4: Hasil penelitian dan Analisis data. Pada bab ini menguraikan tentang gambaran sebaran data penelitian, serta analisis data dan pembahasan dengan mengaitkan data dan temuan dengan teori/konsep yang relevan.

Kelima, Bab 5: Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh bahasan dan saran atau rekomendasi sebagai upaya perbaikan dalam strategi pengamanan pulau-pulau terluar.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini diuraikan tentang perkembangan teoritis berupa tinjauan pustaka yang meliputi beberapa teori dan penelitian terdahulu yang sejenis. Beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu: teori strategi maritim dan konsep pengamanan pulau terluar dalam konteks geostrategis dan geopolitik. Penelitian terdahulu meliputi: penelitian Richarunia Wenny Ikhtiari, penelitian Sasmini dan penelitian Desriani dan Faisyal Rani. Selain itu, dicantumkan tentang kerangka pemikiran yang berupa alur pemikiran pada penelitian ini.

2.1.1 Teori Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁵ Selanjutnya Quinn seperti yang dikutip dalam Grant¹⁶ mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi

¹⁵Stephanie K. Marrus, *Building The Strategic Plan: Find Analyze and Present The Right Information*, USA: Wiley, 2002.

¹⁶Robert M. Grant, *Analisis Strategi Komtemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*, Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 1999.

menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama harus memiliki keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan negara atau organisasi memperoleh, seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas lawan negara atau organisasi tersebut. Dengan demikian strategi merupakan usaha untuk mengubah kekuatan negara atau organisasi relatif lebih tinggi terhadap lawan dengan seefisien mungkin.

Menurut penjelasan Hamel dan Prahalad¹⁷ “bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para masyarakat di masa depan”. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti¹⁸ menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan

¹⁷Gary Hamel & C.K Prahalad, *Kompetensi Masa Depan*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.

¹⁸Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson¹⁹ menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan *internal* dan *eksternal* yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang diusahakan dan apa yang dilakukan.

Indonesia mempunyai karakteristik geografis sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengamanan pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan antarnegara harus dilakukan. Termasuk di dalamnya menetapkan strategi pertahanan negara yang tepat dengan memadukan kekuatan militer dan nirmiliter, berdasarkan pada visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa.

¹⁹ John M. Bryson, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi*, Jakarta: Pusaka Pelajar, 2011.

2.1.2 Teori Strategi Maritim

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan tulisan TNI Angkatan Laut mengenai Strategi Pertahanan Maritim dan produk-produk strategis Departemen Pertahanan Republik Indonesia berupa buku Putih Pertahanan, Doktrin Pertahanan Negara, Strategi Pertahanan Negara, Postur Pertahanan Negara, Doktrin TNI dan Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya secara deduktif untuk mengeksplor strategi pengamanan pulau-pulau terluar dengan studi kasus di Pulau Nipa. Selain itu, Peneliti menyisipkan teori yang mendominasi karakter kekuatan laut sebagai strategi maritim yang dijelaskan oleh A.T Mahan dan Julian S. Corbett.

Dalam penyelenggaraan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dirancang sasaran Pertahanan Laut Nusantara meliputi tercegahnya niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tertanggulangnya setiap bentuk ancaman aspek laut yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berbagai bentuk gangguan keamanan di dalam negeri dan pemberontakan bersenjata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya kondisi laut yurisdiksi nasional yang terkendali.

A.T Mahan berpendapat *“kemampuan untuk mengamankan garis perhubungan sendiri dan kemampuan mengendalikan garis perhubungan laut yang digunakan lawan merupakan faktor utama atau kunci bagi penguasaan laut.”*²⁰. Philipp Annawitt dalam *Geneva Centre for Security Policy 2010*, menyatakan *“keamanan di tingkat lokal dengan sangat mudah akan mempengaruhi dan berdampak pada tingkat nasional dan seterusnya, sehingga pada akhirnya mengancam keamanan regional dan internasional.”*²¹

²⁰ A.T.Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, New York:Dover Publications, Inc., 1987, hal 25-88

²¹ Phipipp Annawitt, *Geneva Papers, Global Security and Regional Responses: Conflict Management in a Fractured World 2010* hal.11 dalam buku Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

Untuk menjadi bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut, dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi. Mahan menyatakan, jaminan keamanan laut melalui penguasaan jalur transportasi atau komunikasi laut oleh kekuatan maritim merupakan syarat bagi tercapainya tingkat penguasaan terhadap lawan serta pengendalian keadaan konflik, serta kekuatan laut akan menjamin kesejahteraan bangsa dari suatu negara jika didukung oleh 6 komponen yang mempengaruhi kekuatan laut, yaitu : (1) posisi geografi, (2) bentuk geografi, (3) luas wilayah, (4) jumlah penduduk, (5) watak rakyat, dan (6) sikap pemerintah. Isi pokok dari strategi laut Mahan adalah menguasai laut, Angkatan Laut superior, menghancurkan lawan, serta penguasaan laut melalui perdagangan dan keunggulan geografi²². Laut adalah satu, artinya laut tidak dapat dipagari, dipasang kubu-kubu dan dipertahankan seperti daratan. Strategi maritim adalah penguasaan laut yaitu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri serta menutup peluang lawan untuk menggunakannya.

Pada penerapannya, strategi maritim itu tentu berkaitan dengan pelaksanaannya baik pada masa perang maupun damai. Aktor pengancam terhadap *survival element domain* maritim yang terus berkembang sebagai hibrid secara alami, interkoneksi dan berbentuk campuran yang sulit membedakan antara kejahatan transnasional, terorisme maritim dan kejahatan kriminal lainnya khususnya di wilayah domain maritim. Karena itu definisi sederhana tentang keamanan maritim adalah keamanan yang lebih kombinatif preventif dan responsif yang terukur untuk melindungi seluruh elemen domain maritim terhadap pengancamnya dari setiap tindakan yang tidak didasari dengan regulasi yang sah (*unlawful acts*). Bisa juga didefinisikan sebagai kegiatan internasional, interagensi, interoperability, baik oleh sipil maupun militer untuk memitigasi resiko serta melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruang domain maritim. Konsentrasi keamanan maritim adalah

²²*Ibid*, hal 25-88

melawan penggunaan atau manipulasi tidak sah elemen domain maritim. Kata kunci dalam definisi itu ialah terukur, responsif, dan preventif yang dialamatkan pada tindakan penegakan hukum baik oleh orang/institusi sipil maupun militer dalam operasi pertahanan maritim (*maritim's defense*) sebagai seorang/institusi militer. Dengan penggunaan kekuatan angkatan laut itu maka kita bersepakat tentunya bahwa geografi maupun geoekonomi tak terbantahkan lagi merupakan jantung kuasa (*power dan strategy*).²³

Dalam teori Julian S. Corbett strategi maritim tidak hanya mengenai peperangan, terdapat juga pengembangan taktik, logistik, komando, dan kendali pemerintah, komunikasi, kapal, senjata dan aspek kekuatan laut lainnya beserta teknologi. Menurut Corbett, fungsi dari kekuatan laut dalam mencapai *command of the sea*, diantaranya adalah mempersiapkan armada tempur sebagai perlawanan *command of the sea* pada tingkatan perlawanan aktif dan pasif dan mengamankan jalur maritim untuk perdagangan.²⁴ Ada dua kepentingan nasional yang selalu harus dipertimbangkan didalam merumuskan kebijakan pertahanan negara di laut yaitu kepentingan universal bangsa Indonesia dan kepentingan nasional di dan atau lewat laut.

Pertama, Kepentingan Universal bangsa Indonesia, yaitu: (1) Terjaminnya kedaulatan wilayah NKRI, (2) Terjaminnya persatuan nasional, (3) Terjaminnya pembangunan nasional yang berlanjut untuk kemakmuran bangsa, (4) Terwujudnya kewibawaan pemerintah, dan (5) Terwujudnya hubungan yang serasi saling menghormati dengan negara tetangga;

Kedua, Kepentingan Nasional di dan atau lewat laut, yaitu : (1) Terjaminnya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia; (2) Terjaminnya keamanan Garis Perhubungan Laut (GPL) antarpulau, antarwilayah, antarnegara dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); 3)

²³ Setianegara, Herry, *Strategi Maritim*, Jakarta: Seskoal, 2015.

²⁴Clark G. Reynolds, *Command of the Sea: The History and Strategy of maritime Empires*, Book II, hal 32-33

Terjaminnya keamanan sumber daya alam laut (hayati dan nonhayati) untuk kesejahteraan bangsa; 4) Terjaminnya keamanan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Lingkungan laut atau maritim sedikitnya memiliki lima aspek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan dan menentukan strategi militer, yaitu: (1) Ekonomi. Kehadiran kapal-kapal perang di suatu perairan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi suatu negara. Alur-alur laut yang melewati suatu negara juga dapat digunakan oleh kekuatan asing untuk melindungi kepentingannya dengan alasan ekonomi, baik secara individu maupun secara gabungan. Dengan perkembangan ekonomi yang masih belum menggembirakan kemampuan anggaran untuk pertahanan masih kecil, $\pm 2\%$ PDB. Sampai dengan 25 tahun ke depan rancangan alokasi anggaran masih kecil sehingga persiapan alutsista TNI masih belum memadai; (2) Politik. Lingkungan maritim senantiasa sarat dengan aspek politik, baik dalam maupun luar negeri. Politik dalam negeri sebuah negara kepulauan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintahan negara tersebut memberikan jaminan rasa aman dan keberlanjutan kehidupan di seluruh wilayahnya. Keberadaan kekuatan angkatan laut bagi negara kepulauan dapat digunakan untuk memperbesar opsi politik atau kepentingan lainnya; (3) Hukum. Salah satu produk hukum dalam lingkungan maritim adalah Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 membagi lingkungan maritim menjadi beberapa rezim-rezim laut. Dengan diberlakukannya UNCLOS 1982, membutuhkan penataan hukum nasional baik Indonesia maupun negara-negara lain yang telah meratifikasinya. Aplikasi strategi maritim dimana penyelenggaraannya perlu dukungan komponen pendukung dan cadangan, legalitas formalnya belum ada, UU mobilisasi, UU komponen cadangan dan UU komponen pendukung belum ada; (4) Militer. Aspek militer di laut secara inheren memiliki segi teknologi, sehingga profesionalisme angkatan laut suatu negara selalu dikaitkan dengan penguasaan dan penggunaan teknologi yang relevan dan muntakhir. Segi lain dari aspek militer menyangkut bertambahnya

kebutuhan masing-masing angkatan laut untuk beroperasi bersama baik secara bilateral maupun multinasional. Secara nyata TNI AL masih terbatas alat sistanya, peralatan tempur modern sedikit jumlahnya;(5) Lingkungan Fisik/Geografi. Pemahaman terhadap lingkungan fisik yang menyeluruh dimana kekuatan maritim akan beroperasi sangat penting, seperti kondisi geografi, hidro-oseonografi dan meteorologi. Daerah operasi kekuatan maritim mulai dari perairan dalam di laut bebas (*Blue Waters*), ke perairan yang lebih dangkal (*Green Waters*) sampai ke perairan pantai, muara dan sungai (*Brown Waters*). Karakteristik fisik yang paling penting adalah posisi daratan yang berbatasan dengan laut, yang merupakan wilayah maritim. Pemahaman ini dimiliki oleh TNI AL, sebagian masyarakat namun *nature* pemerintah masih belum mendukung dengan konsep pembangunan yang *land based oriented*.

Kekuatan maritim pada dasarnya memiliki atribut operasional yang bersifat khusus, yaitu: (1) Akses. Lebih dari sepertiga bagian dari dunia diliputi oleh laut dan hal ini merupakan akses bagi kekuatan maritim untuk memanfaatkan laut sebagai media strategis dalam pengerahan kekuatan ke daerah-daerah kepentingan dan ancaman yang signifikan. Negara-negara yang terkurung oleh daratan akan mendapat akses dari laut melalui kerja sama dengan negara pantai yang bertetangga; (2) Mobilitas. Kekuatan Angkatan Laut memiliki mobilitas yang tinggi untuk memindahkan kekuatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas tinggi yang dimiliki akan mempermudah dalam menghadapi perubahan situasi dan perkembangan yang tidak diharapkan; (3) Keanekaragaman Tugas (*Versality*). Kapal perang dapat lebih mudah merubah postur militernya, mampu melaksanakan tugas secara bersamaan, dan dapat disiapkan dengan cepat untuk melaksanakan tugas yang lainnya, melalui kesiapan yang selalu dipelihara dan ditingkatkan. Pada situasi damai kapal perang dapat dengan segera menjadi postur tempur jika diperlukan. Disamping itu kapal perang memiliki daya tahan operasi, kapasitas angkut, kemampuan untuk perbaikan dan kehadirannya di suatu perairan

dapat memiliki efek/pengaruh langsung maupun tidak langsung, sehingga penggunaannya sangat fleksibel.

Dalam hal pelaksanaan pertahanan laut suatu negara dalam situasi lingkungan eksternal yang makin meluas tingkat ancamannya di perairan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus mendapat dukungan seluruh komponen masyarakat, pemerintah serta prajurit profesional. Dalam isu ini TNI Angkatan Laut diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tantangan di masa depan, dimana dijelaskan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki tugas pada matra laut, diantaranya : Pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Kelima, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.²⁵ Selain itu, peneliti berpendapat bahwa perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat global dan regional, perlu dicermati oleh para analisis, perancang, pembuat dan pengambil keputusan politik luar negeri dan pertahanan di Indonesia agar dapat memperoleh *deterrence effect* di dalam pengamanan pulau-pulau terluar untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Teori Geopolitik dan Wawasan Nusantara

Geopolitik berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan sekelompok manusia dengan sepotong wilayah tertentu menjadi satu kesatuan negara yang kokoh, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Dauglas

²⁵UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Jackson dalam Wahyono²⁶, *“geopolitik mempelajari fenomena politik dalam kaitannya dengan ruang, yaitu bagaimana membina ruang negara dan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan kehidupan dalam ruang negara tersebut.”*

Menurut pendapat Abdul Rivai Ras, *“pada dasarnya geopolitik adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konstelasi geografis negara, dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis demi penyelenggaraan pemerintah dan berbagai penentuan kebijakan secara rasional berdasarkan realita yang sesuai dan sejalan dengan cita-cita nasional.”*²⁷ Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai Negara kepulauan. Bentuk negara kepulauan, beserta masyarakatnya yang sangat beragam, dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alamnya, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika berbagai aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara aspek penting yang dipengaruhi kondisi geografi Indonesia termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat dijelaskan dengan pandangan geopolitik, geoekonomi dan geososial budaya, serta secara keseluruhan menjelaskan geostrategi pertahanan negara Indonesia. Dengan demikian, strategi pertahanan negara berkenaan dengan geopolitik dan geoekonomi, diarahkan kepada upaya menjaga kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kondisi geografi Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi

²⁶Wahyono, *Geopolitik dan Geostrategi RI Untuk PJPT II Dalam Rangka Implementasi Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Lemhanas, 1991, hal:44.

²⁷Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik, Sudut Pandang Indonesia*, Jakarta, APSINDO, 2001.

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kemudian peraturan presiden ini disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. Dalam peraturan presiden ini dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menurut pandangan ajaran Rudolf Kjellen dalam Minto Rahayu²⁸ *“negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya, ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, ke luar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik.”* Melihat perkembangan lingkungan strategis yang membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman maka sifat ancaman tidak lagi didominasi oleh ancaman militer tetapi juga oleh nonmiliter, serta tidak terbatas hanya pada ancaman tradisional tapi juga ancaman nontradisional.

Mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi, semua komponen pertahanan negara dan unsur-unsur di luar bidang pertahanan dituntut untuk saling mendukung dan bersinergi satu dengan yang lain,

²⁸Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Grasindo, 2007.

dengan senantiasa mengindahkan tataran dan lingkup kewenangan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Diantara ancaman aktual yang menuntut sinergisme yang tinggi dan harus mendapat perhatian yang serius pada lima tahun ke depan²⁹, adalah ancaman terhadap konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik horizontal, radikalisme, kelangkaan energi dan ragam kegiatan ilegal baik di darat maupun di laut yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kesiapan pertahanan negara dalam menghadapiancaman potensial, antara lain pencemaran lingkungan, pandemik, *cyber crime*, pemanasan global, krisis finansial, agresi militer, serta berbagai kemungkin anancaman yang muncul di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia tetap menjadi perhatian pembangunan pertahanan negara dalam jangka panjang.

Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan *eksistensi* negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut.³⁰

Konsep Geopolitik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung pengertian bahwa geopolitik memberikan pengertian sebagai suatu pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan geografi negara dan

²⁹Lihat lampiran Peraturan Presiden no 41 tahun 2010 tentang *Kebijakan Umum Pertahanan Negara*.

³⁰*Opcit*, hal: 9

bagaimana memanfaatkan keuntungan letak geografis Indonesia untuk kepentingan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia. Geopolitik Indonesia secara eksplisit tertuang pada Wawasan Nusantara sebagai konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Pada tahun 1972 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), wawasan nasional ini diteliti dikaji dan dikembangkan agar tetap tegak dan menjadi pandangan nasional terhadap wilayahnya sendiri. Sehingga pada tahun 1973 Wawasan Nusantara disahkan dengan ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.³¹

Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan

Dilihat dari segi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki potensi konflik dengan negara lain yang berbatasan harus mendapat perhatian dan prioritas penanganan, mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum di wilayah perbatasan yang dapat berpengaruh terhadap pertahanan Negara.

Dalam doktrin Pertahanan Negara yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman dengan memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer maupun nirmiliter. Keterpaduan kekuatan militer dan nirmiliter merupakan pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta. Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan

³¹Sumarsono, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001,hal:80.

Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ini Indonesia melaksanakan pengamanan terhadap pulau-pulau terluar yang memiliki fungsi strategis sebagai penentu batas wilayah dengan negara tetangga. Pengamanan dilaksanakan dengan menghadirkan pasukan penjaga pengamanan pulau yang dilaksanakan pasukan TNI.

2.1.4 Konsep Pengamanan Pulau-Pulau Terluar dengan Pendekatan Keamanan

Pulau-pulau terluar merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata dan berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Pengembangan konsep keamanan terpadu di pulau-pulau terluar merupakan pengembangan konsep yang mengandung arti bahwa

konsep keamanan terpadu di pulau-pulau terluar bukan menjadi tanggung jawab institusi TNI saja, tetapi juga melibatkan kementerian terkait dengan pelibatan seluruh aparat keamanan perbatasan.

Konsep pengamanan di pulau-pulau terluar disesuaikan dengan kondisi obyektif kemampuan negara saat ini, namun tetap mengacu kepada kebutuhan masa depan serta memperhatikan pengaruh lingkungan strategis. Untuk meningkatkan stabilitas keamanan di pulau-pulau terluar serta mencegah terjadinya pelanggaran maka dikembangkan strategi pengamanan pulau-pulau terluar dengan pendekatan keamanan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Pengembangan dan penggelaran kekuatan satuan TNI diharapkan memiliki keseimbangan bahkan mengungguli kekuatan yang dimiliki negara tetangga, dengan demikian landasan pengembangan dan penggelaran TNI diatur sebagai berikut : Pertama, pengembangan dan penggelaran TNI harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografi strategi pertahanan. Kedua, pengembangan dan penggelaran kekuatan TNI harus memenuhi tersedianya unsur-unsur komando, satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi, satuan kewilayahan yang besaran kekuatannya ditentukan dengan dasar pertimbangan adanya keseimbangan yang proporsional.

Secara tradisional, tentara adalah salah satu kekuatan nasional negara (*instrumen of national power*), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugas, TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi. OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis (*counter insurgency*), tugas

mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan dan tugas perdamaian.³²

Perkembangan dan kecenderungan dalam konteks strategis memberikan indikasi bahwa ancaman tradisional berupa agresi atau invasi sesuatu negara terhadap negara lain sangat kecil kemungkinannya. Sedangkan kecenderungan keamanan global memunculkan ancaman baru, yakni ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional yang dilakukan oleh aktor non-negara. Ancaman keamanan non-tradisional tersebut pada awalnya merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban publik. Namun pada tingkat eskalasi tertentu, ancaman dapat berkembang sampai kepada taraf yang membahayakan keselamatan bangsa. Untuk mencegah dampak yang lebih luas dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul, diperlukan kehadiran kekuatan militer. Diperkirakan, ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia lebih besar kemungkinannya yang berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri.³³

Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas dan mendesak. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 3 tahun 2002, yaitu TNI mempunyai tugas untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Oleh karena itu, kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional dilaksanakan dengan OMSP yang dipertanggungjawabkan kepada TNI. Dalam pengaman tugasnya, TNI sarat dengan pengalaman operasi militer selain perang, baik di dalam maupun di luar negeri.³⁴

Dalam melaksanakan OMSP, TNI tidak akan mengambil alih peran instansi pemerintah yang lain dan tidak selalu berperan secara tunggal. Pada keadaan tertentu TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan instansi fungsional dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis. Sesuai bentuk ancaman, OMSP dilaksanakan TNI dengan memprioritaskan

³² Departemen Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan RI*, Jakarta, 2003

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

tindakan preventif dibandingkan dengan tindakan represif. Keberhasilan tindakan preventif akan mampu menghindari jatuhnya korban dan dampak negatif yang lebih besar.³⁵

OMSP oleh TNI diimplementasikan melalui keikutsertaannya secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Disamping untuk menghadapi ancaman kekuatan bersenjata, OMSP diwujudkan sebagai keikutsertaan TNI mengatasi masalah di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lingkup OMSP antara lain menindak gerakan separatis bersenjata, melawan terorisme, mengatasi radikalisme, mengatasi konflik komunal, memberi bantuan kepada pemerintah sipil dalam mengembalikan ketertiban publik, mengatasi dampak bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), serta melaksanakan tugas perdamaian dunia.³⁶

Konsep OMSP mungkin menimbulkan kesan adanya kerancuan atau tumpang tindih antara peran TNI dengan institusi lain, khususnya kewenangan Polri dalam masalah keamanan umum atau ketertiban publik. Kerancuan tidak akan timbul bila hakekat TAP MPR No. VI dan VII tahun 2000 dipahami. Peran TNI sebagai kekuatan pertahanan negara adalah penggunaan kekuatan kekerasan bersenjata untuk mengatasi ancaman, sedangkan Polri sebagai kekuatan keamanan adalah menegakkan keamanan dan ketertiban umum (*public order*) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertahanan negara kemudian dijabarkan dalam UU No. 3 tahun 2002, antara lain menetapkan OMSP sebagai salah satu tugas TNI. Setiap tugas pertahanan negara akan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada tujuan pertahanan negara yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah nasional, dan menjaga keselamatan dan kehormatan bangsa.³⁷

Dalam konteks strategis, hakekat pertahanan negara merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan nasional (*national security*)

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

dengan kekuatan militer. Di samping pertahanan negara, upaya mewujudkan keamanan nasional secara damai adalah dengan instrumen politik dan ekonomi, yaitu menggunakan kekuatan diplomasi dan atau kekuatan ekonomi secara mandiri atau kombinasi keduanya. Dukungan pertahanan negara terhadap keamanan nasional dengan penggunaan kekuatan bersenjata, pertama-tama berperan sebagai kekuatan penangkal, kemudian berperan sebagai kekuatan penindak dengan kekerasan bersenjata bila penangkalan diabaikan atau gagal. Karena itu pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan dalam arti luas.

2.1.5 Teori Pengembangan Wilayah

Teori pengembangan wilayah terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Menurut Nugroho dan Danuri³⁸, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Menurut Hoover dan Giarratani dalam Nugroho dan Danuri³⁹, perencanaan pengembangan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhi oleh aspek-aspek keputusan lokasional. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama, pertumbuhan dan perkembangan wilayah

³⁸ Iwan Nugroho dan Rokhmin Danuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2004.

³⁹ *Ibid*

merupakan suatu proses *kontiniu* hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.

Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian wilayah yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup dan berinteraksi. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendapatkan informasi tentang substansi yang sesuai dengan topik penelitian, maka peneliti melaksanakan pelacakan penelitian terutama difokuskan pada penelitian terdahulu yang sejenis. Karena dengan melaksanakan pelacakan terhadap penelitian terdahulu terutama yang sejenis, memungkinkan peneliti untuk memposisikan diri pada kedudukan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Hasil pelacakan terhadap penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi maupun data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan referensi adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah pulau terluar. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yaitu: penelitian Richarunia Wenny Ikhtiari, penelitian Sasmini, penelitian Desriani dan Faisyal Rani dan penelitian Mohammad Ali Nugroho.

2.1.3.1 Penelitian Richarunia Wenny Ikhtiari, berjudul “Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Traditional Security*, Studi Kasus : *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010”.⁴⁰ Penelitian ini membahas tentang kebijakan laut Indonesia apakah sudah terwujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 81.000 km². Dengan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak digunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu *Non-Traditional Security* lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu *maritime security*, dikarenakan *law enforcement* yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi *overlapping* dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam menghadapi isu kelautan. Dengan demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan dilaut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Strategi dalam Pengamanan Pulau-pulau Terluar Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : Studi di Pulau Nipa.

Terdapat perbedaan signifikan pada kedua penelitian ini, yaitu pada penelitian Richarunia Wenny Ikhtiari mengambil topik tentang Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Traditional Security*, Studi Kasus : *Illegal Fishing*. Sedangkan pada

⁴⁰Richarunia, Wenny Ikhtiari. *Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security*, Studi Kasus : *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011.

penelitian ini membahas topik tentang Strategi dalam Pengamanan Pulau-pulau Terluar Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: Studi kasus di Pulau Nipa. Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, namun penelitian Richarunia Wenny Ikhtiari relevan untuk dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang strategi kemaritiman.

2.1.3.2 Penelitian Sasmini, tentang “Strategi Pengelolaan Dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar Oleh Pemerintah Indonesia (Analisis Berdasarkan UNCLOS 1982)”.⁴¹ Penelitian Sasmini membahas tentang Strategi Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar Oleh Pemerintah Indonesia dengan analisis berdasarkan UNCLOS 1982. Pada kesimpulan penelitian Sasmini, disebutkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan pengaturan yang hampir menyeluruh dalam implementasi UNCLOS 1982 terkait hukum laut, namun yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar, hukum Indonesia memberikan pengaturan tersendiri yaitu dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Strategi dalam Pengamanan Pulau-pulau Terluar Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: Studi di Pulau Nipa.

Perbedaan signifikan dari kedua penelitian ini yaitu: Penelitian Sasmini membahas tentang Strategi Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar Oleh Pemerintah Indonesia dengan analisis berdasarkan UNCLOS 1982, sedangkan pada penelitian ini fokus pada strategi dalam pengamanan pulau-pulau terluar. Artinya peneliti memfokuskan pada masalah pengamanan pulau-pulau terluar untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pada penelitian Sasmini dengan

⁴¹Sasmini, *Strategi Pengelolaan Dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar Oleh Pemerintah Indonesia* (Analisis Berdasarkan UNCLOS 1982), Yustisia edisi nomor 71 Mei-Agustus 2007.

penelitian ini, namun penelitian Sasmini tersebut relevan untuk dijadikan referensi dalam penulisan tesis ini.

2.1.3.3 Penelitian Desriani dan Faisyal Rani, tentang “Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia Terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur di Provinsi Riau)”.⁴² Pada kesimpulan penelitian Desriani dan Faisyal Rani, bahwa Penerapan strategi *safety belt* merupakan pengamanan kawasan perbatasan dengan berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penerapan konsep *safety belt* di Pulau Jemur dilakukan dengan menempatkan TNI AL dan Dinas Perhubungan Republik Indonesia dalam melaksanakan patroli terhadap pengamanan Pulau Jemur. Pengklaiman Malaysia atas Pulau Jemur ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengelola potensi Pulau, sehingga celah ini di manfaatkan Malaysia untuk mempromosikan Pulau Jemur ke dalam situs *Travel Journals* yang dinyatakan sebagai tujuan wisata *destinasi* wilayah Selangor, Malaysia. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Strategi dalam Pengamanan Pulau-pulau Terluar Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: dengan Studi di Pulau Nipa.

Perbedaan signifikan dari kedua penelitian ini yaitu: Penelitian Desriani dan Faisyal Rani membahas tentang Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia Terhadap Malaysia di fokuskan hanya satu pulau yaitu Pulau Jemur, sedangkan pada penelitian ini fokus pada strategi dalam pengamanan di Pulau Nipa. Artinya peneliti memfokuskan pada masalah pengamanan pulau terluar dengan studi kasus di Pulau Nipa.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pada penelitian Desriani dan Faisyal Rani dengan penelitian ini, namun penelitian Desriani

⁴²Desriani dan Faisyal Rani, *Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia Terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur di Provinsi Riau)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, 2013.

dan Faisyal Rani tersebut relevan untuk dijadikan referensi dalam penulisan tesis ini.

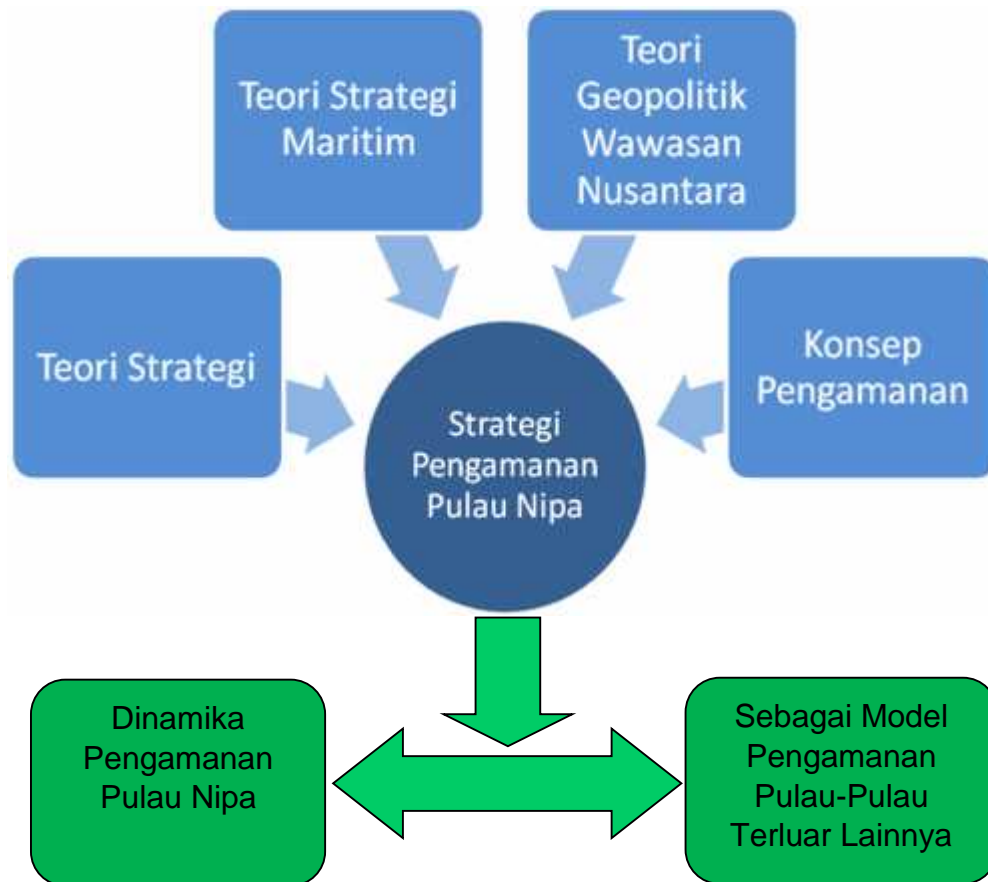
2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai pulau kecil terluar, Pulau Nipa memiliki arti yang sangat penting. Pulau Nipa menjadi salah satu batas titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menentukan besaran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, lokasinya yang berbatasan dengan negara Singapura, membuat Pulau Nipa rawan untuk pengklaiman wilayah antar negara. Oleh karena itu, peningkatan pengamanan adalah hal yang mutlak dilakukan di Pulau Nipa.

Menjadi batas terluar Indonesia, Pulau Nipa juga memiliki potensi ekonomi jika diberdayakan secara tepat. Potensi – potensi tersebut bisa dimaksimalkan dengan menitik beratkan pada kegiatan eksplorasi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia. Meskipun demikian, pembangunan dari sisi ekonomi itu, harus tetap dengan memperhatikan unsur lain, termasuk keamanan sehingga terjadi sinergitas.

Setelah pola pengamanan yang menunjang perekonomian diterapkan secara maksimal di Pulau Nipa, maka target selanjutnya adalah menjadikan Pulau Nipa sebagai model pengembangan atau proyek percontohan untuk pengembangan pulau-pulau terluar lainnya. Namun model pengembangan itu tetap diterapkan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi pulau – pulau terluar lainnya. Gambaran kerangka pemikiran penelitian direalisasikan seperti pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.



Sumber : Analisis Peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan, Jenis dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong berpendapat bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴³

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma *konstruktivis*. George Ritzer, dalam Salim⁴⁴ mendefinisikan paradigma sebagai substansi dalam ilmu pengetahuan, merupakan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian. Apa yang harus ditanyakan, dan bagaimana jawabnya. Ada empat paradigma ilmu pengetahuan untuk menemukan hakikat realitas, yakni: (1) *Positivist*, (2) *Post Positivist*, (3) *Critical Theory*, dan (4) *Constructivism*. Denzin dan Lincoln sebagaimana dikutip Salim⁴⁵, menyebut beberapa karakteristik paradigma *konstruktivis* yaitu, pertama, secara ontologis paradigma *konstruktivis* memandang realitas yang diamati merupakan suatu konstruksi sosial, di mana kebenaran suatu realitas bersifat semu yakni berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas itu sendiri ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal, dan spesifik tergantung pada orang yang melakukannya. Oleh karena itu suatu realitas yang diamati seseorang tidak bisa digeneralisir kepada semua orang, sebagaimana terjadi pada paradigma *positivis*, maupun *post positivis*. Intinya, paradigma ini bersifat *relative*, dan realitas ada dalam

⁴³Moleong, J., Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2013. Hal. 6.

⁴⁴ Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

⁴⁵*Ibid*, hal: 48.

bentuk konstruksi mental yang berkali yang pada dasarnya bersifat sosial dan hasil eksperimen, serta bersifat lokal-spesifik. Bentuk dan isi tergantung pada subyek yang menganut nilai-nilai tersebut.

Kedua, secara epistemologis, peneliti dalam paradigma *konstruktivis* memandang pemahaman terhadap suatu realitas, atau temuan penelitian, merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti, artinya, ada subyektivitas yakni temuan merupakan kreasi dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Peneliti yang diteliti bersifat *monistik* yaitu bersatu atau melebur dalam satu *entitas*.

Ketiga, pada paradigma *konstruktivis*, nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Keempat, secara metodologis penelitian dengan paradigma *konstruktivis* mengutamakan empati dan interaksi dialektika antara peneliti dan responden untuk menkonstruksi realitas yang diteliti melalui metode metode kualitatif. Kriteria kualitas penelitiannya dapat dilihat dari sejauh mana temuan penelitian merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, artinya, konstruksi individual, digambarkan dalam sebuah pengungkapan tertentu dilakukan secara hermeneutika, dan dibandingkan secara dialektikal. Ini bertujuan membuat sebuah garis besar suatu konstruksi di mana terdapat konsensus yang substansial.

3.2 Informan Penelitian

Subyek dari penelitian tesis ini adalah tentang penerapan strategi dalam pengamanan pulau terluar untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan studi di Pulau Nipa. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti mengambil subyek penelitian pada personel pengambil kebijakan, yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan atau tataran yaitu tataran strategis, operasional dan teknis.

Pertama, Pada Tataran Strategis. Penelitian pada personel pengambil kebijakan pada tataran strategis diarahkan kepada Kementerian Pertahanan dan kementerian kelautan dan Perikanan.

Kedua, Pada Tataran Operasional. Penelitian pada personel pengambil kebijakan pada tataran operasional diarahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Batam dan TNI Angkatan Laut.

Ketiga, Pada Tataran Teknis. Penelitian pada personel pengambil kebijakan pada tataran teknis diarahkan kepada Danlanal Batam, Danposal Pulau Nipa dan Nelayan di sekitar Pulau Nipa.

3.3 Situs dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi pemerintah, baik pemerintah pusat yaitu di Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun pemerintah daerah Kepulauan Riau yang berkaitan dengan 12 pulau terluar dan peneliti melakukan pengamatan langsung di Pulau Nipa. Penentuan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa data primer akan didapatkan dengan pengamatan langsung dan dengan wawancara mendalam secara langsung atau tatap muka kepada pejabat eselon dua di lembaga-lembaga yang terkait dengan pulau terluar.

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data sekunder dilaksanakan di perpustakaan Universitas Pertahanan, Perpustakaan Kemenhan, Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Freedom Institute, Sops Mabes TNI, Sops Mabesal dan Sops Kormar.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian dikonsentrasikan pada tujuan penelitian yang berdasarkan penelitian kualitatif yang pencarian dan pengumpulan referensi ditekankan kepada pengambilan data, pengumpulan literatur, dan kepustakaan. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data primer. Menurut Sugiyono sumber primer adalah sumber daya yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁶ Data yang diberikan didapat melalui wawancara *face to face*, telepon, email, maupun menggunakan fasilitas komunikasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti bertujuan, untuk mendapatkan pengumpulan data yang selengkap mungkin, mengenai strategi pengamanan pulau-pulau terluar dengan cara studi literatur, dan interview dengan Pejabat Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ke Pemerintah-pemerintah Daerah dan Pejabat TNI Angkatan Laut;

Kedua, pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain maupun dokumen.⁴⁷ Peneliti melakukan pengumpulan data sekunder guna mendapatkan data tentang bagaimana pengamanan pulau-pulau terluar sekarang ini dengan cara studi literatur/pustaka (*library research*).

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis jawaban yang

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: PT. Alfabeta. 2012.

⁴⁷*Ibid.*Hal 308.

diwawancarai, bila belum terasa memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu.⁴⁸

Proses analisis data pada penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data yaitu dari tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 20 Februari 2015. Penentuan waktu tersebut karena data hasil analisis harus dilaporkan dengan format penulisan tesis yang masih memerlukan waktu. Tahapan proses analisis data dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, melaksanakan pengumpulan data dan perekaman data mentah tentang strategi dalam pengamanan pulau-pulau terluar (hasil wawancara, studi lapangan dan studi literatur).

Kedua, melaksanakan transkrip data tentang strategi dalam pengamanan pulau-pulau terluar berupa catatan tulisan tangan dan diubah menjadi catatan mesin ketik/computer.

Ketiga, pembuatan koding (data hasil transkrip dibaca ulang dan yang dianggap penting diberi kode)

Keempat, melaksanakan kategorisasi data yaitu memilah-milah data dari tataran strategis, operasional dan teknis.

Kelima, melaksanakan triangulasi yaitu proses *check and recheck* antar sumber data, selanjutnya dikumpulkan, disusun dan dideskripsikan, selanjutnya dianalisis.

Keenam, melaksanakan penyimpulan yaitu dari tahap pertama sampai dengan tahap kelima dengan diulang, jika dianggap belum memadai. Kesimpulan akhir ditentukan jika data sudah tidak dapat diproses lagi.

⁴⁸*Ibid.* Hal 334.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Sebaran Data Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pulau – Pulau Kecil Terluar

Menurut Perpres Nomor 78 Tahun 2005 Pasal 1 butir b, Pulau-pulau kecil terluar adalah pulau yang mempunyai luas areal kurang lebih 2000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Menurut Griffith dan Inniss (1992) serta Beller (1990), pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang sangat menonjol, yaitu:

- a) Terpisah dari habitat pulau induk.
- b) Memiliki persediaan air tawar yang terbatas, termasuk air tanah atau air permukaan.
- c) Rentan terhadap gangguan eksternal, baik alami maupun akibat kegiatan manusia.
- d) Memiliki spesies endemik yang memiliki fungsi ekologi yang tinggi.
- e) Tidak mempunyai daerah *hinterland*.⁴⁹

Berdasarkan sudut pandang luas, Brookfield (1990) mengemukakan bahwa pulau – pulau kecil memiliki luas tidak lebih dari 1000 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih kecil dari 100.000 jiwa. Pandangan ini berbeda dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 tahun 2000, yang mendefinisikan pulau – pulau kecil sebagai pulau yang ukuran luasnya kurang dari 10.000 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 500.000 jiwa. Pulau – pulau kecil di Indonesia terdiri dari pulau – pulau yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai strategis penting, yaitu pulau – pulau kecil terluar yang secara geografis berbatasan dengan laut lepas dan perbatasan yang

⁴⁹Hinterland adalah daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor.

menjadi titik dasar (TD) sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah NKRI.

Menurut Kementerian Pertahanan, Dinas Hidrografis dan Oseanografi (Dishidros) TNI AL dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau – pulau Kecil Terluar, dari 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia, terdapat 92 pulau kecil yang berada di posisi terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya⁵⁰:

- 1) Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo yang berbatasan dengan India.
- 2) Pulau Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil yang berbatasan dengan Malaysia.
- 3) Pulau Nipa, Pelampong, Batu Berhenti, dan Nongsa yang berbatasan dengan Singapura.
- 4) Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua yang berbatasan dengan Vietnam.
- 5) Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa I Kang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew yang berbatasan dengan Filipina.
- 6) Pulau Dana, Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang yang berbatasan dengan Australia.
- 7) Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek yang berbatasan dengan Timor Leste.

⁵⁰Tim Redaksi, *Pulau-pulau terluar Indonesia*. Buletin Dishidros TNI AL edisi 1/ III tahun 2004

Dari 92 pulau terluar di atas, terdapat 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas, diantaranya⁵¹:

- 1) Pulau Rondo, terletak di Samudera Hindia dan merupakan pulau paling ujung barat di wilayah NKRI dan masuk di wilayah Aceh. Pulau terpencil seluas lebih kurang 4 Km² berbatasan langsung dengan Thailand dan India. Pulau Rondo tidak berpenduduk dan hanya memiliki sarana suar untuk bantuan navigasi. Kondisi ini membuat pulau ini sering digunakan untuk penyelundupkan senjata dan kegiatan ilegal lainnya. Batas ZEE di pulau Rondo juga belum ditetapkan, titik kordinat landas kontinen disahkan sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982.
- 2) Pulau Berhala, terletak di Selat Malaka bagian Utara, termasuk wilayah Propinsi Sumatera Utara. Pulau Berhala memiliki luas sekitar 2,5 KM² dan letaknya terpecil, berbatasan langsung dengan Malaysia. Meski tidak berpenduduk, namun di pulau ini terdapat sarana bantu navigasi, sumber air tawar dan pos Kamla TNI AL dari Lantamal I. Kawasan perairan pulau ini juga merupakan daerah pembuangan amunisi. Pulau Berhala menjadi sangat penting karena merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional. Karena lokasinya, penentuan batas wilayah antar RI dan Malaysia di pulau ini tumpang tindir dan berpotensi terjadinya konflik. Lokasi yang terpencil juga membuat wilayah ini sering digunakan sebagai tempat transaksi penyelundupan senjata dan kegiatan ilegal lainnya.
- 3) Pulau Nipa, terletak di Selat Singapura dan masuk dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas 3.6 KM² memiliki letak yang terpencil dan berbatasan langsung dengan Singapura. Berbeda dengan wilayah terpencil lainnya, sejumlah pembangunan sudah dilakukan di Pulau Nipa. Diantaranya sudah mulai dilakukan reklamasi, dibangun sarana dan prasarana fisik termasuk pos TNI AL

⁵¹TNI AL, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, 2011.

dan menara pengawas serta sarana navigasi. Saat ini, pemerintah juga sedang membangun Nipa *Transit Areas Anchorage* (NTAA). Meski demikian, penentuan titik koordinat batas perairan RI – Singapura dilakukan sebelum Konvensi Hukum Laut, 1982, sehingga berpeluang terjadinya konflik. Selain itu, kegiatan penambangan pasir laut di sekitar pulau Nipa yang dilakukan secara berlebihan, juga dapat membuat pulau ini tenggelam, yang berarti akan menghilangkan titik terluar batas wilayah Indonesia dan mengubah batas kedua negara.

- 4) Pulau Sekatung, terletak di sebelah utara kepulauan Natuna, termasuk wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Pulau terpencil ini berbatasan langsung dengan Vietnam dan memiliki luas sekitar 0,3 KM². Pulau ini tidak berpenduduk dan hanya terdapat pos pengamat TNI AL serta terdapat sarana bantu navigasi. Belum ada kesepakatan batas ZEE di pulau Sekatung, dan pulau ini sering disinggahi nelayan asing serta rawan terjadinya perompakan, penyelundupan dan pencurian hasil kekayaan alam.
- 5) Pulau Marore, merupakan pulau terpencil seluar 3,12 KM² yang terletak di Laut Sulawesi dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara Filipina dan dihuni 640 jiwa penduduk. Secara umum sudah ada beberapa fasilitas di pulau ini diantaranya sarana bantu navigasi suar, pos Border Cross Agreement (BCA), Pos TNI AL, Perhubungan Laut dan Bea Cukai. Namun, masalah penentuan batas laut antar kedua negara belum selesai di Pulau Marore dan di Pulau Marore memiliki kerawanan terhadap pengaruh Ipoleksosbud Filipina. Selain itu, Pulau ini juga kerap digunakan sebagai transit penyelundupan senjata, terorisme, imigran gelap dan kegiatan ilegal lainnya.
- 6) Pulau Miangas, terletak di laut Sulawesi dan masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Pulau ini berbatasan langsung dengan Filipina dan memiliki luas sekitar 39,95 KM². Sejumlah fasilitas sudah

tersedia di pulau ini diantaranya menara suar, pos *Border Croos Agreement* (BCA), Satgas TNI AL, TNI AD, Polisi dan Bea Cukai. Meski demikian penentuan batas laut antara Indonesia dan Filipina belum selesai dan di Pulau Miangas memiliki kerawanan terhadap pengaruh Ipoleksosbud Filipina. Pulau Miangas juga sering digunakan sebagai lokasi transit penyelundupan senjata, terorisme, imigran gelap, dan kegiatan ilegal lainnya.

- 7) Pulau Fani, merupakan sebuah pulau seluas 9 KM² yang terletak di Samudera Pasifik, dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat. Seluruh penduduk pulau ini berprofesi sebagai nelayan. Di pulau ini juga terdapat sarana navigasi suar. Belum ada pembahasan batas laut di Pulau Fani karena Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Palau. Selain itu pulau Fani juga rawan terjadi abrasi dan kegiatan *illegal fishing*, karena pulau ini merupakan tempat persinggahan nelayan asing asal Filipina dan Palau untuk mengambil air bersih.
- 8) Pulau Fanildo, merupakan pulau yang terletak di Samudera Pasifik. Pulau Fanildo masuk wilayah Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua Barat dan berbatasan langsung dengan Palau. Pulau Fanildo merupakan pulau kecil yang hanya memiliki luas sekitar 0,1 KM² di Kepulauan Mapia serta tidak berpenduduk. Karena belum ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palau, sehingga belum ada pembahasan batas laut di antara kedua negara. Selain itu, pulau ini pun kerap menjadi tempat persinggahan nelayan Palau. Pulau ini rawan abrasi, saat air pasang, Pulau Fanildo akan tenggelam.
- 9) Pulau Bras, terletak di Samudera Pasifik dan masuk di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua Barat. Pulau Bras memiliki luas sekitar 3,375 KM² dan dihuni sekitar 50 jiwa. Pulau Bras merupakan tempat persinggahan nelayan asal Palau untuk mengambil air bersih. Belum ada pembahasan batas laut di wilayah ini dan wilayah perairan di sekitarnya, selain itu di wilayah ini rawan terjadi *illegal fishing*.

- 10) Pulau Batek, merupakan pulau tidak berpenduduk seluas 0,1 KM² yang terletak di Selat Ombai. Pulau ini masuk wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sampai saat ini belum ada pembahasan tentang batas laut antar Indonesia dan Timor Leste. Selain itu di wilayah ini rawan terjadi *illegal fishing* dan penyelundupan.
- 11) Pulau Marampit, terletak di laut Sulawesi bagian Timur, termasuk wilayah Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Pulau ini memiliki luas sekitar 12 KM² dan dihuni 1.436 jiwa. Masalah penentuan batas laut antara Indonesia dan Filipina, yang berbatasan dengan pulau ini belum selesai. Selain itu, di wilayah ini memiliki kerawanan terhadap pengaruh Ipoleksosbud Filipina. Pulau Marampit juga sering digunakan untuk transit penyelundupan senjata, terorisme, imigran gelap, dan kegiatan ilegal lainnya.
- 12) Pulau Dana/Kep Rote, terletak di Samudera Hindia dan masuk dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Dana Rote memiliki luas 0,2 KM² dan berbatasan langsung dengan perairan Australia. Pulau ini tidak berpenghuni. Sampai saat ini belum pernah ada pembahasan penentuan batas laut di wilayah ini, selain itu pulau Dana Rote merupakan wilayah yang rawan penyelundupan, manusia perahu dan aktivitas turis ilegal.

Dari 12 pulau kecil terluar yang ada, hingga saat ini baru Pulau Nipa yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2004, pemerintah telah memiliki rancangan atau *blueprint* untuk pembangunan dan pengembangan terhadap Pulau Nipa. Lokasi Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan tidak berpenduduk membuat masalah pertahanan dan keamanan menjadi perhatian serius pemerintah. Adanya ancaman tenggelamnya Pulau Nipa hingga kerawanan terjadinya penyelundupan barang – barang ilegal, senjata dan obat – obatan terlarang di Pulau Nipa mendorong pemerintah membangun Pos TNI AL untuk memantau segala aktivitas di pulau terluar itu, sekaligus untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selain memperhatikan masalah keamanan, pemerintah juga berencana untuk mengembangkan potensi ekonomi Pulau Nipa dengan memanfaatkan ramainya jalur laut di sekitar Pulau Nipa. Wilayah perairan Pulau Nipa juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan dan berlindung di saat cuaca buruk.⁵²

4.1.2 Gambaran Umum Pulau Nipa

Pulau Nipah atau Pulau Nipa⁵³ atau biasa disebut Pulau Angup oleh penduduk sekitar terletak di antara Selat Philip dan Selat Utama (*main strait*), yang berbatasan langsung dengan Singapura. Berdasarkan referensi peta laut yang digunakan nomor 374, posisi geografis Pulau Nipa berada pada posisi kordinat 01°08'27" - 01°09'12" LU dan 103°39'04" BT – 103°39'40" BT. Secara administratif, Pulau Nipa terletak di desa Pemping, kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Di sebelah utara, Pulau Nipa berbatasan dengan Selat Singapura dan Singapura. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Philip dan Kecamatan Moro. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Lokasi Pulau Nipa yang berada di Selat Philip sangat strategis karena merupakan pertemuan Selat Malaka dan Selat Singapura yang menjadi alur pelayaran internasional. Aksesibilitas ke Pulau Nipa juga sangat mudah. Pulau Nipa dapat dicapai dengan menempuh 1 jam perjalanan dengan menggunakan speedboat dari pelabuhan Batu Ampar, Batam. Namun untuk mencapai Pulau Nipa, harus seizin komandan pangkalan TNI AL di Batam. Di pulau Nipa terdapat dua titik dasar perhitungan batas laut dengan Malaysia dan Singapura yaitu TD 190 dan TD 190A.⁵⁴ Garis batas laut yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah kelanjutan dari perjanjian Indonesia – Singapura sebelumnya pada 25 mei 1973, penetapan dilakukan berdasarkan Konvensi Hukum laut 1982.

⁵²Hasil wawancara dengan Letda Laut (T) Asep Suryanda, Danposal Pulau Nipa dan Bapak Udin, nelayan disekitar perairan Pulau Nipa.

⁵³Peta Dishidros TNI AL

⁵⁴Prasetyono, Teo Tri, Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terluar Indonesia, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009, hal: 187-188.

Pulau Nipa dikelilingi oleh beberapa pulau lainnya. Di sebelah tenggara, terdapat Pulau Pelampong yang berjarak $\pm 2,5$ Nm, Pulau Takong Besar yang berjarak $\pm 3,5$ Mil dan Pulau Takong Kecil yang berjarak ± 4 Mil dari Pulau Nipa. Di sebelah Timur Pulau Nipa terdapat Pulau Pawai Singapura yang berjarak ± 4 Mil. Sementara di sebelah timur laut Pulau Nipa terdapat Pulau Sudong serta Pulau Senang Singapura yang berjarak $\pm 4,5$ Mil. Peta lokasi Pulau Nipa dapat dilihat dalam gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1. Peta Lokasi Pulau Nipa



Sumber : Pemda Kotamadya Batam, Oktober 2014

Dilihat dari jenis batuanannya, Pulau Nipa merupakan kelanjutan dari gugusan Bareleng, khususnya Pulau Bulan, Pulau Kepala Jerih, Pulau Pemping karena terdapat kelurusan struktur geologi yang mengarah ke barat laut sesuai arah sumbu Pulau Nipa. Batuan penyusun daratan Pulau Nipa adalah batuan metasedimen yang bersifat keras, pejal dan kompak. Jenis batuan yang muncul saat Pulau Nipa surut ada beberapa jenis, antara lain: batuan sedimen yang tersingkap di beberapa tempat di sumbu sepanjang daratan Pulau Nipa yang diyakini sebagai batuan dasar.

Singkapan batuan sedimen ini relatif telah berubah menjadi metasedimen dan mengalami pelapukan berat sehingga berwarna kecoklatan. Batuan lainnya adalah terumbu karang yang berada di atas batuan sedimen. Terumbu karang ini merupakan terumbu masa lampau, sudah mati, bersifat masif dan bermorfologi datar.⁵⁵

Berdasarkan pengamatan megaskopis, jenis sedimen permukaan dasar laut perairan sekitar Pulau Nipa dibedakan menjadi kerikil pasir, pasir laut yang berada di sekitar tepian pantai utara dan selatan Pulau Nipa dan boulder karang yang menempati di sekitar tepian pantai dan bagian dasar laut. Pulau Nipa beriklim tropis dengan variasi curah hujan tinggi pada musim penghujan antara bulan Desember hingga bulan Januari.

Pulau Nipa merupakan pulau terluar Indonesia yang dulunya merupakan pulau yang dieksploitasi pasirnya untuk kebutuhan reklamasi Singapura. Saat ini kondisi Pulau Nipa sudah mengalami proses reklamasi. Akibat pengerukan pasir yang berlebihan tersebut, Pantai Pulau Nipa di pasang *tetrapod*⁵⁶ pemecah gelombang, tanggul tanah timbunan dan pohon – pohon pelindung.

Luas wilayah Pulau Nipa adalah 0,62 hektar pada waktu pasang, dan ± 60 Hektar pada saat surut dengan garis panjang pantai 3,96 km. Sekitar awal tahun 2000-an, Pulau Nipa hampir tenggelam, karena adanya abrasi yang cukup parah sehingga mengikis banyak pasir dimana terdapat Titik Dasar. Akhirnya, pada tanggal 20 Februari 2004, dilakukan penandatanganan prasasti oleh Presiden ke-5 RI – Megawati Soekarno Putri sebagai awal pembangunan konservasi Pulau Karang Nipa 150. Reklamasi kemudian dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2008. Namun kondisi yang ada saat ini ditambah kegersangan dan ketiadaan sumber air bersih, menyebabkan pulau ini tidak dihuni oleh penduduk tetap. Saat ini

⁵⁵Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, 92 *Pulau Terluar Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta, 2009.

⁵⁶Fungsi dari tetrapod adalah sebagai unit pemecah gelombang (breakwater). Bentuk tetrapod ini dirancang untuk mengusir kekuatan dari ombak yang datang dengan membiarkan air mengalir ke sekitarnya bukan melawan ombak tersebut, dan untuk mengurangi perpindahan (jarak) tetrapod setelah tersapu ombak maka penyusunan tetrapod biasanya disusun secara acak.

Pulau Nipa hanya dijaga oleh 14 orang personel Pos TNI AL (POSAL) Pulau Nipa.⁵⁷

Karena tidak ada sumber air tawar di Pulau Nipa, maka anggota TNI AL yang sedang bertugas di Pulau Nipa membawa air minum dari Batam atau Belakang Padang. Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci memanfaatkan air hujan yang ditampung dalam penampungan air. Namun pada saat musim kemarau yang berkepanjangan, mereka menggunakan Reverse Osmosis (RO) yang merubah air laut menjadi air tawar.⁵⁸

Berdasarkan peta bathimetri dari Dishidros dan hasil survey Puslitbang Geologi Kelautan, kedalaman laut di perairan Pulau Nipa bervariasi antara 0 s/d 50 meter. Kedalaman laut di sebelah barat Pulau Nipa paling dalam adalah 30 meter saat pasang, sedangkan kedalaman laut sebelah timur Pulau Nipa paling dalam adalah 50 meter. Pola kontur di bagian timur rapat dan berarah barat laut-tenggara (sejajar dengan sumbu panjang Pulau Nipa) yang mencerminkan morfologi dasar laut di bagian timur terjal. Sedangkan pola kontur di bagian barat renggang dan beberapa kontur melingkar mencerminkan morfologi landai.

Perairan Pulau Nipa dan sekitarnya mempunyai tipe pasang surut ganda, yaitu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam waktu 24 jam dengan tinggi dalam air maksimum sebesar 2,56 meter. *Mean Sea Level* (MSL)⁵⁹ dari hitungan sementara pada kedudukan 2,525 meter. Untuk arus laut dan gelombang laut dari hasil pengukuran arus statis menggunakan *current* meter pada umumnya arah arus adalah ke utara dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Saat surut:

- 1 meter maka kecepatan arusnya 0,748 m/det ke arah utara

⁵⁷Hasil wawancara dengan Letda Laut (T) Asep Suryanda (Dan Posal Pulau Nipa)

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Mean Sea Level (MSL) is measure of the average height of the ocean's surface (such as the halfway point between the mean high tide and the mean low tide); used as a standard in reckoning land elevation. Yang secara garis besarnya berarti ukuran ketinggian rata-rata permukaan laut (seperti rata-rata titik tengah antara pasang tertinggi dan surut terendah), di gunakan sebagai standar perhitungan dalam elevasi permukaan tanah (daratan).

- 5 meter maka kecepatan arusnya 0,582 m/det ke arah utara
- 10 meter maka kecepatan arusnya 0,507 m/det ke arah utara

2) Saat pasang:

- 5 meter maka kecepatan arusnya 0,279 m/det ke arah Utara
- 10 meter maka kecepatan arusnya 0,181 m/det ke arah utara

Sedangkan hasil pengamatan pada arus dinamis menggunakan trayektori menunjukkan pola yang tidak beraturan. Arus di Pulau Nipa ini mengalami turbelensi yang terjadi karena adanya arus kuat dari Barat – Utara dan Timur – Selatan yang membentur di Pulau Nipa. Gelombang laut di sekitar pulau bervariasi dengan ketinggian gelombang kurang lebih 0,5 meter, namun gelombang yang ditimbulkan oleh lalu lintas kapal – kapal besar cukup kuat mencapai 0,6 meter dengan periode 7 - 10 kali selama 15 - 20 detik.

Pulau Nipa berada di tengah alur pelayaran lalu lintas internasional, dengan frekuensi pelayaran yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Departemen Perhubungan, rata – rata lalu lintas kapal adalah sekitar 200 kapal/hari (70.000 kapal/tahun) dengan perkembangan lalu lintas kapal sebesar 7,8% per tahun yang terdiri dari kapal tanker, kargo dan kapal tongkang. Namun Alur pelayaran antara Pulau Nipa dan Singapura sangat sempit. Oleh karena itu, lalu lintas kapal dipisahkan menjadi 2 jalur, yaitu jalur kapal yang menuju Selat Malaka (dari Timur) berada di perairan bebas di sebelah utara Pulau Nipa, dan jalur kapal yang menuju ke Singapura (dari Barat) dibelokkan ke sebelah selatan Pulau Nipa melalui wilayah perairan dalam Indonesia. Untuk navigasi, terdapat titik dasar (*Bench Mark*) TD 190/BM-1 pada posisi 01°09'827" LU - 103°39'195" BT berada di dekat mercusuar dan TD 190A/BM-2 pada posisi 01°08'37" LU - 103°39'34" BT. Selain itu terdapat juga mercusuar di sebelah utara Pulau Nipa pada posisi 01°09'10" LU - 103°39'22" BT dengan Karakter C3s 14 m 13 M.

Jenis tumbuhan (flora) yang terdapat di Pulau Nipa pada umumnya adalah jenis tanaman mangrove (bakau), cemara laut, ketapang, jarak

kota, saga dan kelapa.⁶⁰ Pada saat Mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melakukan peresmian monumen pos pengamat TNI AL pada tanggal 20 Desember 2003, dilakukan penanaman 100 batang pohon kecil bakau, serta 1000 pohon waru dan cemara udang. Namun yang tumbuh hingga saat ini hanya \pm 200 pohon saja. Selanjutnya tetap dilakukan penanaman pohon secara berkala. Pada tanggal 21 Oktober 2009 telah ditanam 3000 pohon ketapang dan mahoni oleh Lanal Batam bekerja sama dengan anggota Satgas Marinir Pulau Nipa dan masih hidup sampai sekarang. Pada tanggal 24 Desember 2009 sampai tanggal 10 Januari 2010 telah ditanam 6000 pohon trembesi oleh anggota Satgas Marinir Pam pulau terluar VIII dan anggota Posal Pulau Nipa. Hingga saat ini sekitar 20.000 batang pohon sudah ditanam di Pulau Nipa.

Jenis fauna yang ada di Pulau Nipa hanya ikan yang hidup di sekitar karang dan siput laut yang menempel pada batu karang dan beberapa burung bangau, camar, elang laut dan burung gereja.

Selain prasasti yang ditandatangani oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, juga terdapat prasasti yang ditandatangani oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Purnomo Yusgiantoro. Dalam prasasti ini dituliskan suatu semangat yang dapat mengobarkan semangat tugas bagi pasukan pengamanan Pulau Nipa.

Terdapat sejumlah fasilitas yang tersedia bagi pasukan pengamanan Pulau Nipa, yaitu dermaga beton dengan panjang 110,2 m dan lebar 8 m. Terdapat juga pembangkit listrik tenaga surya, pos TNI AL dan fasilitas penyulingan air laut untuk keperluan para penjaga pulau dan pengunjung yang datang. Selain itu juga terdapat mercusuar dan mess atau barak – barak yang digunakan sebagai tempat tinggal Satgas pengamanan pulau dan petugas navigasi.

⁶⁰Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, 92 *Pulau Terluar Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: BPN, 2009.

4.1.3 Data Pertanahan Pulau Nipa

Secara umum tanah di Pulau Nipa dijaga oleh TNI AL, dimana di Pulau ini terdapat pangkalan Angkatan Laut Indonesia, menara mercusuar dan Titik Dasar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada beberapa bagian yang merupakan tanah negara bebas. Pada saat survei dilaksanakan sekitar tahun 2008, sebagian besar status kepemilikan tanah di Pulau Nipa belum terdaftar, dan terdiri dari mangrove dan tanah reklamasi. Sedangkan untuk bangunan – bangunan seperti Dermaga, Mess, Pergudangan, Mercusuar sudah bersertifikat Hak Pakai. Selanjutnya pada akhir 2011, telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai atas nama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan⁶¹, seperti yang terlihat dalam gambar 4.2:

Gambar 4.2 Grafik Pemilikan Tanah di Pulau Nipa



Sumber: Direktorat Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Februari 2015

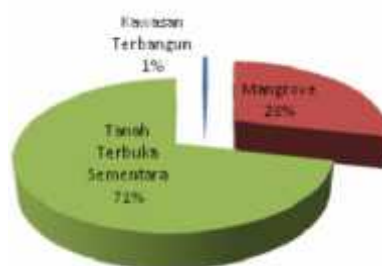
Status lahan pasca-reklamasi di Pulau Nipa adalah Barang Milik Negara (BMN) yang hak pengelolaannya (Hak Pakai) diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertahanan.⁶² Penggunaan tanah di Pulau Nipa sebagian besar berupa tanah terbuka

⁶¹ Hasil wawancara dengan Tedjo Suryono, S.SiT., MM. (Kasi Monitoring Evaluasi Pulau – Pulau Kecil dan Perbatasan. Direktorat Wilayah Pesisir Pulau – Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah tertentu.

⁶² <http://jurnalmaritim.com/2014/8/1604/abrasi-pulau-nipah-susutkan-luas-maritim-nkri>

sementara sebagian hasil dari reklamasi sebesar 71%. Selanjutnya penggunaan tanah sebagai mangrove sekitar 28% dan kawasan terbangun seperti Pangkalan TNI AL dan mencusuar sekitar 1%. Bangunan – bangunan tersebut dibangun di atas lahan hasil reklamasi. Dengan masih banyaknya tanah terbuka sementara tersebut, terbuka luas juga potensi untuk pengembangan dan pengelolaan Pulau Nipa. Pemanfaatan tanah yang merupakan nilai tambah dari penggunaan tanah belum nampak jelas, hanya terdapat rumah yang dimanfaatkan sebagai warung untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari anggota TNI AL. Grafik penggunaan tanah di Pulau Nipa dapat dilihat dalam Gambar 4.3:

Gambar 4.3 Grafik Pemilikan Tanah di Pulau Nipa



Sumber : Direktorat Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Februari 2015

Saat ini di Pulau Nipa tidak terdapat aktivitas perekonomian signifikan karena tidak ada penduduk lokal yang menetap. Penghuni pulau ini adalah penduduk sementara yang merupakan anggota TNI AL. Untuk menghidupkan perekonomian, maka di pulau ini dibangun pelabuhan untuk menunjang transportasi dan perekonomian pulau dan sekitarnya. Banyak nelayan lokal yang biasanya singgah di Pulau Nipa untuk mencari ikan atau berteduh saat cuaca buruk.⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Letda Laut (T) Asep Suryanda (Dan Posal Pulau Nipa)

Berada dalam alur laut internasional dan berdekatan dengan Singapura, menjadi potensi tersendiri bagi Pulau Nipa. Untuk itu, potensi Pulau Nipa yang mungkin dikembangkan selain sektor pertahanan keamanan adalah potensi perekonomian, sehingga di satu sisi, Pulau Nipa dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, sementara di sisi lain, Pulau Nipa dapat memajukan perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, wilayah perairan sangat potensial untuk pengembangan perikanan, dengan memanfaatkan perairan dangkal di bagian selatan pulau Nipa.

4.1.4 Potensi Pengembangan Pulau Nipa

Pada bab ini akan dibahas tentang potensi pengembangan Pulau Nipa berdasarkan kondisi fisik dan lokasi dan potensi pengembangan pulau nipa berdasarkan kondisi wilayah perairan sekitar pulau nipa yang dijelaskan dalam sub bab sebagai berikut :

4.1.4.1 Potensi Pengembangan Pulau Nipa Berdasarkan Kondisi Fisik

Pulau Nipa berada di tengah alur pelayaran lalu lintas internasional (penghubung kawasan Samudera Hindia dan Asia Pasifik) dengan frekuensi pelayaran yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Departemen Perhubungan, rata – rata lalu lintas kapal adalah sekitar 200 kapal/hari (70.000 kapal/tahun) dengan perkembangan lalu lintas kapal sebesar 7,8% per tahun. Kapal yang melewati perairan ini terdiri dari kapal super tanker 20.000 kapal/tahun yang membawa BBM dari Timur Tengah ke Asia Pasifik, tanker, kargo dan tongkang. Dengan pertimbangan lalu lintas kapal yang padat dan perairan bebas antara Pulau Nipa dan Singapura yang sempit, maka pengaturan lalu lintas kapal adalah sebagai berikut:

1. Jalur Timur (*Traffic Separation System East*) merupakan jalur lalu lintas kapal yang berasal dari barat (Samudera Hindia) menuju ke timur (Samudera Pasifik) yang melintasi bagian selatan wilayah Pulau Nipa. Adapun sebagian besar muatan yang diangkut adalah berupa barang hasil tambang atau energi berupa minyak dan gas. Sebagian besar jalur ini melewati wilayah perairan Indonesia dan sampai saat ini belum ada pengaturannya dari instansi yang berwenang di Indonesia.
2. Jalur Barat (*Traffic Separation System West*) merupakan jalur lalu lintas kapal yang berasal dari timur (Samudera Pasifik) menuju ke barat (Samudera Hindia) yang melintasi bagian utara wilayah Pulau Nipa. Adapun sebagian besar muatan yang diangkut adalah berupa barang hasil produk industri. Sebagian besar jalur ini melewati wilayah perairan Singapura dan saat ini sudah ada pengaturannya dari instansi yang berwenang di Singapura.

Karakteristik lalu lintas laut yang melintas di perairan sekitar Pulau Nipa (Selat Singapura) dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transshipment di Pelabuhan Singapura, Tanjung Pelepas, Pulau Batam dan Tanjung Balai Karimun
- 2) Menuju dari/ke Pelabuhan Singapura, Tanjung Pelepas, Pulau Batam dan Tanjung Balai Karimun.
- 3) Berlabuh di perairan untuk *bunkering* BBM, air bersih, *ship candling*, *ship to ship*, *resting area* untuk ABK dan lain – lain.
- 4) Melintas di Selat Singapura.

Posisi seperti ini menjadikan perairan sekitar Pulau Nipa sangat rawan terhadap kejahatan transnasional, di mana sering terjadi transfer bahan bakar minyak secara ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 500 juta per kapal. Selain itu kawasan perairan sekitar Pulau Nipa merupakan wilayah transaksi bagi kapal – kapal yang dirampok oleh perompak di sepanjang perairan Selat Malaka sampai Selat Bangka dengan komoditi antara lain berupa minyak bumi dan minyak CPO. Kemudian dengan peningkatan lalu lintas kapal, hal ini akan berakibat

pada peluang tabrakan kapal semakin besar. Sebagai contoh, terjadi tabrakan Kapal Hyundai 105 dan tenggelam di tepi TSS. Berdasarkan kondisi di atas, maka potensi yang dapat menjadi kekuatan (*strength*) untuk pengembangan Pulau Nipa adalah sebagai berikut :

- 1) Lokasi Strategis
- 2) Secara geologis stabil tidak termasuk kawasan rawan bencana
- 3) Secara topografi, seluruh wilayah daratannya bersifat datar (kemiringan 0 – 2%) dengan luas sekitar 31,19 hektar.
- 4) Terdapat patok batas teritorial Negara Republik Indonesia dengan kode TR 190
- 5) Terdapat mercusuar sebagai rambu untuk membantu kelancaran lalu lintas kapal
- 6) Sebagian lahannya sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, yaitu wilayah bagian utara.
- 7) Sebagian besar lahannya belum dimanfaatkan untuk berupa tanah kosong, terutama wilayah bagian selatan.
- 8) Sebagian lahannya sudah dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi yaitu berupa perairan bakau.

Sementara yang menjadi kelemahan (*weakness*) untuk pengembangan Pulau Nipa, adalah:

- 1) Ketersediaan sumber air bersih terbatas hanya berupa air hujan dan air laut.
- 2) Sebagian besar kawasan konservasi belum ditumbuhi tanaman mangrove/bakau.

4.1.4.2 Potensi Pengembangan Pulau Nipa Berdasarkan Kondisi Wilayah Perairan Sekitar Pulau Nipa

Berdasarkan kondisi eksisting wilayah perairan sekitar Pulau Nipa, maka potensi yang dapat menjadi peluang (*strength*) untuk pengembangan Pulau Nipa adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan fasilitas untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan
- 2) Pengembangan kegiatan Hankam dan kerjasama dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura)
- 3) Pengembangan kegiatan bunker (pengisian BBM, air bersih) dan pasokan logistik untuk mendukung kegiatan *transit anchorage*
- 4) Pengembangan fasilitas untuk mengatur kegiatan *transit anchorage*
- 5) Pengembangan fasilitas pelayanan pelayaran untuk mendukung kegiatan jalur lalu lintas yang semakin padat.

Mengenai kondisi wilayah perairan sekitar Pulau Nipa yang dapat menjadi ancaman (*Threats*) untuk pengembangan Pulau Nipa adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan kualitas perairan dan densitas ikan
- 2) Peningkatan kuantitas jalur kabel dan pipa bawah laut
- 3) Rawan kejahatan berupa perompakan dan transaksi ilegal
- 4) Rawan tabrakan kapal

4.2 Analisis dan Pembahasan Data Penelitian

Pada sub bab ini, peneliti akan menjabarkan secara garis besar strategi pengamanan Pulau Nipa untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan strategi pengamanan Pulau Nipa sebagai *pilot project* pengamanan pulau-pulau terluar lainnya. Garis besar ini merupakan hasil rangkuman dari hasil wawancara dengan pejabat berwenang diantaranya wawancara dengan Laksma TNI Drs. Ir. Harjo Susmoro, SH. MH. Komandan Guskamla Koarmabar, Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kolonel Laut (KH) Haris Djoko Nugroho, M.Si Kasubdis Perbatasan Ditwilhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Ir. Chris Triwinasis, M.Si Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Kota Batam, Letkol Laut (KH) Dantes Palaksa Lanal Batam, Mayor Laut (P) Henry Munjoko Pasop Lanal Batam, Letda Laut (T) Asep Suryanda Danposal Pulau Nipa, Lettu Laut (T)

Darmanto Staf Lanal Batam (Mantan Danposal Pulau Nipa), Kompol Sofyan Perwira Staf Ops Ditpolair Polda Kepulauan Riau dan Bapak Udin Nelayan disekitar Pulau Nipa. Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh selama penelitian dari instansi-instansi terkait. Pada bagian ini peneliti juga akan mengaitkan data dan temuan dengan teori yang relevan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

4.2.1 Analisis Dinamika Pengamanan Pulau Nipa *pasca* dilakukannya Reklamasi

Pulau Nipa merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi perhatian khusus Pemerintah dan juga merupakan kawasan strategis nasional tertentu serta terdapat titik dasar (*base point*) menurut PP No. 37 tahun 2008. Titik dasar tersebut pada prinsipnya digunakan untuk mengukur 3 jenis batas, yaitu batas Zona Ekonomi Exclusive (ZEE), teritorial laut dan landas kontinen. Pulau Nipa memiliki 2 titik dasar (*base point*), yaitu 190 dan 190A yang digunakan untuk mematok batas Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Secara politis kita akan kehilangan sebagian dari wilayah kita jika pulau ini hilang.

Kawasan Pulau Nipa terletak pada zona strategis. Pulau Nipa sangat strategis karena posisi perairannya merupakan zona pembagi terhadap lalu-lintas laut internasional atau *Traffic Separation Schemes (TSS)*. Pulau Nipa mulanya telah berada dalam ancaman untuk tenggelam karena tidak diperhatikan. Seiring dengan posisinya yang amat vital bagi kedaulatan negara, maka langkah kebijakan untuk mempertahankan fungsi strategis Pulau Nipa dilakukan dengan program reklamasi karena Pulau Nipa telah menjadi referensi *Traffic Separation Schemes*. Oleh karena itu dalam penegakan kedaulatan negara dan pengamanan dari berbagai kegiatan pelanggaran wilayah diperlukan penempatan pasukan TNI di Pulau Nipa. Penempatan pasukan TNI sebagai bagian dari proses pengamanan menjadi penting di Pulau Nipa.

Untuk membahas sub bahasan ini, peneliti akan menjabarkan dan menganalisa mengenai kebijakan kementerian pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, peran kelembagaan dalam pengamanan Pulau Nipa, penempatan pasukan TNI dan pembangunan infrastruktur.

4.2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pengamanan di Pulau Nipa

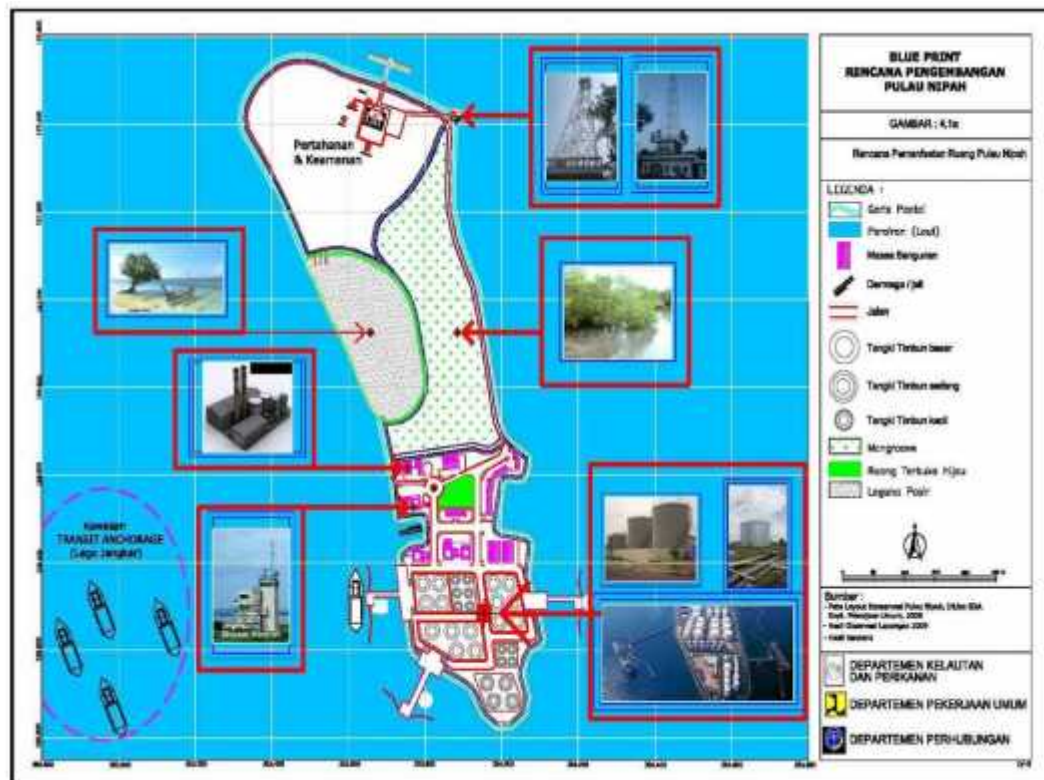
Menurut pendapat Abdul Rivai Ras, pada dasarnya geopolitik adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konstelasi geografis negara, dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis demi penyelenggaraan pemerintah dan berbagai penentuan kebijakan secara rasional berdasarkan realita yang sesuai dan sejalan dengan cita-cita nasional. Kepentingan mengamankan kegiatan ekonomi dan kedaulatan di laut yurisdiksi Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem yang profesional, efektif dan efisien. Hal ini dapat di artikan bahwa arah kebijakan pengamanan Pulau Nipa, selain menggunakan pendekatan keamanan seperti yang selama ini dilakukan, strategi pengamanan Pulau Nipa juga harus didekati dengan menggunakan pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan tentunya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi Pulau Nipa.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, Pulau Nipa merupakan salah satu pulau kecil terluar Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, maka pemanfaatannya harus berlandaskan pada kaidah sebagai berikut: (1) Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya; (2) Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: (a) Konservasi; (b) Pendidikan dan pelatihan; (c) Penelitian dan pengembangan; (d) Budidaya laut; (e) Pariwisata; (f) Usaha

perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; (g) Pertanian organik; (h) Peternakan. (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan latihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: (a) memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; (b) memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta (c) menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. (4) Pemanfaatan Pulau – pulau Kecil Terluar dilakukan oleh pemerintah bersama – sama dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya diatur dengan peraturan Pemerintah. (5) Pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga atau keterlibatan instansi terkait dan dapat diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), dimana dalam implementasinya mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam pengembangan Pulau Nipa, sudah memiliki blue print rencana pengembangan Pulau Nipa yang telah disepakati oleh 3 Departemen yang bertanggung jawab, yaitu; Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pekerjaan Umum serta Departemen Perhubungan. Blue print rencana pengembangan Pulau Nipa dapat dilihat dalam gambar 4.6:

Gambar 4.6 Blue Print Rencana Pengembangan Pulau Nipa



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Februari 2015

Dari gambar di atas, terlihat Pemerintah hendak mengembangkan Pulau Nipa menjadi dua kawasan terpadu, yaitu:

Pertama, Rencana pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Kawasan Pertahanan dan Keamanan berlokasi di bagian utara Pulau Nipa seluas sekitar 15 hektar, dimana di dalamnya sudah terdapat fasilitas pertahanan dan keamanan berupa Bangunan Pos Terpadu TNI, barak/mess Marinir, Rumah Adat, Menara Pengawas, Dermaga Patroli dan Prasasti Baru. Pada kawasan ini juga terdapat rambu suar yang direncanakan peningkatannya menjadi menara suar dengan pertimbangan untuk peningkatan pelayanan pelayaran dan antisipasi terhadap peningkatan lalu lintas kapal. Adapun rencana peningkatannya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan menara suar dengan tinggi 40 m dan luasan lahan 10 x 10 m.

2. Pembangunan rumah sebagai tempat tinggal petugas jaga menara suar dengan ukuran 40 m² sebanyak empat unit. Untuk menghemat biaya, rumah untuk petugas ini ditempatkan di bawah bangunan menara suar.

Kedua, Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi. Kawasan ekonomi berlokasi di bagian selatan Pulau Nipa seluas sekitar 31,06 hektar, terdiri dari: lahan daratan 24,56 hektar dan 6,5 hektar berupa perairan dangkal. Adapun beberapa rencana pengembangannya adalah sebagai berikut:

1. Relokasi Prasasti Lama. Prasasti lama tetap berlokasi pada kawasan ekonomi ini, tapi lokasinya direlokasi ke kawasan plaza yang menjadi satu dari *landmark* kawasan ekonomi.

2. Pembangunan Fasilitas Penyimpanan BBM dan Air Bersih. Untuk melayani kebutuhan logistik BBM di sekitar Selat Malaka, diperlukan adanya fasilitas penyimpanan BBM. Saat ini di kawasan tersebut telah tersedia, namun jumlahnya masih sangat terbatas, dan telah terjadi kegiatan pelayanan BBM *ship to ship* di perairan kawasan tersebut (kegiatan ini sangat beresiko, akibat kurangnya pengawasan), sehingga perlu pembangunan fasilitas penyediaan penyimpanan BBM, salah satunya adalah Tangki Timbun. Kebutuhan BBM di kawasan tersebut akan dapat dilayani dengan adanya kegiatan pengembangan di Pulau Nipa, selain itu kegiatan yang dapat diakomodir adalah pelayanan untuk kapal – kapal yang *transit anchorage* di kawasan tersebut. Adapun perhitungan kebutuhan BBM untuk kapal – kapal *transit anchorage* adalah:

a. Perhitungan kebutuhan kapasitas tangki BBM

Perhitungan pengisian BBM untuk kapal GT 52.351, LOA 243 meter, draught 19.70 meter, MI 15600. Kapal tersebut memerlukan 26.956,8 liter setiap hari berlayar. Untuk tujuan Jepang kapal tersebut memerlukan waktu 10 hari berlayar, sementara untuk menuju Timur Tengah memerlukan 20 hari berlayar (*sumber subdit Kenavigasian Departemen Perhubungan*). Jika diambil rata-

rata kapal tersebut berlayar 15 hari maka kapal memerlukan 15 hari x 26.956,8 liter = 404.352 liter.

Sementara menurut hasil wawancara dengan nelayan setempat dan Subdit Kenavigasian Departemen Perhubungan bahwa terdapat 5 sampai 6 kapal yang melakukan transit anchorage di Pulau Nipa setiap hari. Jika diasumsikan semua kapal yang transit anchorage tersebut melakukan pengisian BBM (bunker) maka kebutuhan BBM adalah $5 \times 404.352 = 2.021.760$ liter/hari, sehingga kebutuhan untuk 1 bulan adalah $2.021.760 \times 30$ hari = 60.652.800 liter = 60.652,8 m³. Berdasarkan perhitungan tersebut maka kebutuhan kapasitas tangki BBM untuk kegiatan pengisian BBM (bunker) adalah sebesar 60.652,8 m³.

Sistem yang digunakan untuk distribusi dari tangki timbun ke kapal adalah sistem perpipaan dari tangki ke dermaga, sedangkan sumber BBM diarahkan ke Depo Pertamina terdekat yaitu di Pulau Sambu, kemudian diangkut ke Pulau Nipa dengan menggunakan kapal.

b. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air bersih terdiri dari dua, yaitu:

- Perhitungan kebutuhan air bersih untuk kapal di area *transit anchorage*.

Di dalam satu kapal terdapat ±20 orang awak kapal (*Data wawancara dengan Departemen Perhubungan*), sehingga kebutuhan air untuk semua kegiatan sehari-hari awak kapal selama berlayar adalah 20×144 liter (*Standar Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum*) = 2.880 liter/hari. Lama berlayar rata-rata adalah 15 hari, sehingga kebutuhan air untuk awak kapal adalah $2.880 \times 15 = 43.200$ liter. Jadi kebutuhan untuk lima kapal adalah $43.200 \times 5 = 216.000$ liter = 216 m³.

Kemudian kebutuhan air bersih untuk kegiatan tank cleaning diasumsikan 3 kali lipat dari kebutuhan air untuk

awak kapal yaitu $216 \text{ m}^3 \times 3 = 648 \text{ m}^3$, sehingga kebutuhan air bersih untuk melayani kapal di area transit anchorage selama satu bulan adalah $(648 + 216) \times 30 = 25.920 \text{ m}^3$.

- Perhitungan kebutuhan air bersih untuk area Pulau Nipa
Untuk mendapatkan jumlah kebutuhan air bersih di Pulau Nipa, didasarkan pada jumlah orang yang beraktivitas di Pulau Nipa. Asumsi jumlah orang tersebut adalah sekitar 550 orang, sehingga kebutuhan air untuk semua kegiatan sehari – hari di Pulau Nipa adalah $550 \times 144 \text{ liter} = 79.200 \text{ liter/hari}$ atau $2.376.000 \text{ liter}$ untuk satu bulan, sehingga kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari – hari di Pulau Nipa adalah 2.376 m^3 .

Berdasarkan kedua perhitungan tersebut, maka total kebutuhan tangki air bersih pada kawasan ekonomi ini selama satu bulan adalah $(25.920 \text{ m}^3 + 2.376 \text{ m}^3) \times 30 = 28.296 \text{ m}^3$.

Sistem yang digunakan untuk distribusi dari tangki timbun ke kapal adalah sistem perpipaan dari tangki ke dermaga, sedangkan sumber air bersih diarahkan ke Kabupaten Karimun (sesuai hasil studi Penyusunan Renstra Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan Karimun), kemudian diangkut ke Pulau Nipa dengan menggunakan kapal.

3. Pembangunan Dermaga Pelabuhan. Dermaga Pelabuhan dibuat sebagai tempat sandar kapal untuk melakukan kegiatan pengisian tangki timbun di Pulau Nipa dan juga pengambilan BBM dan air bersih yang selanjutnya didistribusikan ke kawasan transit anchorage. Dermaga pelabuhan yang dibangun sejumlah tiga unit berlokasi di bagian barat, timur dan selatan kawasan ekonomi.
4. Pembangunan Gudang Logistik. Gudang logistik digunakan untuk melayani kebutuhan logistik kapal yang sedang labuh sementara di kawasan *transit anchorage*. Bangunan gudang logistik ini merupakan bangunan gudang penyimpanan kebutuhan logistik kapal sebagai bekal

selama berlayar, sehingga memerlukan luas yang cukup untuk dapat menampung kebutuhan dari kapal – kapal yang sedang *transit anchorage* di barat Pulau Nipa. Adapun bangunan yang direncanakan adalah 2 unit gudang dengan ukuran 1500 m² tiap bangunannya.

5. Pembangunan Kantor Manajemen Pelabuhan. Bangunan manajemen pelabuhan yang berlokasi di bagian barat dipersiapkan sebagai pengontrol kegiatan pelabuhan di Pulau Nipa dan pengontrol kegiatan *transit anchorage* di barat Pulau Nipa, serta pengendali lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut (pemasangan *Vessel Traffic System*). Adapun asumsi jumlah tenaga kerjanya adalah 500 orang, maka kebutuhan akan ruangan yaitu $500 \times 12 \text{ m} = 6000 \text{ m}^2$.

6. Pembangunan Kantor Navigasi. Bangunan kantor navigasi (stasiun radio pantai) berlokasi di bagian utara berfungsi untuk melayani kegiatan pelayaran di perairan sekitar Pulau Nipa. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan dan lalu lintas kapal. Dalam menentukan kebutuhan ruang untuk kantor navigasi tersebut didasarkan pada jumlah tenaga kerja atau orang yang akan ditempatkan disana. Tenaga kerja yang terlibat di dalam stasiun radio pantai ± 10 orang, sehingga kebutuhan ruang pada bangunan ini adalah 710 m² yang terdiri dari:

- Kebutuhan Ruang Kerja : $10 \times 12 = 120 \text{ m}^2$
- Kebutuhan Gudang Alat dan BBM : 500 m²
- Menara Pemancar : 90 m²

7. Pembangunan Kantor Monitoring Kelautan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (KP3K).

Bangunan Kantor Monitoring Kelautan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil berlokasi di bagian utara berbatasan dengan kawasan konservasi. Kebutuhan ruang bangunan ini didasarkan pada kegiatannya, yaitu untuk penelitian kualitas perairan dan penelitian mangrove. Adapun luas ruang yang dibutuhkan untuk kedua kegiatan tersebut adalah 830 m² dengan rincian:

- 2 laboratorium dan ruang kerja : 730 m²

- Ruang rapat kapasitas 50 orang : 100 m²

8. Pembangunan Mess Karyawan

Bangunan Mess Karyawan ini berlokasi di bagian utara. Adapun kebutuhan ruang untuk bangunan mess karyawan ini akan dipengaruhi pada aktivitas yang terdapat di kawasan ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah karyawan di kawasan ini adalah 550 orang yang terdiri dari:

- Karyawan untuk Kantor Monitoring KP3K diasumsikan 10 orang
- Karyawan untuk bangunan pembangkit listrik dan bangunan Pengolahan Limbah diasumsikan 10 orang
- Karyawan untuk Kantor Navigasi 10 orang (hasil wawancara dengan Dephub)
- Karyawan untuk pelayanan umum diasumsikan 10 orang
- Karyawan untuk kebutuhan logistik diasumsikan 10 orang
- Karyawan untuk managerial dan teknis pelabuhan 500 orang (Referensi: Pelabuhan di Ambon)

Kebutuhan ruang per orang adalah sembilan meter persegi, sehingga kebutuhan ruang adalah $550 \times 9 = 4950 \text{ m}^2$ ditambahkan dengan sirkulasi 15%, maka menjadi 5692 m^2 . Jadi kebutuhan bangunan mess ini adalah 5.692 m^2 .

9. Pembangunan Fasilitas Pelayanan Umum

Bangunan fasilitas pelayanan umum ini berlokasi di bagian tengah berdekatan mess karyawan dan bangunan perkantoran. Berdasarkan ketentuan standar pelayanan minimal (Kepmenkimpraswil No. 534/KTPS/M/2001) dan mengingat lokasi Pulau Nipa yang cukup jauh dari Pusat Kota Batam, maka fasilitas pelayanan yang dibangun adalah berupa:

- Puskesmas
- Pos polisi
- Pemadam kebakaran atau unit pemadam kebakaran
- Layanan makanan berupa kantin dan warung makanan (foodcourt)

Bentuk dari bangunan layanan umum akan lebih mengarah pada bangunan ruko dengan pola ruangan yang sama dengan modul $6 \times 12 \text{ m} = 72 \text{ m}^2$. Kebutuhan ruang untuk pos polisi, puskesmas dan pemadam adalah 1 unit ruko. Sementara untuk food court 3 unit ruko. Sehingga total kebutuhan ruangnya adalah $6 \times 72 = 432 \text{ m}^2$.

10. Pembangunan Jaringan Jalan dan Drainase

Jaringan jalan yang akan dibangun pada kawasan ekonomi ini adalah sepanjang 1.946 m (1,946 km) dengan lebar 10 – 15 m. Selain itu di sepanjang kiri – kanan jalan tersebut juga akan dibangun jaringan drainase untuk pembuangan air hujan dengan lebar minimal 0,25 m.

11. Pembangunan Sistem Jaringan Listrik

Pembangunan sistem jaringan listrik pada kawasan ini meliputi:

- Pembangunan jaringan listrik mengikuti rencana jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan.
- Pembangunan bangunan untuk Instalasi Pembangkit Listrik yang berlokasi di bagian utara. Adapun sumber pembangkitnya berupa genset dengan daya disesuaikan dengan kebutuhan listrik untuk kawasan ini. Genset yang digunakan minimal sebanyak 2 unit, dimana satu unitnya berfungsi sebagai cadangan.

12. Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah

Pembangunan sistem pengolahan limbah pada kawasan ini adalah meliputi:

- Pembangunan jaringan air limbah primer, sekunder dan tersier mengikuti rencana jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan.
- Pembangunan bangunan untuk Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) yang berlokasi di bagian utara.

13. Pembangunan Sistem Telekomunikasi

Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan ini adalah meliputi:

- Pembangunan jaringan Telekomunikasi mengikuti rencana jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan.
- Pembangunan fasilitas menara BTS/Radar untuk jaringan Telekomunikasi Telepon Seluler, dimana lokasinya menyatu dengan kantor navigasi dengan pertimbangan efisiensi biaya.

Kajian kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan negara harus dilakukan secara komprehensif yang tidak terlepas dari potensi dan karakteristiknya yang mencakup aspek sumberdaya alam (lingkungan hidup) baik sumberdaya hayati maupun non hayati; aspek infrastruktur yang meliputi ekonomi, hukum, kelembagaan dan sosial budaya serta aspek geopolitik yaitu pertahanan dan keamanan terutama terkait dengan fungsi pulau-pulau kecil di perbatasan negara sebagai basis pertahanan negara dan lokasi acuan titik dasar untuk mempertegas kedaulatan Indonesia pada wilayah tersebut. Di samping itu, kegiatan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan negara perlu memperhatikan aspek tata ruang untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan dan konflik kepentingan, misalnya penentuan wilayah pulau kecil sebagai daerah penangkapan, budidaya, wisata bahari, dan konservasi. Penentuan alokasi ruang tersebut perlu dilengkapi dengan penyusunan rencana detail dan pembagian zonasi untuk selanjutnya dapat digunakan dalam penyusunan rencana pengelolaan, rencana bisnis dan rencana pertahanan keamanan.

Pertahanan Mendukung Ekonomi

Pendekatan keamanan melihat ke Pulau Nipa yang memiliki nilai strategis juga keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan pembangunan kelautan nasional. Salah satunya adalah pengembangan

Pulau Nipa untuk dijadikan model pengembangan pulau-pulau kecil terluar. Hal ini sudah disadari dan dijadikan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang menyatakan:

“Pembangunan Pulau Nipa sebagai bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan defence supporting economy (pertahanan mendukung ekonomi). Mengingat pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa pembangunan Pulau Nipa menjadi model pengembangan untuk pulau-pulau terluar lainnya yang memiliki potensi tidak hanya untuk kepentingan kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukkan kedaulatan ekonomi nasional. Terlebih, pemerintah melalui Kemhan sudah menargetkan dalam dua tahun ke depan, Pulau Nipa sudah menjadi kawasan yang melambangkan defence supporting economy. Karenanya, Kemhan berkepentingan untuk segera memformulasikan suatu rujukan dalam bentuk prototipe model bagaimana mengelola pulau – pulau terluar ini agar dapat mendukung pertahanan serta diharapkan pada tahun 2014 Pulau Nipa sudah hijau dan infrastruktur pertahanan maupun ekonomi sudah terbangun.”⁶⁴

Oleh karena itu, pengelolaan Pulau Nipa diharapkan tetap memperhatikan tujuan reklamasi dan konservasi serta pertahanan keamanan demi terjaganya eksistensi sebagai titik dasar penentuan batas teritorial. Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Pulau Nipa pada tanggal 2 Juni 2012 juga menyampaikan arahan agar Pulau Nipa dibagi menjadi 2 bagian. Separuh untuk kepentingan pertahanan dan separuh untuk kepentingan ekonomi.

Menurut SBY, Pulau Nipa merupakan pintu terdepan Indonesia untuk pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, terutama menghadapi kejahatan lintas batas di sekitar Johor, Singapura dan Riau.

“Nipa adalah pos depan kita, pulau kecil tetapi memiliki arti yang sangat strategis dalam pertahanan. Pulau Nipa juga memainkan peran penting dalam keamanan pelayaran di Selat Malaka.”⁶⁵

⁶⁴ <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=246>

⁶⁵ <http://www.kemlu.go.id/singapore/Lists/EmbassiesNews/DispForm.aspx?ID=75&ContentTypeId=0x0100574B2B380123F5488597FB3B64A2C806>

SBY juga menegaskan pentingnya dibangun sistem pertahanan di Pulau Nipa untuk menjaga kedaulatan negara, sekaligus mencegah terjadinya kejahatan transnasional.

Hasil wawancara dengan Kasubdis Perbatasan Laut dan Udara Ditwilhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kolonel Laut (KH) Haris D. Nugroho, pada tanggal 16 Februari 2015 di kantor Dinas Hidro-Oceanografi TNI AL berpendapat bahwa

“Keamanan Pulau Nipa menjadi perhatian pemerintah karena wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain yaitu negara Singapura. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan program pengawasan dan pemantauan di Pulau Nipa. Pemanfaatan Pulau Nipa selayaknya diperkuat melalui effective control, yang termuat dalam administrasi pemerintahan disertai dengan kunjungan atau pengawasan secara kontinyu serta perlunya penegasan batas maritim yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi NKRI. Kepastian hukum ini menjadi penting untuk pemanfaatan sumber – sumber potensi yang dimiliki Pulau Nipa tersebut.”

Langkah selanjutnya menurut pendapat Kolonel laut (KH) Haris D. Nugroho,

“Dengan mengkaryakan kembali aparatur ataupun sumber daya manusia di sekitar Pulau Nipa. Mengkaryakan menjadi lebih baik daripada menempatkan kembali, karena konotasi menempatkan pada kenyataannya hanya ditempatkan saja tanpa diberikan fasilitas dan kebutuhan kepada sumber daya manusia yang mengawasi Pulau Nipa tersebut.”

Masih menurut pendapat Kolonel laut (KH) Haris D. Nugroho,

“Adapun program yang dapat dilakukan; Mengkaryakan petugas atau aparat TNI AL yang berfungsi sebagai pengawas di kawasan Pulau Nipa tersebut. Tidak hanya menempatkan tetapi pemberian insentif kepada petugas yang telah bersedia ditempatkan berupa tunjangan hidup aparatur di Pulau Nipa dengan pembiayaan Negara; Melakukan pengawasan dan pemantauan melalui patroli secara teratur di kawasan perairan sekitar Pulau Nipa baik TNI AL, POLRI dan Bea Cukai, berikut dengan kebutuhan sarana prasarana, seperti kapal – kapal pengawasan dan pemantauan yang memenuhi standar internasional; Melakukan relokasi dan pengkaryaan nelayan ke sekitar kawasan Pulau Nipa dalam rangka meningkatkan pengawasan wilayah Pulau Nipa. Relokasi diikuti dengan memberikan bantuan permodalan dan akses informasi serta kemudahan dalam memperoleh kebutuhan dasar; Melakukan kerjasama bilateral dan regional dengan negara Singapura untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. “

Patroli gabungan bersama yang dilakukan secara teratur, diyakini berbanding lurus dengan berkurangnya angka kejahatan di perairan Pulau Nipa.

Dengan adanya personel pengamanan di Pulau Nipa, memang membuat tindak pidana di perairan tersebut dapat ditekan. Pelaku akan berpikir dua kali dengan adanya aparat di sana. Banyak kapal asing yang anchor di area Pulau Nipa. Dan mereka juga merasa aman dengan keberadaan kita di sana. Biasanya kami menyambangi kapal – kapal yang lego jangkar di sana. Kami naik dan melakukan pemeriksaan. Menanyakan berapa jumlah crew-nya dan data lain yang dibutuhkan. Dengan adanya pengamanan di Pulau Nipa, bisa dikatakan perompakan atau pencurian di atas kapal tidak ada lagi.⁶⁶

Strategi pengamanan Pulau Nipa menitikberatkan pada sektor pertahanan sebagai pondasi utama sebelum kemudian dikembangkan ke sektor ekonomi. Namun kebijakan yang sedianya diterapkan untuk pengembangan Pulau Nipa, harus tetap memperhatikan potensi yang ada. Regulasi yang dibentuk dan telah dimantapkan sebelumnya harus dievaluasi kembali. Sehingga ada pemetaan ulang potensi Pulau Nipa. Dan pada kelanjutannya dibentuk tim percepatan pembangunan yang melibatkan semua unsur untuk menggali potensi yang ada di Pulau Nipa.

4.2.1.2 Peran Kelembagaan dalam Pengamanan Pulau Nipa

Untuk mengakomodasi kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengamanan Pulau Nipa diperlukan koordinasi yang solid antar lembaga yang terkait. Matriks kebijakan berikut menggambarkan sebaran peran dan kewenangan dua instansi yang terkait dalam permasalahan pengamanan dan pengembangan Pulau Nipa, yaitu KKP dan Kemhan. Dari matriks ini ingin diketahui koordinasi dan irisan kewenangan dari masing-masing instansi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Sofyan, Perwira Staf Ops Ditpolair Polda Kepri

Tabel 4.1 Matriks Kebijakan Pengamanan dan Pengembangan
Pulau Nipa

No	Parameter	KKP	Kemhan
	Ekonomi		
1	Penyusunan blue print pengembangan Pulau Nipa.		
2	Pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Nipa.		
3	Pembangunan wisata bahari Pulau Nipa.		
4	Investasi Pembangunan Pulau Nipa.		
5	Eksplorasi dan eksploitasi SDA Pulau Nipa.		
6	Kerjasama bilateral dalam pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Singapura.		
7	Konservasi ekologi Pulau Nipa dan perairan sekitarnya.		
	Subtotal:	7	6
	Hukum		
1	Penentuan titik dasar (base point) Pulau Nipa.		
2	Pengukuran titik-titik koordinat perbatasan Indonesia-Singapura.		
3	Pembuatan peta dan daftar geografis perbatasan Indonesia-Singapura.		

4	Diplomasi mengenai batas wilayah Indonesia-Singapura.		
5	Regulasi mengenai investasi pembangunan Pulau Nipa.		
	Subtotal:	3	4
	Pertahanan dan Keamanan		
1	Pembangunan pos pengawasan Pulau Nipa.		
2	Penempatan personel keamanan di Pulau Nipa.		
3	Patroli keamanan rutin di Selat Malaka.		
4	Penangkapan penyelundupan, traficking, IUU Fishing, perompakan di perairan sekitar Pulau Nipa.		
5	Penanganan pencemaran (keamanan lingkungan) di Pulau Nipa dan perairan sekitarnya.		
6	Kerjasama keamanan perbatasan dengan Singapura.		
	Subtotal:	2	6
	Total Peran:	12	16

Sumber :Data Primer (diolah) 2015

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa dari tiga parameter yang dikemukakan (ekonomi, hukum dan hankam), kementerian Pertahanan memiliki jumlah peran dalam kebijakan yang lebih besar dibanding kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini

menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki posisi yang strategis dalam kebijakan pengamanan dan pengelolaan di Pulau Nipa.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pulau Nipa

Selain Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan pembangunan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 disebutkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah. Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka daerah memiliki peluang untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayahnya. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan momentum untuk lebih terperhatikannya pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar. Dengan kata lain, otonomi daerah diharapkan dapat memfasilitasi percepatan pembangunan di wilayah tersebut, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memasukkan pengelolaan wilayah laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayahnya masing-masing. Dengan kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan, daerah mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Pengusahaan daerah (Provinsi) atas dasar pengelolaannya pun kemudian akan diturunkan atau diserahkan kembali kepada pihak daerah setempat yang lebih mengenal karakteristik dan kultur daerah yang ada didalamnya, yang kemudian tetap mempertahankan garis-garis besar pembangunan wilayah pulau-pulau terluar dalam upaya pembangunan

wilayah/pulau tertinggal. Dalam Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan daerah tersebut dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua bidang. Dalam kerangka negara kesatuan, meskipun daerah diberikan otonomi secara luas, tetapi tetap diperlukan adanya konsistensi baik hal keterpaduan substansi maupun kesamaan visi-misi secara nasional. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat berkepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku secara umum.

Diberlakukannya undang - undang tersebut merupakan momentum agar pulau – pulau kecil terluar lebih diperhatikan. Dengan kata lain, otonomi daerah diharapkan dapat memfasilitasi percepatan pembangunan di wilayah tersebut, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pemfasilitasian untuk percepatan pembangunan saat ini sudah diterapkan di Pulau Nipa sebagai model pengembangan pulau-pulau kecil terluar lainnya. Pemerintah Daerah Batam telah merubah Badan Pertanahan Daerah menjadi Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan untuk mengkoordinasikan kebutuhan di Pulau Nipa dan pulau-pulau lainnya di Batam.

Menurut Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Kota Batam, Chris Triwinasis, dalam wawancara tanggal 14 November 2014

“Jadi, tugas kami ini seperti Bapeda-nya pengelola perbatasan. Kami turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung.”

Lebih lanjut menurut Chris Triwinasis;

“Fungsi kita untuk menyediakan apa yang dibutuhkan perbatasan. Setelah mengetahui yang dibutuhkan, kita akan mengkoordinasikannya ke pihak – pihak yang terkait. Tugas kita hanya memberi informasi, mengkoordinir ke skpd terkait. Misalnya, kita ke

Pulau Nipa dan melihat kalau ternyata disana sudah hampir tergerus. Maka kita akan segera menginfomasikannya ke PU atau Perhubungan.”

Meskipun demikian, tidak hanya menjaga Pulau Nipa secara fisik, Pemerintah daerah juga memberikan perhatian untuk personil yang melakukan pengamanan di Pulau Nipa.

“Biasanya saat mereka berkunjung mereka memberikan bantuan sembako untuk pasukan yang berjaga di Pulau Nipa. Mereka juga membuat gapura selamat datang di Pulau Nipa, serta memberikan bantuan cat untuk kegiatan pengecatan disini.”⁶⁷

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang khususnya perbatasan berpedoman kepada kebijakan pertahanan negara dapat menentukan suatu sabuk pengaman (*safety belt*) di sepanjang perbatasan negara sesuai dengan ketentuan pertahanan.⁶⁸ Pemerintah Daerah Batam cukup berperan aktif dalam melaksanakan pertahanan negara di kawasan perbatasan laut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menangani pengamanan kawasan perbatasan pemerintah daerah juga telah memperhatikan aspek kesejahteraan pasukan yang berjaga di Pulau Nipa dengan memberikan bantuan berupa sembako. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah Batam menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pengembangan kawasan kepulauan perbatasan negara.

4.2.1.3 Dinamika Pengamanan di Pulau Nipa

Dalam penerapan teori dan praktek Mahan mengembangkan teori Frederich dan Clausewitz ke laut dengan mengembangkan teori Sea Power.⁶⁹ Penggunaan teori Mahan dalam pengamanan pulau-pulau terluar di Indonesia adalah dengan memberikan keyakinan bahwa dengan pengamanan dan penguasaan laut di pulau - pulau terluar Indonesia

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Lettu Laut (T) Darmanto, Staf Lanal Batam (mantan Danposal Pulau Nipa) di Lanal Batam pada Rabu, 5 November 2014

⁶⁸ Iswinardi, *Tata Ruang Negara Kepulauan Untuk Pengelolaan Pertahanan Negara*, Yogyakarta: UGM, 2009.

⁶⁹ Paret, Peter. *Maker of modern strategy from Machiavelli to The nuclear age* Princeton: Princeton univ.press, 1986, hal.450.

dapat menyelamatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya di samping untuk menegakkan kedaulatan. Oleh karena itu harus dipunyai Angkatan Laut yang kuat agar dapat melaksanakan *comand of sea* melalui *Naval Security* yang lebih unggul dan kombinasi SLOC agar tetap berjalan untuk kepentingan Indonesia.

Salah satu pokok Operasi TNI untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu Terjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia dari setiap bentuk ancaman.⁷⁰ TNI merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Dengan tugas pokok tersebut, TNI berkewajiban untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia di darat, laut dan udara khususnya yang berbatasan dengan negara lain, dengan menempatkan satuan TNI secara langsung di daerah tersebut dengan melaksanakan pengamanan perbatasan darat maupun melalui patroli laut, patroli udara serta pengamatan udara.⁷¹

Pertahanan dan keamanan pulau-pulau terluar dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan dengan menetapkan kebijakan yang meliputi patroli keamanan laut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan intensitas kedaulatan perairan Indonesia termasuk pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, pameran bendera (*Show of Flag*) dengan memasang tapal batas serta penempatan TNI.⁷² Analisisnya Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas dalam mewujudkan kedaulatan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam pulau-pulau kecil terluar. Pertahanan negara dilaksanakan melalui Departemen Pertahanan yang

⁷⁰ Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/8/II/2010 tentang *Operasi TNI*.

⁷¹ Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/12/VII/2007 tentang *Petunjuk Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan*.

⁷²<http://www.wilayahpertahanan.com/kepentingan-pertahanan-di-perbatasan-konsep-safety-belt/>

merupakan pelaksana fungsi pemerintah dalam bidang pertahanan negara.

Pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan pada dasarnya untuk mencegah keluar dan masuknya semua bentuk kegiatan ilegal, infiltrasi yang melewati wilayah perbatasan Republik Indonesia, mencegah negara lain yang berbatasan langsung melakukan perluasan wilayah. Sasaran dari operasi pengamanan perbatasan yaitu: 1) Terpeliharanya integritas wilayah darat, laut dan udara di perbatasan Republik Indonesia dengan negara lain secara baik; 2) Tercegahnya semua kegiatan ilegal baik yang akan masuk maupun keluar wilayah Republik Indonesia yang melalui perbatasan; 3) Tercegahnya kegiatan infiltrasi dari negara lain yang akan melewati perbatasan; 4) Tercegahnya tindakan negara lain yang berbatasan langsung dengan wilayah Republik Indonesia untuk melakukan perluasan wilayah di perbatasan.

TNI Angkatan Laut saat ini telah menerapkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara yang mana pada masa damai ditunjukkan untuk menimbulkan dampak penangkalan yang tinggi terhadap niat dari pihak – pihak yang akan mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta untuk menciptakan kondisi aman perairan nasional yang terkendali dan ditata dalam bentuk gelar operasi laut untuk penangkalan dan pengendalian laut yang direncanakan dalam *Minimum Essential Force* (MEF) dan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Pola operasi yang dilaksanakan adalah operasi kehadiran di laut, operasi siaga tempur laut, serta operasi laut sehari – hari yang melibatkan KRI dan KAL, pesawat udara TNI AL, pasukan Marinir dan pangkalan TNI AL.

Organisasi TNI AL terdiri atas Markas Besar Angkatan yang meliputi unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan. Dalam hal ini Komando Utama Pembinaan merupakan kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf di angkat dari perwira tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan.

Pangkalan TNI – AL merupakan bagian integral dari sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) sebagai ujung tombak dalam mendukung keberhasilan tugas – tugas satuan operasional TNI – AL. Dua fungsi pokok Pangkalan TNI – AL adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik yang merupakan unsur – unsur pokok TNI – AL seperti kapal dan anggota satgas untuk melakukan pengamanan terhadap potensi maritim dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki. Menurut Asisten Operasi Pangkolinlamil Kolonel Laut (P) Umar Arief;

“Saat ini, Kolinlamil mendukung sebanyak lima buah kapal perang untuk pelaksanaan pergeseran pasukan, material, maupun kendaraan tempur dalam menjaga pengamanan perbatasan maupun pengamanan di pulau-pulau kecil terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik di wilayah Timur maupun wilayah Barat”⁷³

Sedangkan dalam pengamanan kawasan Pulau Nipa difasilitasi dengan kapal patroli.

- b) Dalam pelaksanaan tugas yang sudah dijelaskan di atas, pangkalan TNI AL juga mengemban fungsi sebagai fungsi pendukung satuan koperasi, fungsi keamanan laut (KAMLA), fungsi pembinaan Teritorial Matra Laut/Binter Matla. Pangkalan TNI AL di Pulau Nipa juga meliputi fungsi keamanan laut (KAMLA) dalam menjaga kedaulatan negara. Pangkalan TNI – AL terdiri beberapa jenis pangkalan yaitu: pangkalan TNI – AL kelas A (Lanal kelas A), pangkalan TNI kelas khusus (Lanal kelas khusus KH), dan Pos Pengamat TNI AL (Posal).

Menurut pendapat Komandan Guskamla Koarmabar Laksma TNI Harjo Susmoro, pada saat wawancara pada tanggal 12 November 2014 di kantor Guskamla Koarmabar di Batam,

“Bentuk pertahanan serta keamanan di sekitar perairan Pulau Nipa, TNI Angkatan Laut melakukan patroli rutin bersama polair, aparat bea dan cukai serta dari Bakamla. Operasi keamanan laut juga dilaksanakan oleh Komando Armada Republik Indonesia. Bentuk operasi keamanan laut di gelar dalam operasi keamanan laut sepanjang tahunnya oleh kapal patroli TNI AL secara rutin di sektor Opskamla dan Operasi khusus yang dilaksanakan oleh Komando

⁷³<http://jurnalmaritim.com/2014/1/1603/kolinlamil-siagakan-lima-kri-amankan-pulau-pulau-terluar>

operasi TNI AL secara terpadu dengan daerah operasi waktu serta sasaran operasi tertentu yaitu dengan melaksanakan Operasi Kretya Baruna yang dilaksanakan selama 30 hari dengan unsur satu Kapal Perusak Kawal, satu Kapal Angkut Tank, empat Fast Patrol Boat dan didukung oleh satu pesawat udara jenis Cassa. Patroli gabungan dengan Negara Singapura atau Operasi Indosin yang dilaksanakan empat periode dalam satu tahun selama 60 hari setiap periodenya.”

Selanjutnya menurut Komandan Guskamla Koarmabar Laksma TNI Harjo Susmoro,

“Untuk kawasan Pulau Nipa, akses pertahanan dan keamanan dilakukan dengan memberikan penguatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan pada koridor-koridor dan pangkalan pertahanan Angkatan Laut sesuai dengan kebutuhannya.”

Hasil wawancara pada tanggal 5 November 2014, menurut pendapat Pasops Lanal Batam Mayor Laut (P) Henri Munjoko

“Sistem kerja TNI – AL yang mengamankan wilayah Provinsi Kepulauan Riau di bawah pengawasan lanal Batam dengan Komandan Lanal Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyatno, S.E. Dalam hal ini lanal Batam mengerahkan 2 unit kapal patroli, berupa Kapal Angkatan Laut (KAL) Nipa dan speedboat untuk pengamanan di pulau terluar ini. Patroli dua kapal Angkatan Laut tersebut di dukung oleh satu KAL yaitu KAL Seraya dan tiga Kapal Patroli Keamanan Laut (PATKAMLA) yaitu Combat 1 (mesin tempel/solar), Combat 2 (mesin dalam/solar), Combat 58 (mesin dalam/solar) serta dua Sea Rider dan empat kapal patroli kecil (Sea Lumba, Sea Hunter, Sea Wolf dan Nos) untuk menjangkau daerah perairan sempit dan dangkal.

Selanjutnya menurut pendapat Direktur Pendayagunaan pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Rido Miduk Sugandi Batubara, pada saat wawancara tanggal 17 Februari 2015 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau kecil mengatakan bahwa

“Pengamanan Pulau Nipa dalam pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan penerapan teknologi informasi. Hal ini menjadi penting mengingat IUU Fishing target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti high sea.”

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada tanggal 4 – 17 November 2014, pengamanan terhadap wilayah Pulau Nipa sebagai pulau terluar dilakukan dengan menempatkan Pos TNI AL yang dipimpin oleh

seorang Perwira berpangkat Letnan Dua, Letda Laut (T) Asep Suryanda. Jumlah personil TNI AL yang dikerahkan untuk menjaga pengamanan di Pulau Nipa adalah 14 orang. TNI Angkatan Laut juga rutin melaksanakan patroli di sekitar perairan Pulau Nipa yang bertujuan untuk mencegah serta mengamankan laut yurisdiksi nasional Indonesia dari pelanggaran laut. Berbagai pelanggaran laut yang terjadi di perairan Pulau Nipa adalah pencurian ikan oleh negara asing, serta sumber daya alam.

Dalam kepentingan menjaga keselamatan, keamanan dan pertahanan Negara di laut, TNI AL sebagai tulang punggung upaya pertahanan dan keamanan di laut masih belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan penguasaan laut di bawah yurisdiksi nasional.

Menurut pendapat Komandan Guskamla Koarmabar Laksma TNI Harjo Susmoro,

“Bahwa secara khusus ada pasukan untuk pengamanan disana memang benar. Tetapi menurut saya belum cukup efektif. Untuk mengamankan Pulau Nipanya is ok. Tapi tidak bisa mengamankan perairannya yang begitu luas, padahal disana banyak sekali kapal. Kita juga tidak punya kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan patroli disana karena bisa dikomplain negara lain. TNI AL tidak memiliki dukungan yang cukup memadai untuk melaksanakan pengamanan khusus di Selat Nipa atau Pulau Nipa itu. Karena kita juga punya wilayah yang harus diamankan. Natuna rawan illegal fishing, Selat Malaka dan Selat Singapura juga harus diawasi. Itu kesulitan kita. Satu unsur tapi harus ada di semua tempat. Belum lagi dibandingkan antara kondisi laut yang begitu luas dengan kemampuan kapal yang terbatas. Hanya rata – rata 10 knot maksimal 14 knot, sementara sasarannya kecepatannya rata – rata 25 – 30 knot. Kapal kecil dengan motor tempel kekuatan 10 ribu pk saja tidak bisa kita kejar. Walaupun sudah di depan mata, sudah kita bidik, kalau mereka lari ya kita tetap tidak bisa mengejar.”

Penegasan serupa juga disampaikan oleh Danposal Pulau Nipa, Letda Laut (T) Asep Suryanda, bahwa;

“Yang harus menjadi prioritas adalah dukungan transportasi untuk patroli. Sebab patroli penting dilakukan untuk kegiatan pengaman di laut. Selain itu, kita juga membutuhkan alat deteksi.”

Meskipun demikian, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, tentu tidak menyurutkan kegiatan pengamanan di Pulau Nipa. Ada

upaya berjenjang yang akan dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Letda Laut (T) Asep Suryanda;

“Dengan terjalinnya hubungan baik melalui pendekatan dan penggalangan serta melaksanakan fungsi intelijen khususnya terhadap para nelayan yang sedang beraktifitas di perairan Pulau Nipa sekitarnya juga personel Pos TNI AL Pulau Nipa mendatangi pulau-pulau kecil yang berpenduduk. Harapannya adalah agar para nelayan dan penduduk di pesisir pantai dapat memberikan informasi kepada Pos TNI AL Pulau Nipa apabila ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang mencurigakan baik dari darat ke laut maupun dari laut ke darat atau kegiatan-kegiatan illegal yang sedang berlangsung di tengah laut. “Jika ada pelanggaran yang kami ketahui, misalnya penyelundupan, biasanya kami tetap mengusahakan untuk melakukan patroli terlebih dahulu. Jika tidak bisa mengatasinya, maka kami akan berkoordinasi dengan Guskamla. Selain itu juga ada KRI yang bisa diarahkan untuk melakukan patroli di sekitar Pulau Nipa.”

Tidak hanya dalam bentuk pengamanan, keberadaan TNI AL di Pulau Nipa juga dirasakan manfaatnya oleh nelayan yang biasanya mencari ikan di wilayah perairan pulau Nipa. Karena selain menjaga Pulau Nipa, aparat TNI AL seringkali juga melindungi nelayan disana. Seperti yang dirasakan oleh Udin, salah satu nelayan yang tinggal disekitar Pulau Nipa. Disisi lain, nelayan juga dilibatkan untuk mendapatkan informasi tambahan.

“Karena nelayan lebih paham situasi di sini, jadi kami juga sering dilibatkan untuk pengamanan informasi. Sejauh ini AL juga membantu khususnya kalau kita ada masalah. Misalnya ada kecelakaan laut. Pihak AL biasanya ikut membantu menyelesaikan. Kalau sudah ada TNI, biasanya pihak perusahaan juga pikir panjang kalau mau lari dari tanggung jawab.”

Bahkan secara signifikan menurut Udin, nelayan megakui kegiatan ilegal di perairan Pulau Nipa berkurang sejak adanya TNI AL di pulau terluar itu.

“Dengan adanya AL, kejahatan di laut juga berkurang. Karena nelayan juga rajin memberikan informasi kepada AL.”

Keberadaan pasukan TNI, dalam hal ini TNI AL di Pulau Nipa ditujukan untuk menjaga perbatasan Indonesia – Singapura, baik daratnya maupun perairannya. Hal ini terlihat dari dapat ditekannya jumlah angka kejahatan atau kegiatan ilegal di wilayah pulau terluar itu. Namun, keberadaan pasukan untuk pengamanan pulau terluar, tidak

boleh dipandang sempit. Sebab, aparat TNI AL juga diharapkan bisa mengembangkan relasi yang baik dengan masyarakat sekitar, seperti nelayan ataupun dengan kru kapal asing yang berlabut sementara di wilayah perbatasan. Namun, penempatan pasukan di Pulau Nipa saat ini belum diimbangi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai. Misalnya kapal berupa speedboat yang tidak memadai untuk melakukan patroli di wilayah tersebut ataupun untuk melakukan pengejaran terhadap kapal yang melakukan pelanggaran. Fasilitas lain yang belum tersedia adalah radar yang difungsikan untuk melakukan deteksi ataupun identifikasi obyek di laut dan udara di atasnya yang tidak dikenal atau dicurigai ketika sedang melakukan aktivitas di perbatasan perairan Indonesia. Dalam hal ini utamanya adalah kapal-kapal yang masuk atau keluar dari Singapura. Dengan peningkatan fasilitas, diharapkan standar pertahanannya harusnya bisa disamakan dengan Singapura atau Malaysia.⁷⁴

4.2.1.4 Pembangunan Infrastruktur di Pulau Nipa

Menurut Juwono Sudarsono dalam Connie⁷⁵, *“pertahanan keamanan harus disadari sama pentingnya dengan prasarana umum lainnya seperti listrik, bandara, pelabuhan, jalan raya, layanan kesehatan masyarakat, air minum dan pendidikan.”* Ini artinya, jika kita bicara mengenai pentingnya masalah pertahanan dan keamanan, maka sebetulnya kita juga sedang bicara mengenai vitalnya infrastrukturnya.

Untuk pengembangan Pulau Nipa, sejumlah infrastruktur telah dibangun disini, untuk melengkapi dua kriteria pembagian zona di wilayah ini.

Seperti yang disebutkan oleh Kasubdis Perbatasan Laut dan Udara Ditwilhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kolonel laut (KH) Haris D. Nugroho,

“Dari sisi pertahanan keamanan, di Pulau Nipa telah dibangun pangkalan TNI Angkatan Darat dan Marinir Angkatan Laut. Dari sisi ekonomi, telah disusun blueprint pengembangan Pulau Nipa untuk

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Mayor Laut (P) Henry Munjoko, Pasop Lanal Batam

⁷⁵ Bakrie, Connie Rahakundini, Nur Imam Subono, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal.50

pembangunan oil storage dan transit anchorage area. Sedangkan dari sisi lingkungan, telah diperuntukkan laguna sekitar 6 ha untuk pengembangan kawasan mangrove.”

Secara garis besar, pembangunan infrastruktur yang dibangun sesuai zona peruntukkannya hingga tahun 2014 adalah:

Pertama, Zona Pertahanan dan keamanan. Daratan seluas sekitar 15 hektar, merupakan tanah kosong (lahan terbuka) dan sebagian kecil digunakan sebagai fasilitas Pos Terpadu TNI, Barak/Mess Marinir, Rumah Adat, Menara Pengawas, Dermaga Patroli, Prasasti Baru, Mercusuar dan fasilitas parkir serta jalan. Di dalam zona ini juga terdapat fasilitas lain berupa listrik menggunakan generator dan tenaga surya untuk pembangkitnya serta fasilitas telekomunikasi menggunakan fasilitas telepon seluler dengan bantuan tower/.menara mini. Selain itu untuk mendukung ketersediaan air bersih juga sudah tersedia instalasi penyulingan air laut (sumbangan BPPT).

Kedua Zona Pengembangan Ekonomi. Merujuk kesepakatan Rapat NO: B.566/KP3K/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dituangkan dalam Notulensi Rapat serta Pokok – pokok Hasil Rapat di Menkopolkam tanggal 22 Juni 2010 No: R.72/Ses/Polhukam/2010, semula pemanfaatan ruang Pulau Nipa dibagi menjadi 3 (tiga) Kawasan yaitu (i) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (ii) Kawasan Konservasi (iii) Kawasan Ekonomi. Selanjutnya disepakati bersama diubah menjadi 2 (dua) Kawasan yaitu (i) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (ii) Kawasan Ekonomi dengan tetap memperhatikan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan ekosistem dan kebutuhannya. Zona Pengembangan Ekonomi terdiri dari:

- a) Perairan dangkal dengan dasar lumpur yang ditumbuhi tanaman liar seluas sekitar 12,28 hektar dimana dari hasil observasi lapangan hanya sebagian kecil yang ditumbuhi bakau. Selain itu, pada bagian timur terdapat jalan penghubung antara utara dan selatan. Kawasan ini terendam pada saat pasang dan kering pada saat surut.

- b) Berupa laguna pasir seluas sekitar 6,50 hektar dimana dari observasi lapangan, kawasan ini terendam air laut pada saat pasang naik dan kering atau tidak terendam pada saat pasang surut.
- c) Berupa daratan seluas sekitar 16,19 hektar, dominan berupa tanah kosong (lahan terbuka) dan sebagian kecil berupa fasilitas Pos TNI Angkatan Laut lama, Dermaga Kayu dan Prasasti lama.

Sementara itu, sejumlah infrastruktur yang ada di Pulau Nipa diantaranya Barak Marinir yang dibangun tahun 2010 untuk memperkuat satgas pam pulau terluar, tower triangle/pemancar radio oleh Diskomlek Armabar yang dibangun tahun 2009, serta diesel generator yang digunakan untuk penerangan gedung, dermaga dan jalan penghubung serta power supply aliran darat ke kapal untuk menghidupkan pompa hydran. Fasilitas lain yang juga tersedia adalah pembangkit listrik tenaga Surya dan Turbin angin yang dibangun antara bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2010 atas inisiatif dari Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral. Untuk kebutuhan air bersih bagi pasukan yang bertugas di Pulau Nipa, juga disediakan instalasi filter air bersih yang dibangun di sebelah tandon penampung air hujan. Selain itu juga terdapat alat perubahan air laut menjadi air tawar / RO (Reverse Osmosis) yang dapat menghasilkan \pm 450 liter air tawar/jam. Instalasi filter air bersih dan RO dibangun pada Januari 2010 dan Juli 2010. Secara lebih detil, infrastruktur yang ada di Pulau Nipa dapat dilihat dalam Gambar 4.4 dan Gambar 4.5.

INFRASTRUKTUR DI PULAU NIPA

Sumber: Pengamatan Langsung di Pulau Nipa

Gambar 4.5 Infrastruktur Pulau Nipa



Sumber: Pengamatan Langsung di Pulau Nipa

Dari data yang dikumpulkan di lapangan, Peneliti melihat bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Pulau Nipa sebenarnya sudah memadai dan telah disesuaikan dengan kebutuhan di Pulau Nipa saat ini. Namun dibutuhkan perawatan lebih lanjut. Seperti yang disampaikan oleh Letda Laut (T) Asep Suryanda selaku Danposal Nipa:

“Di sini kita memiliki sejumlah gedung dan transportasi yang sebenarnya sudah dalam kondisi 80% tidak layak pakai. Kita juga tidak memiliki penguat sinyal, penyulingan air tawar dan solar shell.”

4.2.2 Analisis Sejauhmana Strategi Pengamanan Pulau Nipa Dapat Dijadikan sebagai Model Pengembangan Pulau-pulau Terluar Lainnya

Keamanan pulau-pulau terluar, selain terkait kepentingan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, keamanan pulau-pulau terluar juga menyangkut masalah harga diri bangsa. Dengan kesadaran ini, sebenarnya kebijakan pengamanan pulau-pulau terluar juga telah didukung oleh keberadaan wawasan nusantara yang mementingkan terwujudnya kemampuan dan kekuatan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini, dikaitkan dengan besarnya makna pulau-pulau terluar maka sesungguhnya perlu dirumuskan suatu sistem pertahanan dan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar yang terpadu, tidak hanya berupa penggelaran pasukan pengamanan perbatasan, melainkan juga harus mencakup gabungan langkah yang bersifat *preventif* dan *proaktif* melalui kebijakan dan strategi pertahanan di pulau terluar, yang mengabungkan dimensi keamanan, ekonomi, kesejahteraan dan lingkungan hidup. Kepentingan pertahanan dan keamanan di pulau terluar tidak hanya terpenuhi dengan pendekatan keamanan semata, saat ini pendekatan yang lebih penting dalam arti memberi manfaat dalam mewujudkan daya tangkal kekuatan pertahanan adalah pendekatan ekonomi dan kesejahteraan. Untuk membahas sub bahasan ini, peneliti akan menjabarkan dan menganalisa mengenai kebijakan dan arah strategi pengamanan di Pulau Nipa, pengembangan kawasan pertahanan di Pulau Nipa, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi.

4.2.2.1 Kebijakan dan Arah Strategi Pengamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Dalam teori A.T Mahan ada 6 elemen yang menjadi komponen kekuatan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar⁷⁶, salah satunya yaitu sikap pemerintah, artinya pemerintah memiliki peran untuk menjadikan bangsa yang besar dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan dan strategi

⁷⁶ Soewarso, *Masalah pengkajian tentang teori Perang*, Seskoal, Mei, 1983.

yang diterapkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hakikat pertahanan negara adalah “*segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada hak kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, serta pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.*” Dasar filosofi dan yuridis ini diterjemahkan ke bidang teknis kemiliteran secara konsisten, sistematis dan terukur, sehingga diperoleh bentuk strategi dasar (*basic strategy*) guna mempertahankan suatu ruang wilayah. Dengan demikian TNI berkewajiban menyelenggarakan upaya-upaya pertahanan negara dari semua bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar ditinjau dari segi maritim.

Indonesia mempunyai karakteristik geografis sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Untuk menjaga keutuhan NKRI, pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan antar negara harus dilakukan. Termasuk di dalamnya menetapkan strategi pertahanan negara yang tepat dengan memadukan kekuatan militer dan nirmiliter, berdasarkan pada visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa.⁷⁷ Mengacu pada visi dan misi tersebut, maka kebijakan Kementerian Pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar adalah sebagai berikut⁷⁸:

1. Meningkatkan kerjasama penanganan penyelesaian perbatasan RI dengan negara – negara tetangga dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki kerawanan cukup tinggi, seperti wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia, Indonesia – Singapura dan Indonesia – Vietnam.
2. Mendorong peningkatan kondisi sosial – ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan maritim dan pulau – pulau kecil terluar melalui

⁷⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang *Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia*

⁷⁸ <http://renhan.kemhan.go.id/files/jakhanneg2014.pdf>

- pembangunan sarana dan prasarana dasar, peningkatan kapasitas SDM, serta pemberdayaan aparatur pemerintah dan kelembagaan.
3. Mendukung pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebagai pusat pertumbuhan berbagai sumber daya alam lokal melalui pengembangan berbagai sektor serta kerjasama ekonomi antar negara.
 4. Mendorong peningkatan pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan maritim melalui pendekatan hukum dan pendekatan wilayah perairan perbatasan dengan cara melakukan patroli rutin.

Disamping kebijakan itu, kesejahteraan personel pengamanan perbatasan maritim juga perlu ditingkatkan. Untuk itu Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan tunjangan pengamanan khusus untuk satuan tugas yang menjaga pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan.⁷⁹ Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 mengenai tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pulau – pulau kecil terluar di wilayah perbatasan, yaitu: a) Sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau – pulau kecil terluar tanpa penduduk; b) Sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau – pulau kecil terluar berpenduduk; c) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan; atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas secara sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau – pulau kecil terluar.⁸⁰

Arah kebijakan pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar harus sudah berubah dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam menjadi keluar dengan tujuan mengelola pulau-

⁷⁹<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/183-diplomasi-februari-2013/1591-pengelolaan-perbatasan-mesinergikan-keamanan-dan-kesejahteraan.html>

⁸⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Tunjangan Operasi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan*.

pulau kecil terluar sebagai halaman depan negara. Selain menggunakan pendekatan keamanan seperti yang selama ini dilakukan, strategi pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar juga harus didekati dengan menggunakan pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan tentunya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pulau-pulau Kecil Terluar.

Menurut pendapat Direktur Pendayagunaan pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rido Miduk Sugandi Batubara, dalam wawancara tanggal 14 November 2014 mengatakan bahwa

“Perbatasan maritim adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah NKRI, meskipun sebagian wilayah perbatasan maritim di Indonesia masih terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi geografis ini juga seringkali mengakibatkan kesejahteraan masyarakat di pulau – pulau terluar masih rendah.”

Kolonel Laut (KH) Haris D. Nugroho berpendapat bahwa

“Sebagai pintu ke luar negeri, terdapat berbagai bentuk dan jenis ancaman serta pelanggaran yang bisa terjadi di wilayah pulau-pulau kecil terluar, baik militer maupun nirmiliter. Misalnya pelanggaran wilayah oleh kapal – kapal militer ataupun sipil dan berbagai bentuk kegiatan ilegal lainnya. Dengan kata lain, wilayah di halaman depan negara kita dengan mudah dimasuki oleh berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik yang terkait dengan aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, geologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, arah kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, khususnya di perbatasan maritim harus berorientasi outward looking. Paradigma tersebut diarahkan pada pengembangan pulau-pulau kecil terluar sebagai berada depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.”

Dengan demikian, selain dengan menggunakan pendekatan keamanan, sekarang ini juga dilengkapi dengan pendekatan kesejahteraan dan tentunya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Implementasinya tentunya juga harus disesuaikan dengan kondisi masing – masing wilayah perbatasan, sehingga apakah itu *security prosperity* atau kelestarian lingkungan yang harus dikedepankan.⁸¹

⁸¹<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/183-diplomasi-februari-2013/1591-pengelolaan-perbatasan-mesinergikan-keamanan-dan-kesejahteraan.html>

Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai upaya untuk membangun wilayah terdepan di Indonesia. Pulau – pulau kecil terluar itu perlu dikelola, karena sebagian besar PPKT merupakan kawasan tertinggal, tidak berpenduduk namun memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) PPKT memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, dan peran yang strategis untuk menjaga NKRI. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang, lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi.

Jika ditinjau dari aspek ekonomi, laut Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga secara geopolitik dan geostrategis sektor kelautan negeri ini menjadi elemen penting. Konflik teritorial masih menjadi isu penting. Masih banyak perbatasan maritim dengan negara tetangga yang belum disepakati secara jelas dan perlu pembicaraan lebih lanjut. Indonesia bahkan masih kesulitan menghadapi aktivitas ilegal yang melanggar wilayah perbatasan. Demi menjaga kedaulatan, Pemerintah Indonesia melakukan upaya geopolitik berupa penetapan Program Modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan Non Alutsista.

Menurut pendapat Direktur Pendayagunaan pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Rido Miduk Sugandi Batubara,

“Maka strategi pengelolaan pulau – pulau kecil terluar, adalah antara lain dengan; membuka simpul – simpul akses kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang internasional, meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau terutama di pulau – pulau terluar, melibatkan berbagai instansi dalam pemberdayaan pulau khususnya pulau-pulau Pemberdayaan berbagai instansi dalam pengelolaan pulau – pulau terluar, mensinergikan berbagai program ekonomi dan hankam di perbatasan maritim dan kepulauan, mengundang private sector participation dalam investasi untuk pengembangan pulau kecil (terutama di wilayah perbatasan), mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan kepulauan di perbatasan sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya, menjalin kerjasama dengan negara lain maupun lembaga swasta dalam konservasi hayati dan lingkungan di pulau – pulau terluar.”

Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terluar menjadi pintu gerbang keluar masuknya orang dan barang, sehingga rawan terhadap penyelundupan barang ilegal, narkoba, senjata dan obat – obatan terlarang. Menyadari peran penting dari pulau-pulau kecil terluar, sudah seharusnya kalau Pemerintah harus mulai mengembangkan dan memanfaatkannya. Dengan membuka akses pasar internasional pulau – pulau terluar, diharapkan potensi yang ada di masing – masing pulau dapat lebih diberdayakan. Seperti misalnya Pulau Nipa. Keberadaan pulau ini di jalur pelayaran internasional yang sangat ramai sehingga Pulau Nipa juga dibuka sebagai akses dalam perdagangan internasional. Pemberdayaan berbagai instansi dalam pengembangan pulau-pulau terluar juga sangat penting, karena pengembangan pulau merupakan masalah yang kompleks, sehingga dibutuhkan koordinasi dari masing-masing instansi/kementerian. Seperti misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ketika akan melakukan rehabilitasi ekosistem yang pulau terluar, pasti akan membutuhkan dukungan dan informasi dari Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, selain itu perlu menjalin kerjasama dengan negara lain maupun lembaga swasta dalam konservasi hayati dan lingkungan di pulau – pulau terluar.

4.2.2.2 Pengelolaan Kawasan Pertahanan di Pulau Nipa

Philipp Annawitt dalam *Geneva Centre for Security Policy* 2010, bahwa keamanan di tingkat lokal dengan sangat mudah akan mempengaruhi dan berdampak pada tingkat nasional dan seterusnya, sehingga pada akhirnya mengancam keamanan regional dan internasional.⁸² Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mahan bahwa dengan pengamanan dan penguasaan laut di pulau-pulau terluar dapat menyelamatkan sumber daya yang terkandung didalamnya

⁸² Phipipp Annawitt, *Geneva Papers, Global Security and Regional Responses: Conflict Management in a Fractured World* 2010 hal.11 dalam buku Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

disamping untuk menegakkan kedaulatan bangsa.⁸³ Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*), yang diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta yang akan merugikan kepentingan nasional melalui pengembangan kawasan pertahanan serta membangun kemampuan dan kekuatan TNI. Lingkungan laut atau maritim sedikitnya memiliki lima aspek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan dan menentukan strategi militer, yaitu : 1) Ekonomi. Kehadiran kapal-kapal perang di suatu perairan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi suatu negara. Alur-alur laut yang melewati suatu negara juga dapat digunakan oleh kekuatan asing untuk melindungi kepentingannya dengan alasan ekonomi, baik secara individu maupun secara gabungan. Dengan perkembangan ekonomi yang masih belum menggembirakan kemampuan anggaran untuk pertahanan masih kecil, $\pm 2\%$ PDB. Sampai dengan 25 tahun kedepan pun rancangan alokasi anggaran masih kecil sehingga penyiapan alutsista TNI masih belum memadai; 2) Politik. Lingkungan maritim senantiasa sarat dengan aspek politik, baik dalam maupun luar negeri. Politik dalam negeri sebuah negara kepulauan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintahan negara tersebut memberikan jaminan rasa aman dan keberlanjutan kehidupan di seluruh wilayahnya. Keberadaan kekuatan angkatan laut bagi negara kepulauan dapat digunakan untuk memperbesar opsi politik atau kepentingan lainnya; 3) Hukum. Salah satu produk hukum dalam lingkungan maritim adalah Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 membagi lingkungan maritim menjadi beberapa rezim-rezim laut. Dengan diberlakukannya UNCLOS 1982, membutuhkan penataan hukum nasional baik Indonesia maupun negara-negara lainnya yang telah meratifikasinya. Aplikasi strategi maritim dimana penyelenggaraannya perlu dukungan komponen pendukung dan

⁸³ A.T.Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, (New York:Dover Publications, Inc., 1987)

cadangan, legalitas formalnya belum ada, UU mobilisasi, UU komponen cadangan dan UU komponen pendukung belum ada; 4) Militer. Aspek militer dilaut secara inheren memiliki segi teknologi, sehingga profesionalisme Angkatan Laut suatu negara selalu dikaitkan dengan penguasaan dan penggunaan teknologi yang relevan dan muntakhir. Segi lain dari aspek militer menyangkut bertambahnya kebutuhan masing-masing Angkatan Laut untuk beroperasi bersama baik secara bilateral maupun multinasional. Secara nyata TNI AL masih terbatas alat sistanya, peralatan tempurnya yang modern sedikit jumlahnya belum mampu mengcover luas wilayah; 5) Lingkungan Fisik/Geografi. Pemahaman terhadap lingkungan fisik yang menyeluruh dimana kekuatan maritim akan beroperasi sangat penting, seperti kondisi geografi, hidro-oseonografi dan meteorologi. Daerah operasi kekuatan maritim mulai dari perairan dalam di laut bebas (*Blue Waters*), ke perairan yang lebih dangkal (*Green Waters*) , sampai ke perairan pantai, muara dan sungai (*Brown Waters*). Karakteristik fisik yang paling penting adalah posisi daratan yang berbatasan dengan laut, yang merupakan wilayah maritim. Pemahaman ini dimiliki oleh TNI AL, sebagian masyarakat namun *nature* pemerintah masih belum mendukung dengan konsep pembangunan yang *land based oriented*.

Upaya pengamanan Pulau Nipa secara fisik telah dilakukan oleh pemerintah dengan aktivitas reklamasi dan penempatan personel TNI Angkatan Laut. Jumlah personel TNI AL yang dikerahkan untuk menjaga pengamanan di Pulau Nipa adalah 14 orang. TNI Angkatan Laut juga rutin melaksanakan patroli di sekitar perairan Pulau Nipa yang bertujuan untuk mencegah serta mengamankan laut yurisdiksi nasional Indonesia dari pelanggaran laut. Berbagai pelanggaran laut yang terjadi di perairan Pulau Nipa adalah pencurian ikan oleh negara asing, serta sumber daya alam. Namun, penempatan pasukan di Pulau Nipa saat ini belum diimbangi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai. Misalnya kapal berupa speedboat yang tidak memadai untuk melakukan patroli di wilayah tersebut ataupun untuk melakukan pengejaran terhadap kapal yang

melakukan pelanggaran. Fasilitas lain yang belum tersedia adalah radar yang difungsikan untuk melakukan deteksi ataupun identifikasi obyek di laut dan udara di atasnya yang tidak dikenal atau dicurigai ketika sedang melakukan aktivitas di perbatasan perairan Indonesia.

Menurut Kasubdis Perbatasan Laut dan Udara Ditwilhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kolonel laut (KH) Haris D. Nugroho,

“Dari sisi pertahanan keamanan, di Pulau Nipa telah dibangun pangkalan TNI Angkatan Darat dan Marinir Angkatan Laut. Dari sisi ekonomi, telah disusun blueprint pengembangan Pulau Nipa untuk pembangunan oil storage dan transit anchorage area. Sedangkan dari sisi lingkungan, telah diperuntukkan laguna sekitar 6 ha untuk pengembangan kawasan mangrove.”

Hal ini diperkuat oleh pendapat Rido Miduk Sugandi Batubara, Direktur Pendayagunaan pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

“Khusus untuk Pulau Nipa, sebagai pulau yang tak berpenduduk, pengembangan Pulau Nipa mengacu pada misi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara, serta menciptakan stabilitas kawasan serta memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Pulau Nipa dalam rangka pembangunan berkelanjutan.”

Aspek-aspek utama yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan Pulau Nipa berdasarkan pertimbangan di atas adalah: 1) Pertahanan keamanan meliputi pembuatan pos jaga TNI AL, penempatan personil TNI di Pulau Nipa dan patroli rutin di perairan sekitar Pulau Nipa namun, penempatan pasukan di Pulau Nipa saat ini belum diimbangi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai. 2) Sumber daya alam, meliputi upaya-upaya untuk mengetahui secara rinci data dasar keseluruhan kekayaan sumber daya alam Pulau Nipa, antara lain dengan riset-riset yang dilakukan baik oleh tim dari DKP maupun BPPT namun sampai saat ini belum ada upaya pengelolaan secara kongkrit dilapangan. 3) Geografi, meliputi pembuatan jaringan perhubungan laut, darat dan

udara serta sarana telekomunikasi, antara lain dengan pembangunan *tower receiver* oleh PT Telkom.⁸⁴

4.2.2.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Ekonomi

Pegelolaan sumber daya alam dalam UNCLOS 1982 menciptakan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar (*baselin*) yang di pakai juga mengukur lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut. ZEE ini di kelola oleh negara – negara pantai dan negara kepulauan di manfaatkan secara eksklusif untuk kepentingan semua bangsa. dalam hal ini negara yang di tiitipi ZEE harus mengelola ZEE secara berkesinambungan. Dalam hal ini Indonesia memiliki hak kedaulatan untuk mengeksplorasi manfaat sumber daya hayati.⁸⁵

Komandan Pos TNI AL Pulau Nipa, Letda Laut (T) Asep Suryanda pada saat wawancara pada tanggal 7 November 2014 di Pulau Nipa mengatakan bahwa

“Wilayah perairan Pulau Nipa masih dimanfaatkan nelayan dari pulau - pulau di sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan dan budidaya ikan. Disamping itu, Pulau Nipa sendiri dimanfaatkan oleh nelayan sebagai tempat peristirahatan sementara dalam kegiatan penangkapan ikan dan tepat perlindungan jika terjadi badai di wilayah perairan sekitar Pulau Nipa.”

Kawasan perairan Pulau Nipa juga dimanfaatkan sebagai tempat labuh sementara (*transit anchorage*) yang kegiatan ini berlokasi di sisi barat dan sudah dimulai sejak lama (tahun 2002) baik secara legal (resmi) maupun ilegal (tidak resmi).

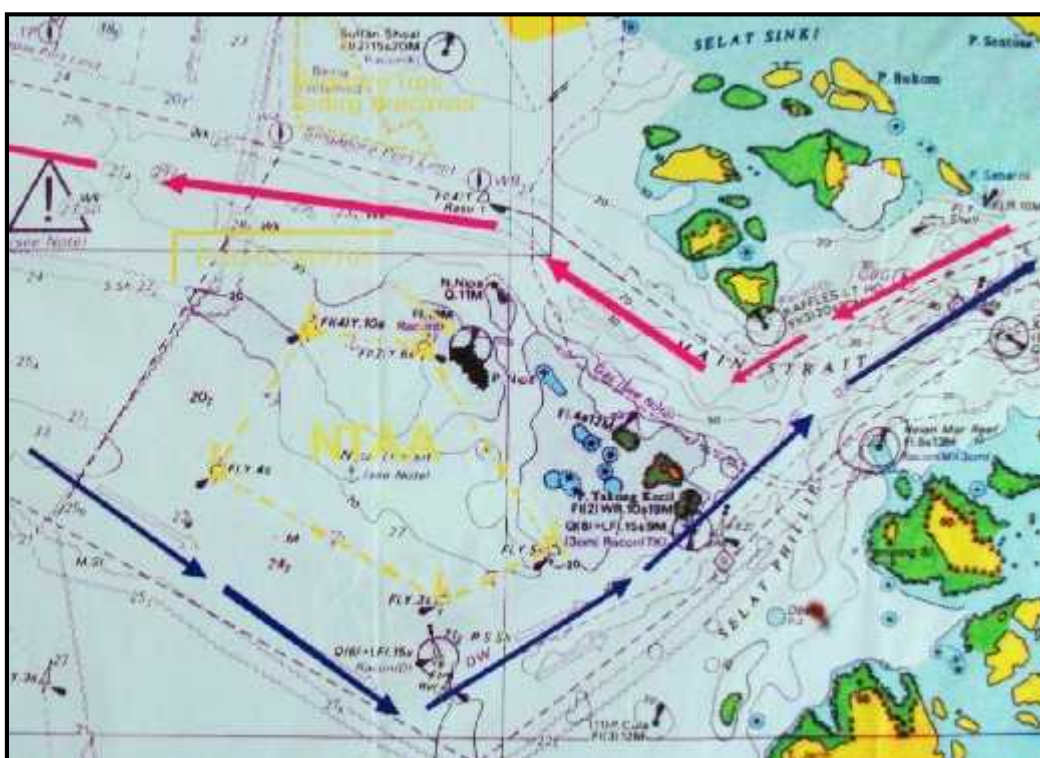
Secara ekonomi wilayah, posisi Pulau Nipa dapat menjadi penyedia jasa kelautan dengan memanfaatkan area tersebut untuk kegiatan *transit anchorage* (daerah lego jangkar) yang kegiatan ini berlokasi di sisi barat dan sudah dimulai sejak lama (tahun 2002) baik secara legal (resmi) maupun ilegal (tidak resmi) dan Pulau Nipa juga bisa digunakan sebagai penyedia jasa informasi atas monitoring lalu-lintas laut atau *Vessel Traffic System (VTS)*.

⁸⁴ Pengamatan langsung yang dilaksanakan peneliti di Pulau Nipa.

⁸⁵Kusumaatmadja Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1978,hal.173.

Lokasi *anchorage* tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 255 tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PU 60/1/19/DJPL-08 tanggal 2 Juni 2008 tentang prosedur operasional tetap (SOP) pengelolaan dan pengoperasian *Nipa Transit Anchorage Area (NTAA)*, seperti yang terlihat dalam gambar 4.7 berikut ini;

Gambar 4.7 Peta Nipa Transit Anchorage Area (NTAA)



Sumber: Lanal Batam, 2014

Selat Malaka adalah jalur perairan terpadat yang dilalui sekitar 70.000 kapal setiap tahunnya dan 20.000 di antaranya adalah kapal tanker. Kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka melakukan transit di pelabuhan Singapura untuk mengisi logistik sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Pada saat transit di pelabuhan Singapura sebagian besar kapal-kapal asing antre untuk sandar di pelabuhan. Sebelum sandar di pelabuhan (Singapura), kapal-kapal asing tersebut biasanya melakukan labuh sementara di perairan Singapura, dan tentu saja labuh sementara ini dikenakan biaya. Namun, karena perairan

Singapura sudah *crowded*, maka kapal-kapal asing tersebut besar kemungkinan akan bergeser ke perairan Pulau Nipa untuk melakukan labuh sementara (*transit anchorage*). Untuk lebih jelasnya jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka dan lalu lintas kapal di Pelabuhan Singapura dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3

Tabel 4.2 Tabel Lalu-lintas Kapal di Selat Malaka

Kapal/Tahun	2000	2001	2002	2003(%)
VLCC	3163	3303	3301	3487(5.6)
CHEMICAL	13343	14276	14591	15667(25.1)
LNG/LPG	2962	3086	3141	3277(5.3)
(total tangker)	19468	20665	21033	22431(36)
CONTAINER	18283	20101	20091	19575(31.4)
OTHERS	18206	18548	18910	20328(32.6)
TOTAL	55957	59314	60034	62334(100)
(per Day)	-(153)	-(163)	-(164)	-(153)
Surveyed by MD of Malaysia (more than 300 tons)				

Sumber : Surveyed by MD of Malaysia, Februari 2015

Tabel 4.3 Tabel Lalu-lintas Kapal di Pelabuhan Singapura

Kapal/Tahun	2000	2001	2002	2003(%)
Ferry	53029	52735	53209	49149(36.3)
Tug-barge	34846	33994	29699	27248(20.1)
Tanker	15885	16504	16919	17084(12.6)
Container	16971	17049	16418	16155(12.0)
Others	24652	25983	26500	25750(19.0)
TOTAL	1455383	146265	142745	135386(100)
(per day)	(397)	(401)	(391)	(371)
Surveyed by MPA of Singapore (more than 75 tons)				

Sumber : Surveyed by MD of Malaysia, Februari 2015

Dari data di atas, maka dapat disimpulkan, potensi yang dimiliki Selat Malaka membuat posisi Pulau Nipa menjadi sangat strategis. Dengan penerapan NTAA, kapal – kapal yang berlabuh dapat melakukan kegiatan:

- a. Alih muat kapal (*Ship to Ship*)
- b. Pencucian kapal (*Tank Cleaning*)
- c. Pencampuran bahan (*Blending*)
- d. Pengisian minyak atau air bersih (*Bunker*)
- e. Berlabuh jangkar untuk menunggu perintah (*Waiting Order*)
- f. Suplay logistik (*Laid up and ship chandler*)

Selain kegiatan di atas, perairan bawah laut sekitar Pulau Nipa juga dimanfaatkan sebagai jalur pipa gas yang membentang dari timur ke barat (Natuna – Pel. Jurong) serta jalur kabel yang membentang dari selatan ke utara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim

Koordinasi. Tim tersebut merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, "*Pulau Nipa akan dikembangkan sebagai kawasan sentra pertumbuhan ekonomi berbasis pertahanan.*"

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Cicip Sutardjo mengatakan;

*"selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melihat potensi ekonomi Pulau Nipa. Salah satunya berhubungan dengan posisi Pulau Nipa yang dekat dengan negara tetangga. Salah satu rencananya adalah dengan membangun tempat transit kapal (transit anchorage area)."*⁸⁶

Selanjutnya menurut Sharif Cicip Sutardjo;

*"KKP akan memanfaatkan 29 ha dari total 44 ha luar Pulau Nipa untuk percepatan pembangunan yang merupakan aset KKP. Sementara sisanya seluas 15 ha tetap diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan."*⁸⁷

Selain itu, di Pulau Nipa akan dibangun tangki bahan bakar dengan kapasitas 5 juta liter per bulan. Tiap harinya, dermaga Pulau Nipa akan dapat melayani 5 kapal dengan bobot seluruhnya 50 ribu ton. "Kami berharap kapal-kapal bisa transit di Pulau Nipah untuk membangun Pulau Nipah dan daerah sekitar," terang Cicip.

Tak hanya itu, KKP juga berencana menjadikan Pulau Nipa sebagai etalase produk perikanan serta fasilitas pengawasan dan pemanfaatan pulau – pulau kecil terluar. Jika terwujud, Pulau Nipa dapat

⁸⁶ <http://www.riapos.co/12066-berita-pemerintah-tawarkan-pulau-nipah-ke-investor.html>

⁸⁷ Ibid

menjadi daya tarik bagi turis asing maupun domestik yang ingin melihat aneka budidaya perikanan.

Mantan menteri pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mendukung rencana KKP di Pulau Nipa. Menurutnya, saat ini berkembang paradigma baru mengenai pulau – pulau kecil terluar yang bukan hanya dilihat dari kacamata keamanan, tetapi juga diperhatikan sektor ekonominya.

“Ini baik, karena ketahanan dapat timbul seiring pertumbuhan perekonomian,”⁸⁸

Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi. Pengelolaan wilayah negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa, sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Selain menggunakan pendekatan keamanan seperti yang selama ini dilakukan, strategi pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar juga harus didekati dengan menggunakan pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan tentunya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pulau-pulau Kecil Terluar.

⁸⁸ <http://www.riapos.co/12066-berita-pemerintah-tawarkan-pulau-nipah-ke-investor.html>

4.2.2.4 Kelayakan Strategi Pengamanan Pulau Nipa dijadikan Model Pengembangan Pulau-pulau Terluar Lainnya

Teori pengembangan wilayah terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Menurut Nugroho dan Danuri, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Program-program pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, budaya, dan keuntungan lokasi geografis strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Secara umum potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain adalah, letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan *illegal fishing*, jalur *illegal logging*, *illegal trading* dan *illegal trafficking*.

Belum optimalnya pengembangan wilayah perbatasan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan faktor lainnya. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Dinamika pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya masih tertinggal dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Kondisi ini akan menimbulkan ancaman terhadap integritas masyarakat

Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Masalah lain yang muncul, meski sudah disusun program dan kegiatan tetapi pada tahap pelaksanaan justru kurang optimal karena kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Pengamanan dan pengelolaan Pulau Nipa merupakan arahan kebijakan pemerintahan nasional. Kebijakan ini dinilai sangat tepat mengingat potensi yang dimiliki oleh Pulau Nipa serta memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi ladang bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya alam (*resources based industry*) seperti industri perikanan, industri kemaritiman dan industri lainnya sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pulau Nipa merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi perhatian khusus pemerintah dan juga merupakan kawasan strategis nasional tertentu serta terdapat titik dasar (*base point*) menurut PP No. 37 tahun 2008. Kawasan Pulau Nipa terletak pada zona strategis. Pulau Nipa sangat strategis karena posisi perairannya merupakan zona pembagi terhadap lalu-lintas laut internasional atau *Traffic Separation Schemes (TSS)*. Pulau Nipa mulanya telah berada dalam ancaman untuk tenggelam karena tidak diperhatikan. Seiring dengan posisinya yang amat vital bagi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka langkah kebijakan untuk mempertahankan fungsi strategis Pulau Nipa dilakukan dengan program reklamasi karena Pulau Nipa telah menjadi referensi *Traffic Separation Schemes*. Secara ekonomi wilayah, posisi Pulau Nipa dapat menjadi penyedia jasa kelautan dengan memanfaatkan area tersebut untuk kegiatan *transit anchorage* (daerah lego jangkar), dan sebagai penyedia jasa informasi atas monitoring lalu-lintas laut atau *Vessel Traffic System (VTS)*. Untuk menyediakan jasa informasi lalu lintas laut di Pulau Nipa, maka perlu ditingkatkan fasilitas rambu suar yang telah ada menjadi menara suar yang dijaga agar dapat meningkatkan pelayanan keamanan navigasi di sepanjang Selat Malaka.

Pengembangan Pulau Nipa ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan *defence supporting economy*

(pertahanan mendukung ekonomi). Kebijakan ini merupakan sebuah paradigma dimana daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang tadinya hanya ditangani oleh sektor keamanan nantinya juga akan dikembangkan untuk sektor ekonomi, dan itu akan meningkatkan ketahanan nasional. Pengamanan pulau-pulau terluar itu nantinya juga akan didukung oleh ketahanan ekonomi. Jadi, tidak hanya masalah pertahanan dan keamanan. Tapi akan ada pemanfaatan pulau terluar seperti Pulau Nipa, untuk kegiatan ekonomi yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara. Dengan adanya kegiatan ekonomi di pulau-pulau terluar seperti yang akan dilaksanakan di Pulau Nipa, diharapkan pulau-pulau terluar akan bisa menjadi lebih hidup dan menjadi zona ekonomi yang pada akhirnya dapat menghasilkan devisa negara.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian ini, peneliti akan menyatakan secara ringkas temuan-temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut ini:

5.1.1 Dinamika Pengamanan Pulau Nipa pasca dilakukannya Reklamasi

Strategi mempunyai *Means, Ways, Ends. ENds* merupakan tujuan yaitu mempertahankan kedaulatan. *Ways* dengan cara kehadiran. *Means* dengan memakai alutsista KRI, Marinir Pangkalan dan Pesawat udara. Kehadiran menunjukkan eksentensi TNI AL atau Indonesia di Pulau-pulau terluar (sebagai milik Indonesia). Sedangkan gelar operasi yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih adalah diplomasi angkatan laut dan kehadiran di laut (*Naval presence*) untuk melaksanakan strategi penangkalan, operasi siaga tempur laut dan operasi laut sehari – hari untuk melaksanakan strategi pengendalian laut. Pola operasi yang dilaksanakan adalah operasi, kehadiran di laut, operasi siaga tempur laut, operasi laut sehari – hari melibatkan KRI dan Kal serta pangkalan TNI AL.

Strategi pengamanan Pulau Nipa yang telah diuraikan di atas perlu dilakukan secara terpadu antar sektor. Pengamanan yang dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan, *monitoring*, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan institusi independen. Integrasi pembangunan wilayah perbatasan memerlukan penanganan dalam bentuk kemitraan sebab beban pembangunan tidak

dapat hanya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, dan institusi.

Secara umum terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan menyangkut permasalahan Pulau Nipa sebagai suatu wilayah perbatasan, yaitu aspek pengamanan dan aspek pengelolaan. Aspek pengamanan menyangkut bagaimana menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara, serta menciptakan stabilitas kawasan. Sedangkan aspek pengelolaan menyangkut bagaimana wilayah perbatasan negara dikelola dengan suatu kebijakan yang jelas dan terarah.

Dua aspek tersebut bersifat saling menguatkan sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya aspek pengamanan yang kuat terhadap Pulau Nipa, pengelolaan yang dilakukan dapat menjadi sia-sia atau bahkan dapat menjadi bumerang karena tanpa di dasari aspek pengamanan yang kuat dapat menjadi peluang bagi terjadinya kegiatan ilegal atau terjadinya tindakan pidana dan dapat menjadi peluang bagi negara yang berbatasan untuk menyengketakannya.

Begitu juga sebaliknya, tanpa adanya pengelolaan yang berkesinambungan, pengamanan terhadap Pulau Nipa akan menjadi susah dan berat. Karena tanpa adanya tindakan pengelolaan, berarti potensi-potensi yang dimiliki Pulau Nipa tidak dapat tergali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penguatan terhadap kedua aspek tersebut harus dilakukan secara bersamaan dibawah satu payung kebijakan.

Untuk mengakomodasi dua aspek utama dalam permasalahan Pulau Nipa tersebut diperlukan koordinasi yang solid antar lembaga yang terkait. Strategi pengamanan dalam konteks keutuhan wilayah menyangkut dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan juga ketahanan lokal. Hal ini selaras dengan teori strategi maritim dalam konteks geopolitik dan wawasan nusantara dimana Pulau Nipa merupakan wilayah yang memiliki arti ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan serta memiliki

posisi strategis sebagai pagar dan beranda terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya mempertahankan Pulau Nipa secara fisik telah dilakukan oleh pemerintah dengan aktivitas reklamasi dan penempatan personel TNI Angkatan Laut. Oleh sebab itu, mempertahankan eksistensi Pulau Nipa adalah langkah konkrit pemerintah dan selanjutnya perlu dilakukan aktivitas dalam rangka memperkuat justifikasi kepemilikan kita terhadap pulau tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan pengamanan yang sudah ada, mengingat pengamanan pulau Nipa tidak sekedar laut tetapi juga menjaga wilayah darat Pulau Nipa itu sendiri. Dengan wilayah pengamanan yang luas, harus ada penambahan jumlah personel yang meliputi semua unsur di dalam TNI AL. Misalnya dengan penempatan pasukan marinir untuk menjaga teritori darat dan anti terorisme serta pasukan TNI AL yang menjaga wilayah perairan Pulau Nipa.

Langkah konkrit berikutnya yang dapat dilakukan di Pulau Nipa adalah pengembangan ekonomi di Pulau Nipa sesuai dengan *blueprint* awal rencana pengembangan kawasan ekonomi. Kawasan ekonomi ini akan dapat diwujudkan dan berjalan lancar jika didukung dengan sektor pertahanan yang kuat. Disinilah terlihat kepentingan nasional terhadap pengembangan Pulau Nipa yang mempunyai dampak positif, secara pertahanan keamanan Pulau Nipa dapat digunakan sebagai basis pemantauan keamanan di wilayah perbatasan, secara ekonomi sebagai sumber devisa negara. Setelah kawasan Pulau Nipa berubah menjadi kawasan ekonomi berbasis pertahanan, maka secara tidak langsung akan memiliki dampak sosial diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja baru. Sementara dampak paling akhir adalah dari segi politik, dimana kejelasan batas wilayah antara Indonesia dan Singapura dapat tetap dipertahankan.

5.1.2 Strategi pengamanan Pulau Nipa sebagai Model Pengembangan Pulau-pulau terluar lainnya

Strategi pengamanan dalam konteks keutuhan wilayah menyangkut dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan juga ketahanan lokal. Hal ini selaras dengan teori strategi maritim dalam konteks geopolitik dan geostrategis dimana wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan wilayah yang memiliki arti ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan beranda terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pulau-pulau Kecil tidak hanya menyimpan potensi kekayaan alam yang dapat menyumbang untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pulau-pulau kecil. Segudang permasalahan juga disandang pulau-pulau kecil, seperti sarana dan prasarana yang kurang serta jauh dari *mainland*, persediaan air tawar yang sangat terbatas. Hal serupa juga terjadi untuk pulau-pulau kecil terluar. Selain memiliki permasalahan yang sama dengan pulau-pulau kecil yang lain, pulau-pulau kecil terluar juga memiliki permasalahan yang lebih kompleks terkait dengan posisi geografisnya, yaitu masalah politik, pertahanan dan keamanan. Sementara sebagai titik dasar pengukuran garis batas wilayah negara, pulau – pulau kecil terluar juga rawan terhadap penyelundupan dan lain – lain.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi suatu kebijakan sebagai pijakan dalam pengelolaan Pulau-pulau Kecil khususnya Pulau-pulau Kecil terluar yang telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2005 dalam bentuk Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005. Kebijakan ini selain sebagai penegasan komitmen pemerintah, juga merupakan *giant step* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya pulau-pulau kecil terluar.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, menurut peneliti setidaknya terdapat dua perbedaan mendasar untuk membedakan tipologi pengamanan pulau-pulau kecil terluar, yaitu untuk yang berpenduduk dan tidak berpenduduk. Untuk pulau-pulau kecil terluar yang

tidak berpenduduk, dimensi pertahanan dan keamanan menjadi prioritas utama. Bagaimana meningkatkan peran TNI sebagai aparaturnya penjaga perbatasan negara, dilengkapi fasilitas yang memadai seperti air bersih, listrik dan tentunya sarana dan prasarana keamanan seperti alutsista atau speedboat berkemampuan tinggi untuk mengawasi kegiatan ilegal seperti penyelundupan, pencurian kekayaan sumber daya alam dan lainnya. Lebih jauh, untuk Pulau-pulau kecil terluar tidak berpenduduk dapat diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi yang sifatnya terbatas dan tentunya berwawasan lingkungan.

Untuk pengamanan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, akan menjadi lebih kompleks karena adanya aktivitas masyarakat yang dominan di atasnya. Pendekatan pengamanan tidak hanya pertahanan dan keamanan semata, tetapi juga menitik beratkan kepada pendekatan sosial ekonomi dan lingkungan. Semuanya harus saling bersinergi dalam pendekatan pengamanan, yang tentunya tidak hanya memiliki fungsi keamanan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pelayanan dasar seperti akses pendidikan dan kesehatan harus dipenuhi. Infrastruktur dasar seperti pelayanan keperintisan antar pulau perlu ditingkatkan baik intensitasnya maupun kualitasnya, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi dan juga bahan bakar minyak.

Pembelajaran dari Strategi Pengamanan di Pulau Nipa yaitu dengan penempatan personel TNI AL sebagai aparaturnya penjaga perbatasan negara, yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti air bersih, listrik dan tentunya sarana dan prasarana keamanan seperti Alutsista atau *speedboat* berkemampuan tinggi yang dapat mencegah kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan, pencurian kekayaan sumber daya alam dan lainnya. Strategi itu juga sekaligus dapat membantu mencegah munculnya klaim dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan pulau-pulau kecil terluar.

Sementara rencana pengembangan kawasan ekonomi di Pulau Nipa, seperti rencana pembuatan *transit anchorage* segera dilaksanakan

dengan tetap menggunakan kebijakan *defence supporting economy* (pertahanan mendukung ekonomi). Sehingga kebijakan *defence supporting economy* (Pertahanan mendukung ekonomi) dapat menjadi model pengembangan untuk pulau-pulau kecil terluar lainnya yang memiliki potensi tidak hanya untuk kepentingan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukkan kedaulatan ekonomi nasional dan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi kebijakan dan strategi pengamanan wilayah perbatasan khususnya untuk Pulau Nipa adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan penempatan satuan pengamanan juga seyogyanya sesuai dengan strategi pertahanan. Penempatan personel TNI AL di Pulau Nipa adalah untuk menjaga wilayah Pulau Nipa, baik darat maupun laut, dari berbagai ancaman dan bahaya yang mungkin ada. Ancaman dan bahaya bisa berasal dari dalam (alam dan/atau manusia) serta dari luar (klaim negara tetangga). Untuk itu seyogyanya tersedia alokasi anggaran yang memadai bagi pembiayaan operasi pengamanan wilayah perbatasan agar operasi rutin dapat dilakukan untuk mengamankan wilayah terluar Indonesia.
2. Pemanfaatan sumber daya di Pulau Nipa sebaiknya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu perlu adanya pengalokasian anggaran khusus di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota yang memadai untuk pembangunan, sehingga target untuk membentuk kawasan pertahanan, kawasan ekonomi dan kawasan wisata di Pulau Nipa bisa tercapai. Salah satunya dengan penetapan prioritas pembangunan infrastruktur.
3. Seyogyanya pemerintah memprioritaskan dukungan sarana transportasi yang mampu menembus medan sulit di darat dan di laut yang akan sangat membantu tercapainya keberhasilan pengamanan

perbatasan. Dengan terbukanya jalur transportasi tentunya akan membuka juga peluang untuk perputaran roda perekonomian.

4. Seyogyanya ada penataan peraturan perundang-undangan dan kewenangan di setiap institusi terkait untuk mencapai sinergitas pembangunan di pulau-pulau terluar.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abubakar, Mustofa. (2006). *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*. Jakarta: Kompas.
- Agoes, ETTY R. (2003). *Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan dalam Mengisi Wawasan Nusantara dalam Hukum dan Pemberdayaan*, Edisi Khusus Dies Natalis UI Ke 53. Jakarta: FHUI.
- A.T.Mahan. (1987). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. New York: Dover Publications, Inc.
- Bryson, John M. (2011). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi*. Jakarta: Pusaka Pelajar.
- Buntoro, Kresno. (2014). *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Clark G. Reynolds (1984), *Command of the Sea: The History and Strategy of maritime Empires, Book II*, Florida, U.S.A: Krieger Pub Co.
- Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. (2009). *92 Pulau Terluar Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Geoffrey Till. (2010) *Seapower: A Guide for the Twenty First Century, Second Ed*. New York: Routledge.
- Grant, Robert M. (1999). *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Hamel, Gary and Prahalad. (1995). *Kompetensi Masa Depan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Herry, Setianegara. (2015). *Strategi Maritim*. Jakarta: Seskoal.
- Ife, Jim. (1995) *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Iswinardi. (2009) *Tata Ruang Negara Kepulauan Untuk Pengelolaan Pertahanan Negara*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma.

- Kamaludin, L. M. (2005) *Indonesia Sebagai Negara Maritim dari Sudut Pandang Ekonomi*. Malang: UMM.
- Kartikasari, Wahyuni. (2010). *Mengurai Pengelolaan Perbatasan di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1985). *Bunga Rampai Hukum Laut, Kumpulan Karangan*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan.
- _____. (1978). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Marrus, Stephanie K. (2002). *Building The Strategic Plan: Find Analyze and The Right Information*, USA: Wiley.
- Moleong, J. Lexy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2004). *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia*. Jakarta: Tiga Putra Utama.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Danuri. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Paret, Peter. (1986). *Maker of modern strategy from Machiavelli to The nuclear age* Princeton: Princeton Univ.press.
- Pranaka, AMW. (2002). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Prasetyono, Teo Tri (2009). *Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terluar Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Pusat Bahasa, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, Minto. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo.
- Rangkuti, Freddy. (1997). *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ras, Abdul Rivai. (2001). *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik, Sudut Pandang Indonesia*. Jakarta: APSINDO
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: PT. Alfabeta. Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumarsono, et al. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyono, S.K. (2007). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Yayasan Senapati Nusantara.
- Wanadri. (2011). *92 Pulau Terluar Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Wan Usman. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI.
- Willard, James E. (2006) *“Military Diplomacy : An essential tool of foreign policy at the thatre strategic level”*. Kansas: School of Advance Military Studies, US Army Command and General Staff College Fort Leavenworth.
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jurnal Ilmiah

- Dahurim Rokhmin. *Ekonomi Kelautan dimulai dari Pulau Terluar*. Diakses melalui <http://jurnalmaritim.com/2014/2/1821/rokhmin-dahuri-ekonomi-kelautan-dimulai-dari-pulau-terluar> pada tanggal 20 September 2014
- Desriani dan Faisyal Rani. (2013). *Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia Terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur di*

Provinsi Riau), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Jaelani, Lalu Muhamad. (2006). *Pulau – Pulau Terluar dan Batas NKRI*. Diakses melalui <http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/774> pada tanggal 20 September 2014.

Nugroho, M. Ali. (1984) *Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka Dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional)*, Pengkajian Katahanan Nasional, Universitas Indonesia.

Richarunia, Wenny Ikhtiari. (2011) *Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus : Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Salim. *Poros Maritim Dunia Dapat Dijadikan Grand Strategi Pertahanan Maritim, dalam Pusat Kajian Maritim Seskoal*. Diakses melalui: <http://jurnalmaritim.com/2014/2/1771/poros-maritim-dunia-dapat-dijadikan-grand-strategy-pertahanan-maritim> pada tanggal 24 September 2014.

Sasmini. (2007) *Strategi Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar Oleh Pemerintah Indonesia (Analisis Berdasarkan UNCLOS 1982)*. Dalam Tabloid Yustisia edisi nomor 71 Mei-Agustus 2007.

Soewarso. (1983). *Masalah Pengkajian tentang Teori Perang*. Jakarta: Seskoal.

Sunaryo, *Deklarasi Djuanda dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan*, dalam Tabloid Forum Hukum Vol4 No. 4-7, hal 76-78.

Susanto, Bambang. (1984), *Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia*. dalam Indonesian Journal of International Law. Diakses melalui <http://jurnalmaritim.com/2014/1/1603/kolinlamil-siagakan-lima-kri-amankan-pulau-pulau-terluar> pada tanggal 24 Februari 2015.

Wahyono. (1991) *Geopolitik dan Geostrategi RI untuk PJPT II dalam rangka Implementasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Lemhanas.

Artikel, Majalah, Surat Kabar

Buletin Dishidros TNI AL. (2004). *Pulau – Pulau Terluar Indonesia*. Edisi 1/III Tahun 2004.

Riau Pos. (2012). *Pemerintah Tawarkan Pulau Nipah ke Investor*. Diakses melalui <http://www.riaupos.co/12066-berita-pemerintah-tawarkan-pulau-nipah-ke-investor.html>.

Republika Online. (2012). *Pulau Nipah Jadi Model Pengembangan Pulau Terluar*. Diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/06/m3lanh-pulau-nipah-jadi-model-pengembangan-pulau-terluar>.

RMOL. (2014). *Sri Sultan HB X: Strategi Maritim Solusi Kejayaan Indonesia*. Diakses melalui <http://www.rmol.co/read/2014/05/13/154985/Sri-Sultan-HB-X:-Strategi-Maritim-Solusi-Kejayaan-Indonesia->.

Suara Pembaruan. (2009). *Mencermati Hubungan Indonesia – Malaysia* diakses melalui <http://www.ui.ac.id/download/kliping/Mencermati-hubungan-Indonesia-Malaysia.pdf>.

Tabloid Diplomasi. (2013). *Pengelolaan Perbatasan Mensinergikan Keamanan dan Kesejahteraan*. Diakses melalui <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/183-diplomasi-februari-2013/1591-pengelolaan-perbatasan-mesinergikan-keamanan-dan-kesejahteraan.html>.

_____. (2013). *Pengelolaan Perbatasan: Mensinergikan Keamanan dan Kesejahteraan*. Diakses melalui <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/183-diplomasi-februari-2013/1591-pengelolaan-perbatasan-mesinergikan-keamanan-dan-kesejahteraan.html>.

Wilayahpertahanan.com. *Pertahanan di Pulau – Pulau Kecil Terluar*. Diakses melalui <http://www.wilayahpertahanan.com/kepentingan-pertahanan-di-perbatasan-konsep-safety-belt/>

WilayahPerbatasan.com. *Pulau – Pulau Perbatasan RI – Singapura Kian Hilang, Belajar dari Reklamasi Pulau Nipah*. Diakses melalui <http://www.wilayahperbatasan.com/pulau-pulau-perbatasan-ri-singapura-kian-hilang-belajar-dari-reklamasi-pulau-nipah/>.

Siaran Resmi

Badan Informasi Geospasial. (2010). *Perbatasan Negara Perlu Ditangani Secara Intensif dan Terpadu*. Diakses melalui <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/perbatasan-negara-perlu-ditangani-secara-intensif-dan-terpadu>.

Destructive Fishing Watch Indonesia. (2014). *Manifesto Maritim Hebat*. Diakses melalui <http://dfw.or.id/manifesto-maritim-hebat/>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Strategi Maritim: Jalan Menuju Jaya*. Diakses melalui <http://www.kkp.go.id/stp/index.php/arsip/c/753/STRATEGI-MARITIM-Jalan-Menuju-Jaya/>.

Kementerian Luar Negeri. *KBRI Singapura : Kunjungan Presiden SBY ke Singapura*. Diakses melalui: <http://www.kemlu.go.id/singapore/Lists/EmbassiesNews/DispForm.aspx?ID=75&ContentTypeld=0x0100574B2B380123F5488597FB3B64A2C806>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Wamenhan RI Kunjungi Pulau Nipa di Batam*. Diakses melalui <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=246>

Peraturan Perundang–Undangan dan Instrumen Hukum Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea 82 (UNCLOS 82). 1982.

Indonesia. (2004). *UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Indonesia. (2007). *UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*

Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden No. 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014*.

Indonesia. (2005) *Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*.

Indonesia. (2011). *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI, *Strategi Pertahanan Negara*.

Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau – Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan*.

Indonesia. (2014). *Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/25/M/II/2014 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014*. Diakses melalui <http://renhan.kemhan.go.id/files/jakhaneg2014.pdf>.



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/1727/M/XI/2010
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : *Blueprint* Zona Pertahanan
Pulau Nipa.

Jakarta, 15 November 2010

Kepada

Yth. Menteri Koordinator Politik
dan Keamanan

di

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-145/MK.6/2010 tanggal 10 Juni 2010 hal Persetujuan pengalihan status penggunaan BMN berupa tanah, bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang terletak di Pulau Nipa.
 - b. Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara di Pulau Nipa Dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Pertahanan Nomor : 08/BA/M/2010 dan Nomor : BA/26/M/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan *Blueprint* Pulau Nipa untuk zona Utara/Pertahanan seluas 15 Ha adalah sebagai berikut :
 - a. Area Pos TNI seluas 5 Ha dan Area pemanfaatan seluas 10 Ha.
 - b. Rincian Zona Utara/Pertahanan diuraikan dalam *Blueprint* pada lampiran surat ini.
3. Demikian untuk menjadi periksa.



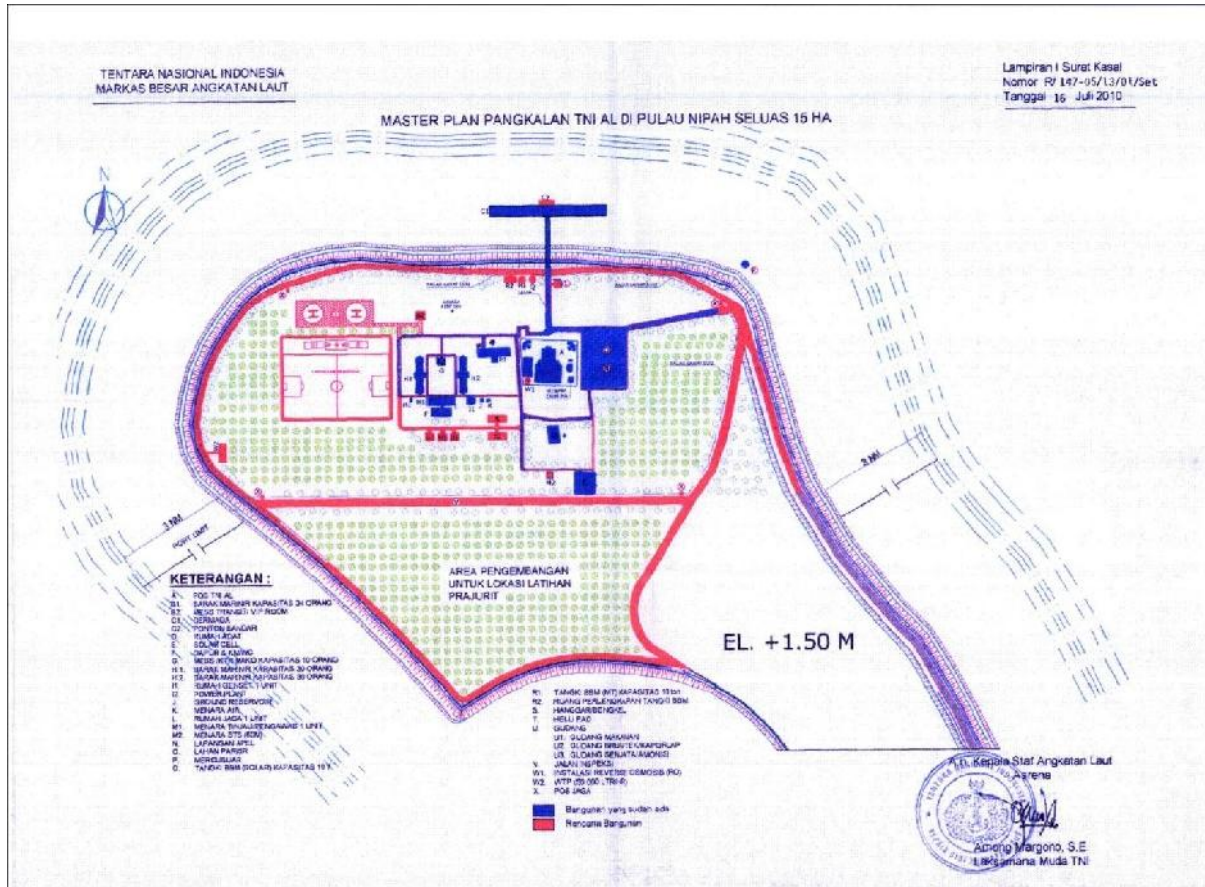
Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Men KP
2. Wamenhan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Dirjen Kuathan Kemhan
6. Dirjen Ranahan Kemhan.

Sumber : Kementerian Pertahanan RI



Sumber: Kementerian Pertahanan RI

DAFTAR MATERIAL POS TNI AL PULAU NIPA

NO	MATERIAL	JUMLAH	KEADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	SENPI DAN AMONISI			
1	Pistol FN-46	1 pucuk	Baik	Inventaris Dinas
2	Amunisi Pistol FN-46 Call 9 mm	10 butir	Baik	Inventaris Dinas
3	AK 47 Call 7,65 mm (PA0393K)	30 butir	Baik	Inventaris Dinas
	ALAT APUNG			
1	Speed Boat (Panjang 8 M)	1 buah	Rusak Ringan	Pinjaman PT. Maxteer Kondisi body speed 50%
2	Motor tempel Merk Yamaha 85 PK	1 buah	Baik	Bantuan dari Pemda Batam
	ALAT DETEKSI			
1	Teropong	1 unit	Rusak Ringan	Inventaris Dinas
2	Teropong Swarovski	1 unit	Rusak	Pengadaan Dispamal
3	Teropong malam (NO/LRB-7 Gen.3) S/N : 486171	1 unit	Baik	Inventaris Dinas
4	Kamera Digital merk Nikon D70	1 unit	Rusak	Pengadaan Dispamal
	ALAT KOMUNIKASI			
1	-TRX HF SSB125 WATT MICOM 3F - DC PSA Swallow SP-3500 - ANTENA BROAD BAND B&W	1 unit	Baik	Pengadaan Diskomlekarmabar
2	-TRX VHF FM MB BS ICOM IC-M 604 DC PSA Swallow SP-3500 -ANTENNA SHIPE SHAKESPEAR 425 USA	1 unit	Baik	Pengadaan Diskomlekarmabar
3	- TRX VHF FM HT ICOM IC-M 36	2 unit	Baik	Pengadaan Diskomlekarmabar

	- BATTERY CHARGER			
4	- TRX VHF AM GTA 10 WATT JOTRON TR-810 DESKTOP VERSION - POWER SUPPLY AC/DSW/CONNECTOR - ANTENA CX L-31 LW	1 unit	Baik	Pengadaan Diskomlekmabar
5	- Antena VSAT diameter 1,8 M - HN7700-S	1 set 1 set	Baik	Pengadaan Puskodal Mabesal tanggal 4 Juni 2012 (No. BAST.131089/TEC- SCM/V/12)
6	SOLLAR CELL INVERTER 500 VA BATTERY 12 V DC 120 AH	1 unit	Baik	Pengadaan Diskomlekmabar
7	HT Motorola	4 unit	3 Baik, 1 Rusak	Pengadaan Dispamal
9	TRX HF SSB ICOM IC M 700 PRO No seri 002061	1 unit	Baik	Pinjaman Lantamal IV
10	Power Supply SP-3500	1 unit	Baik	Pinjaman Lantamal IV
11	Kabel Coaxial RG-8	1 unit	Baik	Pinjaman Lantamal IV
12	Battery Charger 15 A merk Matsugamma	1 unit	Rusak	Pinjaman Lantamal IV
13	Accu merk G- Force type 190 H52/ N200 12 V- 200AH	1 unit	Baik	Pinjaman Lantamal IV
14	TRX HF SSB MICOM 3T/RM 500 ANTENNA BROAD BAND B&W	1 unit	Baik	Pengadaan Mabes TNI
	PERALATAN LAIN DI POS			
1	Komputer PC Merk LG	1 unit	Baik	Inventaris dari PT. Telkomsel
2	Printer merk HP	1 unit	Rusak	Inventaris dari PT. Telkomsel
3	Telephon meja flexi merk Saebo	1 unit	Baik	Inventaris dari PT. Telkomsel

4	PSWT FAX MERK EVAFAX	1 unit	Baik	Inventaris dari PT. Telkomsel
5	Tape Recorder	1 unit	Rusak	Inventaris Dinas
6	Televisi	2 unit	1 Baik 1 Rusak	Inventaris Dinas
7	Kulkas	1 unit	Baik	Inventaris Dinas
8	Sepeda Motor roda tiga merk Kaisar	3 unit	3 Rusak	- Pengadaan Dephan 2 unit (2 unit berada di Lanal Batam dan 1 unit sedang dalam perbaikan). - Bantuan dari Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri 1 unit (kondisi rusak).
9	Sepeda Motor roda dua merk Suzuki Thunder EN 125 CC	2 unit	Baik	Bantuan dari Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri
10	Sepeda Motor roda dua merk Suzuki Smash Titan	4 unit	Baik	Bantuan dari Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri 4 (empat) unit 2 (dua) unit di Posal dan 2 (dua) unit dititipkan di Disbek Lantamal IV/TPI.
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK				
1	Solar Shell	1 unit	Baik	Inventaris dari Pemko
2	Solar Shell/Pembangkit Listrik tenaga Hybrid 10 Kwp dan Wind 4 Kva	1 unit	Rusak	Pengadaan Kementrian ESDM
1	2	3	4	5
3	Diesel Generator 65 KVA FG Wilson	1 unit	Rusak	Inventaris Dinas
4	Diesel Generator 250 KVA FG Wilson	1 unit	Baik	Inventaris Dinas
5	Diesel Genset Dong Feng 10 KW	1 unit	Rusak	Pengadaan Fasharkan Mentigi
6	Diesel Genset AM 2200 L 1,2 KW	1 unit	Rusak	Inventaris Dinas
PERALATAN LAIN-LAIN				

1	RO (Reverse Osmosis)	1 unit	Perbaikan di Fash MGI	Pengadaan BPPT
2	RO (Reverse Osmosis)	1 unit	Baik	Pengadaan Disfaslanal Mabasal
3	Pompa/Filter penyulingan air	1 unit	Baik	Pengadaan Fasharkan Mentigi. Hasil dari penyulingan tidak maksimal.
4	Desalinasi (Alat penyulingan air laut dirubah menjadi air bersih siap minum)	1 unit	Baik	Pengadaan dari KKP Pusat

Sumber: Posal Pulau Nipa

DAFTAR KAPAL PERANG YANG TERDETEKSI DI MAIN STRAIT

BULAN MEI 2013

NO.	TGL WAKTU	KAPAL PERANG						GIAT
		NAMA	NO. LAMB	JENIS	BEND	HAL	CPT	
1.	0501.0914	RSS SOPERINT	84	PCM/PGM	SING	T – B	10	PATROLI
2.	0501.1011	RSS JUSTICE	85	FSGM	SING	T – B	9	PATROLI
3.	0502.1004	RSS RESOLUTION	L208	LPDM	SING	T – B	9	PATROLI
4.	0502.1014	RSS ENDEAVOUR	L 209	LPDM	SING	T – B	8	PATROLI
5.	0503.0930	RSS BERAWE	95	PCM/PGM	SING	T – B	11	PATROLI
6.	0504.1015	RSS VALIANT	91	FSGM	SING	T – B	8	PATROLI
7.	0504.1230	RSS BEDOK	M 105	MHC	SING	T – B	10	PATROLI
8.	0504.1410	RSS JUSTICE	85	FSGM	SING	B – T	9	PATROLI
9.	0506.1030	RSS FREEDOM	86	PCM/PGM	SING	B – T	12	PATROLI
10.	0506.1100	RSS VIGOUR	92	PCM/PGM	SING	B – T	14	PATROLI
11.	0507.1330	RSS SOPERINT	84	PCM/PGM	SING	B – T	10	PATROLI
12.	0508.0904	RSS INDEPENDENCE	87	FSGM	SING	T – B	9	PATROLI
13.	0508.0907	RSS GALLANT	97	PCM/PGM	SING	B – T	10	PATROLI
14.	0510.0830	RSS VEGEANCE	93	PCM/PGM	SING	T – B	11	PATROLI
15.	0510.0915	RSS INDEPENDENCE	87	FSGM	SING	T – B	9	PATROLI
16.	0511.0940	RSS VIGOUR	92	PCM/PGM	SING	T – B	12	PATROLI
17.	0511.1105	RSS FEARLESS	94	PCM/PGM	SING	T – B	12	PATROLI
18.	0512.1010	RSS DARING	98	PCM/PGM	SING	T – B	13	PATROLI
19.	0512.1125	RSS VEGEANCE	93	FSGM	SING	T – B	8	PATROLI
20.	0513.0855	RSS JUSTICE	85	FSGM	SING	B – T	8	PATROLI
21.	0513.1018	RSS KALANG	M 106	MHC	SING	T – B	8	PATROLI
22.	0514.1600	RSS JUSTICE	85	FSGM	SING	T – B	9	PATROLI
23.	0515.1012	RSS FEARLESS	94	PCM/PGM	SING	T – B	12	PATROLI
24.	0515.1500	RSS SOPERINT	84	PCM/PGM	SING	T – B	12	PATROLI
25.	05161409	RSS SOPERINT	84	PCM/PGM	SING	T – B	10	PATROLI
26.	0516.1330	<i>Tidak Terdeteksi</i>	L 903	-	-	T – B	14	LINTAS
27.	0517.1031	RSS BEDOK	M 105	PCM/PGM	SING	T – B	11	PATROLI
28.	0517.1040	RSS GALLANT	97	PCM/PGM	SING	B – T	11	PATROLI
29.	0517.1050	LEKIU	30	FFGHM	MAS	T – B	14	LINTAS
30.	0519.1040	RSS INDEPENDENCE	87	FSGM	SING	T – B	9	PATROLI
31.	0520.1224	RSS ENDURANCE	L 207	LPDM	SING	T – B	9	PATROLI
32.	0520.1351	RSS KALANG	M 106	MHC	SING	T – B	8	PATROLI
33.	0520.1440	RSS BEDOK	M 105	MHC	SING	T – B	9	PATROLI
34.	0521.1014	RSS BERAWE	95	PCM/PGM	SING	B – T	10	PATROLI
35.	0521.1014	RSS VIGOUR	92	PCM/PGM	SING	B – T	12	PATROLI
36.	0523.1400	RSS VEGEANCE	93	FSGM	SING	T – B	9	PATROLI
37.	0523.1444	RSS DARING	98	PCM/PGM	SING	B – T	10	PATROLI
38.	0524.1513	<i>Tidak Terdeteksi</i>	P 62	-	-	B – T	14	LINTAS
39.	0525.1000	MUHAMIRU	11	-	MAS	T – B	14	LINTAS
40.	0525.1106	MOBILE BAY	53	-	USA	T – B	14	LINTAS
41.	0525.1109	XMITZ	68	-	USA	T – B	14	LINTAS
42.	0526.1012	RSS SOPERINT	84	PCM/PGM	SING	B – T	12	PATROLI
43.	0527.1001	RSS VIGOUR	92	PCM/PGM	SING	T – B	11	PATROLI
44.	0528.0945	RSS GALLANT	97	PCM/PGM	SING	B – T	10	PATROLI
45.	0530.1012	RSS SOPERINT	84	PCM/PGM	SING	B – T	11	PATROLI
46.	0531.1001	RSS VIGOUR	92	PCM/PGM	SING	T – B	10	PATROLI

Sumber : Posal Pulau Nipa

DETEKSI PESAWAT TEMPUR

BULAN MEI 2013

NO.	TGL WAKTU	PESAWAT				GIAT
		JENIS	JLH	NEGARA	HAL	
1.	0503.0800	F16	1	SING	B – T	LATIHAN
2.	0506.1140	F16	2	SING	T – B	LATIHAN
3.	0507.1210	F16	2	SING	B – T	LATIHAN
4.	0508.1415	F16	1	SING	B – T	LATIHAN
5.	0510.1055	F16	2	SING	B – T	LATIHAN
6.	0510.1230	HELLY	1	SING	T – B	LATIHAN
7.	0513.1430	F 16	2	SING	B – T	LATIHAN
8.	0514.0940	HELLY	1	SING	T – B	LATIHAN
9.	0514.1529	F 16	2	SING	B – T	LATIHAN
10.	0515.1504	F 16	2	SING	B – T	LATIHAN
11.	0516.1138	F 16	2	SING	T – B	LATIHAN
12.	0516.1232	HELLY	3	SING	T – B	LATIHAN
13.	0517.1000	HELLY	3	SING	T – B	LATIHAN
15.	0519.1400	F16	1	SING	B – T	LATIHAN
16.	0520.1450	HELLY	1	SING	T – B	LATIHAN
17.	0521.1406	F16	1	SING	B – T	LATIHAN
18.	0523.1225	F 16	2	SING	B – T	LATIHAN
19.	0527.1200	F 16	2	SING	B – T	LATIHAN
20.	0527.1435	HELLY	1	SING	T – B	LATIHAN
21.	0528.1130	F 16	2	SING	B – T	LATIHAN
22.	0529.1200	F 16	2	SING	B – T	LATIHAN

Sumber : Posal Pulau Nipa



PENGUMUMAN HASIL PELELANGAN UMUM
Nomor: 24/PL-POKJA PULAU NIPA/2014

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 20/PL-POKJA PULAU NIPA/2014 Tanggal 20 Maret 2014, Berita Acara Hasil Negosiasi (BAHN) Nomor 22/PL-POKJA PULAU NIPA/2014 Tanggal 20 Maret 2014 dan Penetapan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 06/M/III/2014 dan Nomor 228/MEN-KP/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Penawar Tunggal Pekerjaan Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Pertahanan Dan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Pulau Nipa, Kota Batam, bersama ini Panitia Lelang Gabungan Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa, Kota Batam mengumumkan Penawar Tunggal Pemenang Lelang paket pekerjaan Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa, Kota Batam sebagai berikut:

Nama Perusahaan : SURYAMINA ASINUSA KSO
(Kemitraan/KSO antara PT Surya Mina Bunkerindo dan PT Asinusa Putra Sekawan)

Alamat : Sudirman Plaza-Business Complex, Plaza Marein Lt. 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia.

Penawaran Harga Terkoreksi:

a. nilai total penerimaan langsung negara	: Rp	4.165.088.750.593,00,	terdiri:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	: Rp	3.243.616.021,937,00,	dan
- Kementerian Pertahanan	: Rp	921.472.728.656,00.	
b. nilai total hibah awal	: Rp	13.540.000.000,00,	terdiri:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	: Rp	5.200.000.000,00,	dan
- Kementerian Pertahanan	: Rp	8.340.000.000,00.	
c. nilai total kontribusi tetap	: Rp	156.998.190.608,00,	terdiri:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	: Rp	119.436.939.332,00,	dan
- Kementerian Pertahanan	: Rp	37.561.251.276,00	
d. nilai total profit sharing	: Rp	1.714.952.683.500,00,	terdiri:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	: Rp	1.414.905.240.000,00,	dan
- Kementerian Pertahanan	: Rp	300.047.443.500,00.	
Dengan koefisien persentase profit sharing sebesar:			
- Kementerian Kelautan dan Perikanan		6,95%,	dan
- Kementerian Pertahanan		6,23%	
e. nilai total sisa aset	: Rp	2.280.097.876.485,00,	terdiri:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	: Rp	1.704.073.842.605,00,	dan
- Kementerian Pertahanan	: Rp	576.024.033.880,00.	
f. nilai total investasi mitra	: Rp	5.092.528.606.299,00,	terdiri:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	: Rp	3.724.189.636.327,00,	dan
- Kementerian Pertahanan	: Rp	1.368.338.969.972,00.	

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 26 Maret 2014

Panitia Lelang

TTD

Ketua

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Letkol Laut (KH) Dantes
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Palaksa Lanal Batam
4. Dinas/Instansi : TNI AL
5. Keterangan Interview
- Tempat Interview : Kantor Lanal Batam
- Hari/tanggal : Rabu / 5 November 2014
- Waktu Interview : 07.00 Wib

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

- P: Kalau menurut anda, patroli seperti apa yang lebih efektif untuk menjaga keamanan dan pertahanan di Pulau Terluar khususnya di Pulau Nipa?
- N: Pengamanan di Pulau Nipa masuk dalam tanggung jawab Lanal Batam. Selama ini pengamanan Patkamla lebih efektif untuk Pulau Nipa. Ada beberapa alasannya. Pertama karena biaya operasionalnya tidak besar. Selain itu personel yang dilibatkan juga hanya antara 3 hingga 4 orang. Apalagi disini kan kepulauan, jadi ada beberapa alur yang tidak bisa dimasuki oleh KRI. Kami bisa masuk tetapi kami tidak mendapat dukungan dari segi patkamla.
- P: Adakah bantuan dari Pemda setempat untuk patkamla?
- N : Tidak ada. Ada aturan baru yang memuat larangan bantuan untuk ini.
- P : Jadi patkamla di Pulau Nipa tidak rutin dilakukan?
- N: Tidak rutin. Sebenarnya kita ada patroli terbatas tapi itu terkendala masalah bahan bakar. Jangankan untuk patroli, untuk mengantarkan orang ke Pulau Nipa saja kami butuh biaya Rp 1.5 juta untuk BBM. Apalagi banyak tamu yang ke Pulau Nipa.
- P: Pulau Nipa bukan pulau yang berpenghuni tetap. Apakah nelayan – nelayan yang berada di sekitar Pulau Nipa juga kerap mampir atau transit disana?
- N: Sering. Nelayan memang sering lego di sekitar Pulau Nipa. Jadi di Nipa itu sebenarnya sudah seperti di pasar malam. Di Pulau Nipa ada kapal – kapal yang lego, tetapi legonya terbatas untuk kita karena berada di perairan internasional. Hal ini membuat Korkamla tidak memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan disana. Nah biasanya saat kapal – kapal itu lego di dekat Singapura, ada nelayan – nelayan kita yang menggunakan kapal – kalap speed yang kecil akan datang sekedar untuk menawarkan minuman atau jasa kalau mau pesiar. Bahkan ada juga yang seperti prostitusi terselubung. Mereka menawarkan perempuan. Suasananya sudah seperti pasar malam tetapi digelar di perairan internasional. Bahkan para penjual minuman itu jago juga bahasa

Inggrisnya. Mereka bahkan sudah punya langganan. Kadang saat kapal itu lego, mereka akan menelpon untuk meminta dibawakan apapun yang mereka butuhkan.

P: Dengan adanya kondisi seperti itu, apakah ada yang bisa dilakukan oleh pengamanan kita?

N: Kondisi itu memang rawan ancaman. Biasanya sebelum berangkat, para nelayan memang laporan terlebih dahulu. Tetapi kita hanya bisa mendata. Apalagi AL kan sudah diberi titik koordinat. Kita tidak bisa melewatinya. Sebab semua kegiatan itu dilakukan di perairan internasional. Makanya menurut saya perlu ada pelayanan satu atap di Pulau Nipa yang juga melibatkan unsur TNI AL. Nantinya check pol nya di Pulau Nipa. Sehingga idealnya, semua kapal yang masuk harus lapor.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Mayor Laut (P) Henry Munjoko
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Jabatan : Pasop Lanal Batam
4. Dinas/Instansi : TNI AL
5. Keterangan Interview
 - Tempat Interview : Lanal Batam
 - Hari/tanggal : Rabu / 5 November 2014
 - Waktu Interview : 11:00 WIB

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

P: Apa saja kesibukan anda selama berada di Batam?

N: Mohon ijin. Selama ini selama berada di Batam kesibukannya paling ngantar – ngantar tamu saja.

P: Apakah di wilayah ini sering terjadi pencurian kapal dan apakah Lanal menangani hal ini?

N: Ya kalau pencurian itu masih simpang siur. Ada yang bilang pencurian, tetapi ada juga yang bilang itu adalah perampokan. Kami pernah menelusuri laporan adanya pencurian. Tetapi ternyata bukan pencurian. Justru ada kerjasama dalam melakukan kejahatan. Dalam kasus ini ada kesepakatan antara nahkoda dengan pengumpul besi di darat. Para pengumpul besi ini justru membayar orang – orang yang ada di laut sebesar Rp 5 ribu per kilo.

- P: Teknisnya seperti apa?
- N : Biasanya ada kesepakatan antara pemilik modal dengan nahkoda kapal. Pada satu titik koordinat, nahkoda kapal akan memperlambat kapal sambil menunggu pemilik modal datang untuk mengambil besinya. Setelah itu, baru nahkoda kapal akan melaporkan terjadi pencurian atau perampokan. Hal – hal seperti itu yang membuat daerah perbatasan kita terkesan tidak aman di mata internasional. Padahal itu adalah kongkalikong.
- P: Dengan adanya AL yang berjaga di perbatasan, apakah tidak bisa mengurangi kejahatan-kejahatan yang seperti itu?
- N: Dulu ada marinir yang berjaga di Pulau Nipa. Tetapi setelah marinir tidak lagi ada, justru ada 2 kali perompakan di perbatasan. Kita punya datanya di batalyon.
- P: Perompakan perbekalan kapal?
- N: Iya. Tapi kita tidak bisa membuktikan apakah itu murni pencurian atau kita sebut perompakan atau justru ada kesepakatan. Yang terjadi selama ini nahkoda kapal justru melaporkan perompakan ke Singapura dan bukan ke syahbandar atau AL.Tapi ya memang ada nelayan di sekitar sini yang memang ikut – ikutan dengan pertimbangan daripada mereka harus mencari ikan, lebih baik mereka mengambil besi di kapal. Walaupun demikian, kondisi disini tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan pengamanan pulau terluar di Kalimantan. Disana karena kedekatan wilayah antara pulaunya dengan Malaysia, jadi penduduk disana ikut berbahasa Melayu. Mereka bahkan juga menggunakan mata uang ringgit. Selain itu mereka akan berbelanja kebutuhan pokok seperti beras dan baju ke Malaysia. Sementara di Pulau Nipa, tidak ada penduduknya. Resiko paling besar ya Pulau Nipa menjadi tempat perampokan.
- P: Dengan kondisi seperti yang anda jelaskan, apakah ada saran untuk pembangunan di Pulau Nipa?
- N: Di Pulau Nipa sudah ada berapa milyar uang negara yang habis untuk reklamasi atau untuk nimbun pulau ini. Kalau tidak salah dari 0,6 hektar dalam waktu 10 tahun menjadi 60 hektar. Kalau bisa saran, luas wilayah 60 hektar ini harus dimaksimalkan. Dalam artian, dari 60 hektar, dibagi menjadi 3 kawasan. 20 hektar untuk kawasan pertahanan, 20 hektar untuk kawasan industri dan 20 hektar sisanya untuk kawasan wisata.
- P: Kalau untuk kawasan pertahanan, sebenarnya pertahanan seperti apa yang bisa dibuat di Pulau Nipa?
- N: Bisa mengambil contoh seperti pangkalan Amerika Serikat di Filipina. Nah, menurut saya di Nipah itu harus ada satu pangkalan militer. Ada tempat sandar kapal perang, ada tempat landing pesawat. Karena Pulau Nipa itu ada di jalur internasional di Selat Malaka. Jadi standar pertahanannya harusnya bisa disamakan dengan Singapura atau Malaysia.
- P: Kalau untuk kawasan industri seperti apa?
- N: Kawasan Pulau Nipa itu bisa dijadikan kawasan ekonomi. Bisa jadi tempat untuk ship to ship kapal. Selama ini banyak kapal yang antre untuk masuk Singapura. Kalau kita jeli dan pemerintah cerdas, sebenarnya area perairan kita di Pulau Nipa bisa dijadikan tempat untuk lego jangkar. Ini kan belum ada aturannya. Apalagi kalau kita lihat, kapal lego itu biasanya bisa sampai 5 bulan. Kapal ditinggalkan dan nahkodanya bisa turun dari kapal selama itu. Banyak sebenarnya kegiatan yang bisa dimanfaatkan disana.
- P: Anda sendiri kapan tepatnya ditugaskan di Pulau Nipa?

- N: Saya pasukan pertama yang diterjunkan ke Pulau Nipa. Yang nimbun Pulau Nipa. Waktu tahun 1998, pohon yang ada di Pulau Nipa selalu habis kalau waktu pasang. Waktu itu belum ada POS AL. Setelah proses penimbunan selesai baru dibangun POS AL. Kalau mau buka-bukaan, sebenarnya proses penimbunan juga banyak korupsinya. Kalau diperhatikan, laporan 60 hektar Pulau Nipa sebenarnya tidak benar. Yang riil mungkin hanya 20 hektar karena bagian tengah pulau justru bolong.
- P: Kalau untuk pencemaran bagaimana? Apakah juga banyak terjadi di wilayah perairan di Pulau Nipa?
- N: Pencemaran ada. Biasanya kapal yang lewat kalau tidak ketahuan akan buang sampah disini. Tapi memang sampahnya tidak pernah sampai ke pantai. Kalau sampai pinggir pantai, pasti kita sudah menerama laporannya.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Lettu Laut (T) Darmanto
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Jabatan : Staf Lanal Batam (Mantan Danposal Pulau Nipa)
4. Dinas/Instansi : TNI AL
5. Keterangan Interview
 - Tempat Interview : Lanal Batam
 - Hari/tanggal : Rabu / 5 November 2014
 - Waktu Interview : 14:00 WIB

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

- P: Mulai tahun berapa anda ditugaskan di Pulau Nipa sebagai Danposal?
- N: Sejak tahun 2011
- P: Reklamasi di Pulau Nipa dilakukan sejak kapan dan instansi apa saja yang terlibat?
- N: Sejak tahun 2004. Terlibat disitu dari kemhan, TNI AL dan KKP Kalau dinas PU belum masuk di tahun itu. PU baru masuk sejak adanya rencana pengadaan air tawar.
- P: Kegiatan pengadaan penyulingan air tawar?

- N: Siap. PIPANISASI dilakukan oleh PT Surya Lama Sejati dari Jakarta. Perusahaan itu ditunjuk oleh KKP. Jadi KKP melakukan PIPANISASI kemudian melakukan sosialisasi. Setelah itu baru PU masuk untuk membuat embung. Ada 2 embung di Pulau Nipa yaitu di sebelah utara, dekat kosatgas marinir dan di belakang barak. Kolamnya masing masing berukuran 50x60 dan 40x40.
- P: Kalau kaitannya dengan keberadaan Posal, apakah berpengaruh dengan keamanan maritim di Pulau Nipa? Misalnya adakah pengurangan atau justru peningkatan kegiatan ilegal seperti penyelundupan?
- N: Ada pengurangan. Kami juga melakukan patroli secara acak. Tidak ditentukan waktu sehingga tidak bisa dibaca oleh mereka yang hendak melakukan penyelundupan.
- P: Kegiatan ilegal apa yang paling sering terjadi di sekitar Pulau Nipa?
- N: Biasanya BBM. Tetapi tidak dilakukan di depan Posal Nipa, melainkan di seputaran OPL. Mereka melakukan transfer BBM ship to ship di daerah perairan bebas.
- P: Seberapa ramai perairan di sekitar Pulau Nipa? Kalau diperkirakan ada berapa kapal yang melintas per hari?
- N: Bisa sampai 50 kapal per hari. Umumnya kapal tanker, kapal ikan atau kapal dari luar. Bahkan kapal induk dari Amerika juga melintas disana. Apalagi karena itu berbatasan langsung dengan alur internasional. Terkadang Singapura bahkan mengirim police marine atau coast guard untuk mengusir kita. Padahal itu masih laut bebas. Tetapi tentu kami tidak mau mengalah begitu saja. Karena itu kan perairan bebas.
- P: Saat ini menurut anda, infrastruktur, apa masih harus ditambah di Pulau Nipa?
- N: Kalau untuk kebutuhan air kami sudah tercukupi. Namun kami masih memiliki masalah listrik. Ada 2 genset di Pulau Nipa dengan kapasitas 60 KVA dan 250 KVA, tetapi tidak bisa kami gunakan. Akhirnya kami mendatangkan PLN dari Tanjung Pinang dengan dana pribadi.
- P: Kalau untuk sholar shell, apakah efektif penggunaannya?
- N: Awalnya efektif, tetapi hanya tahan 2 tahun. Dan tidak ada peremajaan. Kondisi serupa juga terjadi untuk kincir angin. Bahkan ketika saya pertama datang, saya diberi tahu kalau itu sudah tidak bisa digunakan selama 5 tahun. Sudah kami laporkan, tapi belum ada tindak lanjut.
- P: Kalau untuk sarana komunikasi bagaimana?
- N: Ada radio untuk berkomunikasi dan itu bisa sampai Lanal.
- P: Kalau ada kegiatan ilegal yang ditemukan, misalnya terjadi penyelundupan. Apakah akan langsung ditahan atau dibuat pukodal terlebih dahulu atau seperti apa prosedurnya?
- N: Selama disana kami belum pernah menemukan hal seperti itu. Kami juga biasanya mendapatkan informasi dari nelayan di sekitar Pulau Nipa jika ada kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal. Pernah ada yang coba kami kejar, tetapi kemampuan kapal kami kalah. Speed kapal kami hanya 85 PK, tidak bisa mengejar kapal mereka yang memiliki speed antara 200 sampai 250 PK.
- P: Kalau untuk para nelayan, apakah mereka juga mendapatkan manfaat dari Pulau Nipa?
- N: Ada. Mereka bisa istirahat dan sandar. Jadi memang salah satu tugas atau fungsi posal adalah untuk menggali potensi maritim Pulau Nipa, termasuk menggalang masyarakat maritimnya. Jadi sekitar 5 atau 10 mill di belakang Pulau Nipa ada Pulau trug. Kami sering kesana untuk

menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat di sana. Dan hal itu ternyata sangat bermanfaat untuk meredam konflik yang ada. Jika ada permasalahan yang mencuat, bisa kita antisipasi sejak awal sebelum sampai ke Batam. Seperti dulu, nelayan pernah demo di laut. Mereka memprotes kapal yang berlabuh dan lego jangkar. Karena dianggap mengganggu kegiatan pencarian ikan mereka.

- P: Kalau dari pemda setempat, seperti apa perhatian yang diberikan untuk Pulau Nipa?
- N: Biasanya saat mereka berkunjung mereka memberikan bantuan sembako untuk pasukan yang berjaga di Pulau Nipa. Mereka juga membuat gapura selamat datang di Pulau Nipa, serta memberikan bantuan cat untuk kegiatan pengecatan disini.
- P: Kalau untuk kegiatan bahari?
- N: Pernah ada kegiatan wisata bahari dari Pramuka. Mereka melakukan penanaman bakau, memasang prasasti dan patung tunas kelapa. Sering juga ada kunjungan rutin dari Kemhan, Mabes Tni, Kormar, Kodam, Korem, Kodim, KKP, DKP, dan beberapa LSM. Waktu kami disana, Presiden SBY juga dtang berkunjung.
- P: Pak Darmawan pernah berada disana. Apakah ada harapan untuk Pulau Nipa?
- N: Ada banyak harapan, karena Pulau Nipa merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura. Kami merasakan sendiri kondisi laut disana. Menurut kami, speed boat fiber tidak terlalu banyak membantu disana. Untuk pengamanan di Pulau Nipa paling tidak dibutuhkan sea rider untuk patroli atau pengejaran terhadap pelaku penyelundupan. Kami juga berharap perhatian untuk Pulau Nipa perlu ditingkatkan. Untuk listrik misalnya, mungkin lebih baik menggunakan tenaga surya. Sebab lampu disana dibutuhkan terutama untuk membantu nelayan yang hendak sandar. Kalau dermaga, menurut saya dermaga di Pulau Nipa sudah cukup layak. Cuma yang belum terealisasi sejak direncanakan tahun 2012 lalu adalah pembangunan Storage, Kantor Imigrasi, Bea Cukai, dan syahbandar.
- P: Kalau saya lihat kemarin, banyak kapal yang antre. Itu akan ke Singapura?
- N: Itu bukan antre ke Singapura. Itu NTA atau NITA. Fungsinya untuk ship to ship abk. Biasanya kapal – kapal itu sedang dalam perbaikan atau menunggu perintah dari ownernya untuk tujuan selanjutnya. Atau kapal itu berfungsi sebagai bunker. Jadi Pulau Nipa ini sebenarnya memiliki potensi yang bagus. Tapi biasanya hanya efektif selama 6 bulan. Sebab saat angin barat, dermaga di Pulau Nipa sama sekali tidak bisa digunakan. Bahkan ada nelayan yang membuat keramba di Pulau Nipa, tetapi kami minta jangan terlalu keluar agar tidak mengganggu lalu lintas kapal. Tapi saat angin barat, keramba itu hancur.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Letda Laut (T) Asep Suryanda |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| 3. Jabatan | : Danposal Pulau Nipa |

4. Dinas/Instansi : TNI AL

5. Keterangan Interview

Tempat Interview : Pulau Nipa

Hari/tanggal : Kamis / 6 November 2014

Waktu Interview : 19:00 WIB

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

P: Menurut bapak apa yang harus menjadi prioritas dalam pengamanan dan pengelolaan di Pulau Nipa?

N: Yang harus menjadi prioritas adalah dukungan transportasi untuk patroli. Sebab patroli penting dilakukan untuk kegiatan pengaman di laut. Selain itu, kita juga membutuhkan alat deteksi.

P: Sebenarnya seperti apa kegiatan – kegiatan ilegal yang rawan terjadi di sekitar Pulau Nipa dan bahkan bisa berpengaruh pada keamanan?

N: Selama ini saya belum pernah mendapati aktivitas penyelundupan atau penangkapan ikan di laut yang dilakukan secara tidak resmi. Sebab untuk saat ini, pengawasan bahkan sudah dilakukan secara ketat sejak berada di wilayah Batam. Ada polisi, polairud dan bea cukai yang turut mengamankan.

P: Apakah polairud, bea cukai maupun Angkatan Laut sering melakukan patrol di sekitar Pulau Nipa? Kalau ada seberapa besar intensitasnya?

N: Bea cukai dan Polairud terkadang suka melakukan patroli. Tetapi tidak tentu waktu atau jamnya.

P: Pulau Nipa dulu hampir tenggelam. Tetapi setelah direklamasi seperti sekarang ini apakah ada kemungkinan pulau ini akan mengalami abrasi?

N: Kalau untuk tenggelam lagi saya rasa tidak mungkin. Karena Pulau Nipa saat ini sudah ditahan dengan penahan – penahan ombak di sekelilingnya.

P: Bagaimana dengan kegiatan penambangan pasir ilegal. Pulau Nipa identik dengan kegiatan penambangan pasir ilegal untuk dijual ke Singapura yang kemudian memanfaatkannya untuk reklamasi di sekitar pantai – pantai mereka. Apakah kegiatan penambangan pasir masih terjadi saat ini?

N : Sudah tidak ada

P: Tadi disebutkan tidak ada patroli rutin. Padahal kita tahu kalau dari 92 pulau terluar ada 12 pulau terluar yang saat ini rawan dan perlu mendapatkan pengamanan serius. Nah dengan tidak adanya kapal patroli yang tersedia, maka langkah apa yang dilakukan jika melihat adanya pelanggaran seperti penyelundupan? Bagaimana anda menyikapi kendala ini?

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

- N: Dengan terjalinnya hubungan baik melalui pendekatan dan penggalangan serta melaksanakan fungsi intelijen khususnya terhadap para nelayan yang sedang beraktifitas di perairan Pulau Nipa sekitarnya juga personel Pos TNI AL Pulau Nipa mendatangi pulau-pulau kecil yang berpenduduk. Harapannya adalah agar para nelayan dan penduduk di pesisir pantai dapat memberikan informasi kepada Pos TNI AL Pulau Nipa apabila ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang mencurigakan baik dari darat ke laut maupun dari laut ke darat atau kegiatan-kegiatan illegal yang sedang berlangsung di tengah laut. Jika ada pelanggaran yang kami ketahui, misalnya penyelundupan, biasanya kami tetap mengusahakan untuk melakukan patroli terlebih dahulu. Jika tidak bisa mengatasinya, maka kami akan berkoordinasi dengan Guskamla. Selain itu juga ada KRI yang bisa diarahkan untuk melakukan patroli di sekitar Pulau Nipa.
- P: Untuk saat ini yang fasilitas yang sudah tersedia di Pulau Nipa apa saja?
- N: Di sini kita memiliki sejumlah gedung dan transportasi yang sebenarnya sudah dalam kondisi 80% tidak layak pakai. Kita juga tidak memiliki penguat sinyal, penyulingan air tawar dan solar shell.
- P: Selama anda berdinasi disini, bagaimana pantauan anda tentang arus lalu lintas kapal di sekitar Pulau Nipa?
- N: Sebenarnya untuk jalur internasional tetap ramai. Tetapi kalau untuk wilayah perairan Indonesia justru tidak terlalu ramai.
- P: Bagaimana tanggapan anda dengan munculnya rencana untuk pengembangan Pulau Nipa menjadi area komersil?
- N: Kalau seperti itu, kami mendukung saja. Sebab itu adalah kebijakan dari pemerintah. Bahkan siapa tahu dengan adanya pengembangan wilayah menjadi area komersil justru bisa mendukung kegiatan POS AL di Pulau Nipa ini.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Udin
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Nelayan
4. Dinas/Instansi :
5. Keterangan Interview
 - Tempat Interview : Pulau Nipa
 - Hari/tanggal : Sabtu, 8 November 2014
 - Waktu Interview : 06.30 Wib

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

- P: Berapa jumlah nelayan di sekitar Pulau Nipa?
- N: Cukup banyak dan tersebar di beberapa pulau di sekitar Pulau Nipa.
- P: Dengan dibangunnya Pulau Nipa, misalnya saat ini sudah direklamasi. Apakah ada pengaruhnya atau keuntungannya untuk nelayan?
- N: Biasanya untuk menjadi tempat berlindung kalau ada angin ribut. Biasanya bahkan kami bermalam di Pulau Nipa. Karena nelayan lebih paham situasi di sini, jadi kami juga sering dilibatkan untuk pengamanan informasi. Sejauh ini AL juga membantu khususnya kalau kita ada masalah. Misalnya ada kecelakaan laut. Pihak AL biasanya ikut membantu menyelesaikan. Kalau sudah ada TNI, biasanya pihak perusahaan juga pikir panjang kalau mau lari dari tanggung jawab.
- P: Sering ada kapal yang lego jangkar di pulau Nipa. Apakah hal itu mengganggu nelayan disana?
- N: Kalau di Pulau Nipa sejauh ini tidak begitu mengganggu.
- P: Pulau Nipa itu kan pulau strategis. Kita harus akui itu. Sebagai titik terdepan negara kita, pemerintah kemudian memutuskan untuk membangun Pulau Nipa, Apakah ada dampaknya bagi nelayan?
- N: Sebenarnya sekarang tidak ada masalah bagi kami. Tetapi memang saat pembangunan dulu, sempat cukup mengganggu. Hal itu terjadi selama beberapa tahun, namun sekarang kondisinya sudah normal kembali. Saat itu nelayan dirugikan, tetapi perusahaan – perusahaan itu sudah melakukan sosialisasi dan melengkapi penilaian amdal sejak awal. Dan nelayan masuk dalam penilaian amdal itu. Waktu itu sudah ada negosiasi dengan pihak perusahaan.
- P: Apakah keberadaan Posal memberi dampak positif bagi nelayan?
- N: Iya, cukup membantu. Kita bahkan bangga jika AL melibatkan nelayan yang sandar disini untuk membantu kegiatan pengamanan di sana. Apalagi sekarang ada dermaga di Pulau Nipa, jadi memudahkan jika akan bersandar. Sejauh ini belum pernah ada nelayan yang mengadu tidak diizinkan atau dilarang bersandar di Pulau Nipa. Dengan adanya AL, kejahatan di laut juga berkurang. Karena nelayan juga rajin memberikan informasi kepada AL.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Laksma TNI Drs. Ir. Harjo Susmoro, SH. MH.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Komandan Guskamla Koarmabar
4. Dinas/Instansi : TNI Angkatan Laut
5. Keterangan Interview

Tempat Interview : Kantor Guskamla Koarmabar

Hari/tanggal : Rabu / 12 November 2014

Waktu Interview : 09.00 WIB

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

P: Kemarin kami sudah melakukan penelitian di Pulau Nipa. Disana kami melihat ada beberapa barak, tetapi hanya diawaki dengan 14 personel saja. Padahal ada 62 hektar wilayah yang menjadi tanggung jawab dari personel yang berjaga disana. Sebenarnya bagaimana kebijakan pengelolaan Pulau Nipa untuk Guskamla?

N: Jadi permasalahan perbatasan ini memang krusial. Amat krusial artinya disini kalau menurut saya pribadi permasalahannya belum disikapi secara komprehensif oleh pemerintah. Artinya ini terkesan seolah hanya tanggung jawab dari aparat keamanan saja. Jadi memang ini perlu kepedulian secara langsung dari pemerintah. Tetapi dalam masa transisi seperti ini, kita masih fokus pada permasalahan sekitar politik saja. Padahal kita harus tahu, dalam sistem perpolitikan kita, masih banyak partai yang belum memikirkan Republik ini atau bagaimana membangun Republik ini secara utuh. Tetapi partainya masih mengejar kekuasaan. Jadi kalau tinjauannya dari segi keamanan, mereka selalu berpikir “pokoknya itu tugasnya aparat keamanan saja”. Lebih ngeri lagi, karena masalah perbatasan di laut juga tetap diangkat sebagai tanggung jawab Angkatan Laut saja. Padahal dari segi dukungan di lapangan sebenarnyakurang diperhatikan. Anggota yang bertugas di pulau terluar butuh energi, butuh bbm dan lain – lain. Mereka akhirnya bekerjasama atau minta kepada masyarakat atau nelayan. Sementara itu, jika ditinjau secara komprehensif, sebenarnya memberikan perhatian kepada anggota bukan saja menjadi tanggung jawab kita, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan masalah kehidupannya. Ini bukan semata – mata maunya prajurit untuk ditempatkan disana. Tetapi ini ada kebutuhan negara untuk menempatkan disana untuk menjaga wilayah.

P: Apa saja yang menjadi prioritas pengamanan ataupun pengelolaan di Pulau Nipa?

N : Pulau nipah salah satu pulau terluar kita yang kita pertahankan. Ada indikasi bahwasanya waktu itu pihak luar dalam hal ini Singapura hendak menguasai Pulau Nipah. Tapi sekarang dengan adanya AL disana, hal itu sudah tidak ada. Permasalahan berikutnya adalah bahwa disana bukan hanya mempertahankan titik artinya pulau terluar kita... tapi disana ada AL kita.. Sebenarnya Pulau Nipa bisa dijadikan area bisnis bagi Indonesia terutama untuk lego jangkar, tetapi terlalu banyak kepentingan disana untuk mewujudkan hal itu. Di Indonesia, belum ada keterpaduan antara bisnis – ekonomi dan masalah pertahanan atau keamanan. Semuanya berjalan sendiri – sendiri. Tetapi manakala terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya pencurian, yang disalahkan adalah keamanannya. Jika dibandingkan dengan Singapura, mereka sudah begitu komprehensif, menyatu antara kepentingan negara, ekonomi - bisnis dengan keamanan dan politik mereka sudah padu. Dan disinipun harusnya seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari kondisinya sekarang, politik masih urusin kursinya masing – masing, sementara ekonominya banyak bicara dan hanya menghitung untung rugi. Padahal kalau bicara militer, tidak bisa untung rugi. Keuntungan dari militer adalah rasa aman, dan itu tidak bisa dibeli dengan rupiah.

P Kemudian, menurut Komandan, apajah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk Pulau Nipa saat ini sudah benar? Atau masih ada hal lain yang harus diperbaiki?

- N: Saya justru belum melihat adanya pengamanan yang dilakukan secara khusus untuk Pulau Nipa. Memang ada pengamanan dari AL, tetapi AL kan bukan digerakkan secara khusus untuk pengamanan Pulau Nipa. Guskamla harus mengamankan 2 wilayah. Untuk wilayah barat, kita Cuma memprioritaskan beberapa titik sesuai dengan kerawanan yang kita dapatkan dari analisa intelejen. Nah disinilah yang saya katakan tadi, antara kepentingan politik, ekonomi dan keamanan masih belum padu. Seolah – olah, saya dalam pengamanan ini bisa survive sendiri. Contohnya, saya dikasih kapal. Harusnya kalau kapal itu bergerak semua, kegiatan pengamanan bisa berlangsung dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, saya dikasih kapal dan personel tapi bahan bakarnya terbatas. Padahal kapal tidak bisa bergerak tanpa bahan bakar. Kalau dirata – rata, dalam satu hari hanya 3 atau 4 unsur yang bergerak. Itupun masih dikurangi 1 unsur yang harus melakukan patroli terkoordinasi sesuai kesepakatan kerjasama dengan negara tetangga. 1 unsur melakukan pengamanan di Malindo. Ada juga perbatasan dengan Singapura yang harus kita jaga. Kita juga memiliki 1 unsur yang kita gerakkan secara mobile. Tidak ada yang tersisa lagi. Sehingga untuk Pulau Nipa, benar – benar kita serahkan pada prajurit yang ada disana. Padahal pada kenyataannya personel disana hanya bisa mengamankan daratnya. Memang ada sarana untuk patroli tetapi hanya menggunakan speedboat, sehingga tidak bisa terlalu jauh. Bahan bakar juga terkadang suka datang terlambat. Sehingga kita sering meminta KRI yang ada disana untuk memberikan bahan bakar kepada mereka. Nah permasalahan seperti itu di Pulau Nipa selama ini tidak ada yang memikirkan. Bahwa secara khusus ada pasukan untuk pengamanan disana memang benar. Tetapi menurut saya belum cukup efektif. Untuk mengamankan Pulau Nipanya *is ok*. Tapi tidak bisa mengamankan perairannya yang begitu luas, padahal disana banyak sekali kapal. Kita juga tidak punya kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan patroli disana karena bisa dikomplain negara lain. TNI AL tidak memiliki dukungan yang cukup memadai untuk melaksanakan pengamanan khusus di Selat Nipa atau Pulau Nipa itu. Karena kita juga punya wilayah yang harus diamankan. Natuna rawan *illegal fishing*, Selat Malaka dan Selat Singapura juga harus diawasi. Itu kesulitan kita. Satu unsur tapi harus ada di semua tempat. Belum lagi dibandingkan antara kondisi laut yang begitu luas dengan kemampuan kapal yang terbatas. Hanya rata – rata 10 knot maksimal 14 knot, sementara sasarannya kecepatannya rata – rata 25 – 30 knot. Kapal kecil dengan motor tempel kekuatan 10 ribu pk saja tidak bisa kita kejar. Walaupun sudah di depan mata, sudah kita bidik, kalau mereka lari ya kita tetap tidak bisa mengejar.
- P: Berarti salah satu kendala untuk TNI Angkatan Laut adalah terkait jumlah alutsista yang masih terbatas?
- N: Jumlah alutsista kita memang terbatas. Tetapi kalau dengan jumlah yang terbatas itu kita mendapat dukungan operasional yang memadai, saya yakin pasti lebih baik. Kita pasti bisa untuk mengatasi hal – hal yang tidak kita inginkan. Tetapi disini, alutsista terbatas, wilayah luas tetapi bahan bakar juga tidak memadai. Ada status operasi yang ditetapkan oleh Mabes TNI, tetapi itu hanya buat operasi saja. Lalu bagaimana dengan kapalnya? Maintenancenya? Bahan bakarnya? Semuanya terbatas. Ujung – ujungnya kapal yang harusnya melakukan operasi tidak bisa bergerak karena harus menunggu bahan bakar. 3 hari berlayar kadang 1 minggu atau 2 minggu di pangkalan.
- P: Apa tidak ada kerjasama dengan instansi – instansi lain? Misalnya dengan Bea Cukai dan Polairud? Bagaimana integrasi pengamanan antara 3 institusi ini di Pulau Nipa?
- N: Integrasi secara formal memang ada. Kita juga memiliki patroli terkoordinasi dengan Malaysia. Dulu kita juga punya patroli terkoordinasi dengan Singapura. Kebetulan saya juga dansatgas untuk bakorkamla. Operasi bakorkamla memang ada tetapi koordinasinya hanya ke arah penindakan. Tapi secara unsure, kita semua memiliki keterbatasan baik alutsista maupun bahan bakar. Kondisi serupa juga dirasakan oleh Polair. Jadi sekali lagi, kita tidak memiliki patroli khusus di Selat Nipa. Tetapi hanya di Selat Malaka dan Selat Singapura. Koordinasi yang kita

- jalin dengan instansi lain hanya secara formal. Patroli rutin bersama sudah lama tidak dilakukan sehingga kita bergerak sendiri – sendiri.
- P: Kalau untuk koordinasi dan komunikasi dengan Singapura terkait Pulau Nipa selama ini seperti apa?
- N: Komunikasi kita hanya terjalin dengan kerjasama *service picture* atau serpic. Jadi kita hanya melihat tampilan di radar. Kita dan Singapura akan saling memberikan informasi jika ada kejadian di Selat Singapura. Kalau kejadian terjadi di wilayah kita, maka akan kita *take over*, demikian pula sebaliknya. Jadi sekali lagi, tidak ada pengamanan secara khusus untuk Pulau Nipa, tetapi memang Pulau Nipa menjadi bagian pengamanan di Selat Singapura.
- P: Waktu melakukan penelitian di Pulau Nipa, kami mendengar dan melihat ada masterplan pembangunan Pulau Nipa menjadi sarana fasilitas komersil. Bagaimana anda melihat rencana tersebut?
- N: Itu bagus – bagus saja dan memang itu sudah dipersiapkan. Setelah itu, sektor pengamanan juga sudah kita siapkan. Untuk teknisnya, rencana untuk memberlakukan kawasan lego jangkar sudah disiapkan. Cuma sampai dengan detik ini, semuanya masih berjalan sendiri – sendiri. Nantinya pihak perhubungan laut akan mendesain tempat lego jangkar. Fasilitas akan disiapkan TNI AL karena itu wilayah yang kita amankan. Tapi secara khusus bahwa itu terintegrasi, kedepannya akan seperti apa, lalu desain pengamanannya seperti apa dan strateginya seperti apa, saya sebagai Guskamla belum pernah dilibatkan. Mungkin koordinasinya dilakukan di tingkat yang lebih tinggi, tetapi kebijakan itu tidak turun sampai guskamla.
- P: Dengan kondisi seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan untuk Pulau nipa?
- N: Jadi pengamanan pulau nipah merupakan bagian dari pekerjaan saya sebagaimana saya mengamankan yang lainnya. Seharusnya akses pertahanan dan keamanan untuk kawasan Pulau Nipa dilakukan dengan memberikan penguatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan pada koridor-koridor dan pangkalan pertahanan Angkatan Laut sesuai dengan kebutuhannya.
- P: Kaitannya dalam hal kebijakan. Untuk saat ini kan pemerintah yang baru ada pemberian *comand demand* yang nantinya akan mengkoordinasikan kebijakan antar kementerian – kementerian yang selama ini tumpang tindih. Salah satunya sekarang ada kementerian kemaritiman. Bagaimana harapan Bapak dengan hal ini?
- N: Kementerian kemaritiman, Kementerian kelautan itu bukan sesuatu yang baru. Karena pengamanan sudah dilakukan oleh TNI AL. Kalau menurut saya, itu hanya seperti ganti casing tetapi isinya tetap sama. Masalah maritim sudah diperjuangkan Ir juanda hingga akhirnya Indonesia bisa jadi negara kepulauan. Tapi bedanya negara kepulauan sudah tidak boleh muncul undang – undang. Nah sekarang dengan adanya orientasi laut, kita berusaha untuk mengembangkan wilayah laut dalam kebijakan. Tapi hingga saat ini kita belum punya strategi kelautan secara riil. Jaman Habibie, deklarasi Bunaken mengembalikan track Indonesia untuk membangun ke arah maritim tetapi hasilnya tidak signifikan. Jaman SBY dengan *blue ocean economy* juga memiliki semangat kembalian ke laut. Tetapi ekspor laut kita juga belum signifikan. Lalu sekarang poros maritim hendak membuat tol laut. Tapi konsepnya seperti apa juga belum jelas. Sementara kita, AL sudah jelas memiliki kepentingan untuk melakukan pengamanan di darat lewat laut. Selama ini, ketika kita bicara maritim, orang langsung alergi karena merasa kepentingannya terganggu. Sebab orang merasa maritim hanya kepentingan TNI AL. Padahal maritim bukan hanya laut tetapi juga daratnya. Tergantung cara pandang dimana laut menjadi hal terpenting sehingga semua kegiatan diarahkan kesana. Kita dulu negara maritim. Jaman Sriwijaya, kita meraih kekuasaan tidak hanya Nusantara, tetapi hingga

Madagaskar dan China. Sekarang kita dirubah menjadi negara agraris oleh Belanda, butuh waktu 350 tahun untuk merubah mindset bangsa maritim yang berjiwa bahari menjadi negara agraris. Sekarang kita petani agraris yang konsepnya hanya bisa mengisi lumbungnya sendiri. Padahal kalau wawasan maritim, kita bisa menanam padi yang hasilnya kita jual ke AS dan Thailand. Tetapi untuk ekspor, artinya kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi dulu. Jika kita menerapkan konsep negara maritim, maka transportasi dan teknologi kita juga akan maju. Lihat negara – negara dunia, negara yang maju adalah negara yang memiliki konsep negara maritim. Kota besar rata – rata berada di pantai dan memiliki pelabuhan seperti di AS, di Inggris, di Belanda dan di negara – negara lain. Karena apa? Karena persimpangan informasi, persimpangan ekonomi. Sehingga ekonomi tumbuh disitu. Untuk itu kita berharap, mudah – mudahan apa yang direncanakan saat ini bisa diwujudkan.

- P : Menurut pendapat Bapak, apakah penerapan teori Mahan bisa diterapkan dalam pengamanan Pulau-pulau terluar? Bagaimana aplikasinya?
- N : Penggunaan teori Mahan dalam pengamanan pulau-pulau terluar di Indonesia adalah dengan memberikan keyakinan bahwa dengan pengamanan dan penguasaan laut di pulau-pulau terluar Indonesia dapat menyelamatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya di samping untuk menegakkan kedaulatan. Oleh karena itu harus dipunyai Angkatan Laut yang kuat agar dapat melaksanakan command of sea melalui Naval Security yang lebih unggul dan kombinasi SLOC agar tetap berjalan untuk kepentingan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan komponen-komponen Mahan yang harus kuat.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Kopol Sofyan
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Perwira Staf Ops Ditpolair Polda Kepri
4. Dinas/Instansi : Polairud
5. Keterangan Interview
- Tempat Interview : Kantor Ditpolair Polda Kepri
- Hari/tanggal : Kamis / 13 November 2014
- Waktu Interview : 13.00 Wib

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

- Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti
- P: Seberapa penting keberadaan Pulau Nipa dengan kondisi perairan di sekitarnya bagi Polairud?
- N: Pulau Nipa sangat penting karena menyangkut batas negara kita. Pulau Nipa penting karena merupakan hotspot. Rawan untuk menjadi jalur penyelundupan khususnya ke karimun dan

- bangka. Penempatan marinir di Pulau Nipa sangat penting, untuk membantu menekan angka kejahatan di perairan di sekitar Pulau Nipa.
- P: Apakah selama ini ada laporan terkait kegiatan penyelundupan atau kegiatan ilegal lainnya yang tertangkap di Pulau Nipa?
- N: Dengan adanya personel pengamanan di Pulau Nipa, memang membuat tindak pidana di perairan tersebut dapat ditekan. Pelaku akan berpikir dua kali dengan adanya aparat di sana. Banyak kapal asing yang anchor di area Pulau Nipa. Dan mereka juga merasa aman dengan keberadaan kita di sana. Biasanya kami menyambangi kapal – kapal yang lego jangkar di sana. Kami naik dan melakukan pemeriksaan. Menanyakan berapa jumlah crew-nya dan data lain yang dibutuhkan. Dengan adanya pengamanan di Pulau Nipa, bisa dikatakan perompakan atau pencurian di atas kapal tidak ada lagi.
- P: Dengan adanya rencana komersialisasi Pulau Nipa, apakah hal ini akan mempengaruhi kegiatan pengamanan disana?
- N: Justru hal itu bagus. Dengan adanya komersialisasi dan pengamanan, akan membuat Pulau Nipa menjadi ikon terdepan kita di pulau terluar. Dengan adanya komersialisasi di sana, akan menambah income negara juga. Dan pengamanan di sana juga membuat wilayah kita terjaga. Bagus sekali itu. Bahkan sektor pariwisata juga seharusnya bisa dikembangkan di sana, karena memang bagus.
- P: Seperti yang kita ketahui, pembangunan di Pulau Nipa melibatkan beberapa instansi, mulai dari Kementerian PU, KKP, hingga Kemenhan. Padahal masih banyak pulau terluar di Indonesia yang tidak mendapatkan perhatian seperti Pulau Nipa. Bagaimana anda melihat kondisi ini?
- N: Menurut pandangan saya, pulau terluar itu harus betul – betul kita jaga kita manfaatkan. Cuma untuk menjadikan pulau terluar itu terjaga dan berpenghuni, memang dibutuhkan anggaran lagi. Sementara anggaran kita kan terbatas. Sehingga kita harus membuat skala prioritas dengan memperhatikan beberapa aspek. Misalnya, apakah disitu bisa meningkatkan performil masyarakat nelayan, atau pertahanan? Seperti ambalat contohnya. Itu menyangkut kedaulatan negara. Pulau Nipa juga. Di Kalimantan mungkin juga ada.
- P: Apakah pengelolaan dan penanganan di Pulau Nipa bisa dijadikan pilot project atau konsep dasar untuk pengembangan pulau – pulau terluar lainnya?
- N: Bisa... bisa... Tetapi memang kalau menggunakan anggaran negara hal itu sulit dilakukan. Tetapi jika dilakukan komersialisasi, misalnya dari segi pariwisata atau pelabuhan, hal itu bisa dilakukan. Apalagi juga pulau besarnya adalah wilayah industri. Untuk Pulau Nipa misalnya, kalau pembangunan disana sudah berjalan, bukan tidak mungkin akan menarik minat orang dari Singapura akan menaruh investasi pariwisata di pulau itu. Dengan demikian, kita tidak harus keluar anggaran lagi dan kita juga bisa maju. Di sisi lain, warga negara Singapura harus menggunakan pspor untuk masuk ke Pulau Nipa. Berarti mereka mengakui Pulau Nipa sebagai wilayah Indonesia.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Ir. Chris Triwinasis, M.Si
2. Jenis Kelamin : Laki-laki

3. Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Kota Batam
4. Dinas/Instansi : Pemerintah Daerah Kota Batam
5. Keterangan Interview
- Tempat Interview : Kantor Pemerintah Daerah Kota Batam
- Hari/tanggal : Jumat / 14 November 2014
- Waktu Interview : 09:00 WIB

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

- P: Selama ini sudah seperti apa pengelolaan untuk Pulau Nipa?
- N: Kami ini hanya badan pengelola perbatasan dan pertanahan. Dulu kami ini Badan Pertanahan Daerah. Jadi begitu ada badan perbatasan itu digabung sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2014. Dan kami baru dilantik pejabatnya bulan puasa kemarin. Jadi, tugas kami ini seperti Bapeda-nya pengelola perbatasan. Kami turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. Justru Dinas PU yang lebih tahu masalah pengelolaan fisik di Pulau Nipa
- P: Lalu apa fungsi badan ini?
- N: Fungsi kita untuk menyediakan apa yang dibutuhkan perbatasan. Setelah mengetahui yang dibutuhkan, kita akan mengkoordinasikannya ke pihak – pihak yang terkait. Tugas kita hanya memberi informasi, mengkoordinir ke skpd terkait. Misalnya, kita ke Pulau Nipa dan melihat kalau ternyata disana sudah hampir tergerus. Maka kita akan segera menginformasikannya ke PU atau Perhubungan.
- P: Biasanya tiap berapa lama sekali ke Pulau Nipa untuk memantau situasi?
- N: Selama saya disini, saya baru 2 kali keliling ke pulau – pulau itu. Tidak spesifik ke Pulau Nipa. Itu lebih karena keterbatasan anggaran. Kita sebenarnya inginnya berkali – kali.
- P: Saya hendak mengambil studi kasus Pulau Nipa sebagai pilot project untuk pulau – pulau terluar lainnya. Jadi acuan saya itu pulau nipah itu sudah bagus seperti ini, kenapa pulau lain tidak seperti ini?
- N: Sebenarnya itu karena faktor strategisnya. Misalnya kita ambil contoh Pulau Berhala. Itu masih jauh dari Malaysia. Posisi Pulau Nipa itu seperti Entikong di Kalimantan Barat. Posisinya strategis dan daratannya terhubung. Oleh karena itu infrastruktur disana juga dibangun. Pulau Nipa juga akan dibangun seperti itu. Bahkan Bapeda sudah berencana untuk membentuk RT/RW disana. Kalau ingin data lebih lengkap, bisa datang ke Bapeko bertemu dengan ibu Lina. Nomor teleponnya 081364490006. Beliau ada di Bapeko lantai 6.
- P: Kami dengar dan baca di Internet, Pulau Nipa akan dibangun menjadi sarana komersil

N: Iya. Akan ada cold storage. Nah untuk mengetahui perencanaan ke depan silahkan ke Bu Lina. Atau mungkin langsung ke kelurahannya.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Kolonel Laut (KH) Haris Djoko Nugroho, M.Si
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Jabatan : Kasubdis Perbatasan Ditwilhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan
4. Dinas/Instansi : Kementerian Pertahanan
5. Keterangan Interview
 - Tempat Interview : Kantor Dinas Hidro-Oceanografi TNI AL
 - Hari/tanggal : Senin / 16 Februari 2015
 - Waktu Interview : 10:00 WIB

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

P: Indonesia memiliki 92 pulau terluar, dan 12 diantaranya merupakan pulau kecil terluar yang perlu mendapat perhatian khusus. Mengapa? Lalu bagaimana kebijakan yang tepat diterapkan di pulau terluar itu?

N: Sebagai pintu ke luar negeri, terdapat berbagai bentuk dan jenis ancaman serta pelanggaran yang bisa terjadi di wilayah pulau-pulau kecil terluar, baik militer maupun nirmiliter. Misalnya pelanggaran wilayah oleh kapal – kapal militer ataupun sipil dan berbagai bentuk kegiatan ilegal lainnya. Dengan kata lain, wilayah di halaman depan negara kita dengan mudah dimasuki oleh berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik yang terkait dengan aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, geologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, arah kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, khususnya di perbatasan maritim harus berorientasi outward looking. Paradigma tersebut diarahkan pada pengembangan

- pulau-pulau kecil terluar sebagai berada depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- P: Kalau untuk Pulau Nipa, apa yang membedakan Pulau ini dengan 11 pulau kecil terluar lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah?
- N: Keamanan Pulau Nipa menjadi perhatian pemerintah karena wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain yaitu negara Singapura. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan program pengawasan dan pemantauan di Pulau Nipa. Pemanfaatan Pulau Nipa selayaknya diperkuat melalui effective control, yang termuat dalam administrasi pemerintahan disertai dengan kunjungan atau pengawasan secara kontinyu serta perlunya penegasan batas maritim yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi NKRI. Kepastian hukum ini menjadi penting untuk pemanfaatan sumber – sumber potensi yang dimiliki Pulau Nipa tersebut.”
- P: Apakah penempatan pasukan TNI AL sudah cukup untuk menjaga pulau yang berbatasan dengan Singapura itu?
- N: Dengan mengkaryakan kembali aparatur ataupun sumber daya manusia di sekitar Pulau Nipa. Mengkaryakan menjadi lebih baik daripada menempatkan kembali, karena konotasi menempatkan pada kenyataannya hanya ditempatkan saja tanpa diberikan fasilitas dan kebutuhan kepada sumber daya manusia yang mengawasi Pulau Nipa tersebut.
- P: Seperti apa bentuk riil dari kata “mengkaryakan aparatur” di Pulau Nipa? Apalagi kalau kita lihat, Pulau Nipa sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab TNI AL saja. Tetapi banyak unsur atau kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya.
- N: Adapun program yang dapat dilakukan; Mengkaryakan petugas atau aparat TNI AL yang berfungsi sebagai pengawas di kawasan Pulau Nipa tersebut. Tidak hanya menempatkan tetapi pemberian insentif kepada petugas yang telah bersedia ditempatkan berupa tunjangan hidup aparatur di Pulau Nipa dengan pembiayaan Negara; Melakukan pengawasan dan pemantauan melalui patroli secara teratur di kawasan perairan sekitar Pulau Nipa baik TNI AL, POLRI dan Bea Cukai, berikut dengan kebutuhan sarana prasarana, seperti kapal – kapal pengawasan dan pemantauan yang memenuhi standar internasional; Melakukan relokasi dan pengkaryaan nelayan ke sekitar kawasan Pulau Nipa dalam rangka meningkatkan pengawasan wilayah Pulau Nipa. Relokasi diikuti dengan memberikan bantuan permodalan dan akses informasi serta kemudahan dalam memperoleh kebutuhan dasar; Melakukan kerjasama bilateral dan regional dengan negara Singapura untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan.
- P: Lalu seperti apa bentuk riil kegiatan pengembangan Pulau Nipa yang sudah ada hingga saat ini?
- N: Dari sisi pertahanan keamanan, di Pulau Nipa telah dibangun pangkalan TNI Angkatan Darat dan Marinir Angkatan Laut. Dari sisi ekonomi, telah disusun blueprint pengembangan Pulau Nipa untuk pembangunan oil storage dan transit anchorage area. Sedangkan dari sisi lingkungan, telah diperuntukkan laguna sekitar 6 ha untuk pengembangan kawasan mangrove.

Transkrip Interview dengan Narasumber

A. Informasi Umum Narasumber

1. Nama : Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Jabatan :Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Dinas/Instansi : Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Keterangan Interview
- Tempat Interview : Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Hari/tanggal : Selasa / 17 Februari 2015
- Waktu Interview : 13:00 WIB

B. Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Keterangan : N: Narasumber P: Peneliti

- P: Bagaimana bentuk pengelolaan keamanan pulau terluar yang tepat menurut KKP?
- N: Pengelolaan Pulau-pulau terluar dalam pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan penerapan teknologi informasi. Hal ini menjadi penting mengingat IUU Fishing target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti high sea.
- P: Kalau untuk Pulau Nipa seperti apa?
- N: Khusus untuk Pulau Nipa, sebagai pulau yang tak berpenduduk, pengembangan Pulau Nipa mengacu pada misi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara, serta menciptakan stabilitas kawasan serta memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Pulau Nipa dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- P: Seperti apa strategi pengelolaan pulau – pulau kecil terluar?
- N: Ada beberapa strategi yang diterapkan pemerintah untuk pengelolaan pulau – pulau kecil terluar. Namun penerapannya juga harus tetap dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik dari pulau – pulau kecil terluar itu. Namun secara garis besar, pengelolaan itu akan selalu mengedepankan sektor keamanan, pemberdayaan sdm lokal dan perekonomian. Maka kalau diperinci kembali, maka strategi pengelolaan pulau – pulau kecil terluar, adalah antara lain dengan:
- a. Membuka simpul – simpul akses kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang internasional. Dengan membuka akses pasar internasional pulau – pulau terluar, diharapkan potensi yang ada di masing – masing pulau dapat lebih diberdayakan. Seperti misalnya Pulau Berhala. Keberadaan pulau ini di Selat Malaka yang merupakan salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional, sehingga Pulau Berhala juga dibuka sebagai akses dalam perdagangan internasional.
 - b. Meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau terutama di pulau – pulau terluar. Yaitu misalnya dengan membuka trayek kapal PT Pelni ataupun jalur transportasi lain menuju daerah pulau – pulau terluar Indonesia, sehingga akses penduduk untuk ke daerah lain disekitarnya dapat lebih mudah.
 - c. Melibatkan berbagai instansi dalam pemberdayaan pulau khususnya pulau – pulau terluar. Pemberdayaan berbagai instansi dalam pengelolaan pulau – pulau terluar. Pemberdayaan berbagai instansi dalam pengelolaan pulau – pulau terluar ini sangat penting, karena pengelolaan pulau merupakan masalah yang kompleks, sehingga dibutuhkan koordinasi dari masing – masing instansi/departemen. Seperti misalnya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ketika akan

melakukan rehabilitasi ekosistem yang pulau terluar, pasti akan membutuhkan dukungan dan informasi dari Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini adalah pemerintah daerah

d. Mensinergikan berbagai program ekonomi dan hankam di perbatasan maritim dan kepulauan. Yaitu dengan membuat program kegiatan terkait dengan pengamanan pulau – pulau terluar.

e. Mengundang private sector participation dalam investasi untuk pengembangan pulau kecil (terutama di wilayah perbatasan). Hal ini misalnya dengan membuka kawasan pulau – pulau terluar sebagai kawasan pariwisata dan lain sebagainya. Seperti misalnya pengembangan Pulau Bidadari dan Pulau Seribu sebagai kawasan pariwisata.

f. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan kepulauan di perbatasan sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya. Menghidupkan kerjasama internasional dalam berbagai sektor untuk pengembangan kelautan.

g. Dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara lain maupun lembaga swasta dalam konservasi hayati dan lingkungan di pulau – pulau terluar.

P: Kalau kita lihat, sebenarnya pemerintah selalu mengedepankan unsur pemberdayaan sdm lokal saat hendak mengembangkan pulau terluar. Apa hambatan yang selama ini ditemui?

N: Perbatasan maritim adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah NKRI, meskipun sebagian wilayah perbatasan maritim di Indonesia masih terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi geografis ini juga seringkali mengakibatkan kesejahteraan masyarakat di pulau – pulau terluar masih rendah.